



Kementerian PPN/
Bappenas



UNIVERSITAS
INDONESIA



PUSKAPA
CENTER ON CHILD PROTECTION & WELLBEING

#A Fair Chance For All Children

unicef 

untuk setiap anak



SITUASI ANAK-ANAK DAN KAUM MUDA DI KOTA-KOTA DI INDONESIA



SITUASI ANAK-ANAK DAN KAUM MUDA DI KOTA-KOTA DI INDONESIA

UCAPAN TERIMA KASIH

Publikasi ini dikembangkan oleh UNICEF dan PUSKAPA, didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Tim Inti

- Santi Kusumaningrum
- Andrea Andjaringtyas Adhi
- Clara Siagian
- Widi Laras Sari

Konseptualisasi Strategis dan Arahan Teknis

Santi Kusumaningrum, Widi Laras Sari, and Clara Siagian

Manajemen Proyek dan Koordinasi

Andrea Andjaringtyas Adhi (PUSKAPA), Angga Dwi Martha (UNICEF)

Pengolahan Data Mentah (sesuai alfabet)

- Andrea Andjaringtyas Adhi
- Clara Siagian
- Jaya Wina Santiya
- Qodri Azizi Akbar
- Ryan Febrianto
- Shaila Tieken
- Wenny Wandasari
- Widi Laras Sari

Analisis Data dan Riset (sesuai alfabet)

- Andrea Andjaringtyas Adhi
- Clara Siagian
- Jaya Wina Santiya
- Qodri Azizi Akbar
- Ryan Febrianto
- Santi Kusumaningrum
- Shaila Tieken
- Wenny Wandasari
- Widi Laras Sari

Masukan Analitis Tambahan

- Ilana Seff
- Cyril Bennouna

Masukan Kebijakan

- Woro Srihastuti Sulistyningrum, ST, MIDS
- Ir. Yosi Diani Tresna, MPM
- Indah Erniawati, S.Sos, MSP
- Neny Aryani Nurizky Rahayu, S.Psi
- Ahmad Avenzora, S.E., M.SE.
- Amiek Chamami, SST., M.Stat.
- Wachyu Winarsih, M.Si.
- Andhie Surya Mustari, SST., M.Si.
- Dr. Budi Santoso, S.ST, M.Si
- Winida Albertha SST, M.Sc
- Piping Setyo Handayani, S.ST.
- Raden Sinang SST, M.Si.
- Sapta Hastho Ponco, SST, M.Stat.
- Ida Eridawati H, SSI, M.Si.
- Idha Sahara SST, M.Si.
- Ika Maylasari, S.S.T., M.Si.
- Maarif Ibnu Khoer, S.S.T., M.Stat.

Penulis

- Santi Kusumaningrum
- Clara Siagian
- Widi Laras Sari
- Andrea Andjaringtyas Adhi
- Wenny Wandasari
- Ryan Febrianto
- Shaila Tieken

Copy editing (secara alfabet)

- Cyril Bennouna
- Chris Hesselbein
- Ilana Seff
- ProseWorks team

Visualisasi data, desain, layout

- Dewi Simanjuntak

Kementerian PPN/Bappenas

- Woro Srihastuti Sulistyningrum, ST, MIDS
- Ir. Yosi Diani Tresna, MPM
- Indah Erniawati, S.Sos, MS
- Neny Aryani Nurizky Rahayu, S.Psi

Badan Pusat Statistik/BPS

- Ahmad Avenzora, S.E., M.SE.
- Amiek Chamami, SST., M.Stat.
- Wachyu Winarsih, M.Si.
- Andhie Surya Mustari, SST., M.Si.
- Dr. Budi Santoso, S.ST, M.Si
- Winida Albertha SST, M.Sc
- Piping Setyo Handayani, S.ST.
- Raden Sinang SST, M.Si.
- Sapta Hastho Ponco, SST, M.Stat.
- Ida Eridawati H, SSI, M.Si.
- Idha Sahara SST, M.Si.
- Ika Maylasari, S.S.T., M.Si.
- Maarif Ibnu Khoer, S.S.T., M.Stat

Tim Urbanisasi untuk Anak-Anak

- Yoshimi Nishino
- Angga Dwi Martha
- Zoe Rimba
- Nur Hamidah

Laporan ini menerima dukungan berharga dari berbagai kolega. Ucapan terima kasih terutama kami berikan kepada Diahhadi Setyonaluri, Flora Aninditya, Wisnu Harto Adi Wijoyo, Nadira Irdiana, Sage Emmerson, Nur Rahmatika Putri Peni, Buce Eduarto Yohanis, Sarah Tamimi, Rachmi Mustika Sari, Fernando Carrera, Charlotte Lie-Piang, Bheta Arsyad, dan Ticiana Garcia-Tapia.

Saran Sitasi

Kusumaningrum, S., Siagian, C., Sari, W. L., Adhi, A. A., Wandasari, W., Febrianto, R., Tieken, S., 2021. Situasi Anak-Anak dan Kaum Muda di Kota-Kota di Indonesia, Jakarta, Indonesia: PUSKAPA, UNICEF, dan BAPPENAS.



KATA PENGANTAR DARI UNICEF

Semakin banyak anak-anak tinggal di daerah perkotaan. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional, hampir 46 juta anak-anak tinggal di area urban di tahun 2019, dibandingkan dengan tahun 2015 dimana jumlahnya mencapai 41 juta.

Urbanisasi dapat membawa kesempatan baru bagi anak-anak dan keluarga mereka, tetapi ini juga dapat membawa berbagai tantangan baru. Sebanyak 5,6 juta anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan di Indonesia tinggal di permukiman kumuh, dan sekitar 37% dari mereka tinggal di bawah garis kemiskinan.

Pandemi COVID-19 membawa dampak besar kepada kelompok miskin di kota. Kesulitan keuangan dan pembatasan mobilitas telah memperburuk kerentanan yang dialami oleh anak-anak di daerah perkotaan. Temuan baru terkait dampak sosial dan ekonomi COVID-19 di Indonesia menunjukkan bagaimana satu dari empat keluarga, terutama mereka yang tinggal di daerah kota, mengalami penurunan pendapatan karena pandemi.

Laporan ini juga menemukan bahwa meskipun kota-kota besar memiliki pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya yang baik, masih ada anak-anak dan keluarga-keluarga yang tinggal di bawah garis kemiskinan dan mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, air dan sanitasi.

Laporan ini juga mengangkat beberapa isu perlindungan anak, seperti tingginya kasus pernikahan usia dini di kalangan anak-anak yang tinggal di permukiman kumuh, dan juga tantangan yang dihadapi keluarga rentan di permukiman kumuh di kota dalam mengakses pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan perlindungan anak lainnya.

Semua ini adalah isu-isu yang patut mendapatkan perhatian dan tindakan kita bersama. Anak-anak berhak mendapatkan pelayanan dasar yang mudah diakses dan mengakomodir semua kelompok.

Saya berharap laporan ini akan berguna bagi pembuat kebijakan dan mereka yang bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di lingkungan perkotaan. Dengan artikulasi yang jelas mengenai kesempatan dan tantangan yang dihadapi keluarga rentan di daerah perkotaan, bukti yang dipaparkan di laporan ini sangat berharga bagi pengambilan keputusan terkait kebijakan kota yang ramah anak.

Robert Gass
Representatif a.i
UNICEF

KATA PENGANTAR DARI BAPPENAS

Anak dan kaum muda adalah pemilik masa depan kota. Kualitas hidup anak dan kaum muda di perkotaan menentukan keberhasilan pembangunan di kota itu sendiri. Berdasarkan data SUSENAS 2019, setidaknya diperkirakan sekitar 46 juta anak hidup di wilayah perkotaan. Keberlangsungan hidup mereka sangat dipengaruhi tingkat kesulitan hidup yang dapat dilihat dari berbagai faktor, mulai dari faktor biologis individu, interaksi antara seseorang dengan lingkungan sekitarnya, sampai dengan faktor struktural. Meskipun secara umum kehidupan anak dan kaum muda di perkotaan lebih baik dibandingkan di perdesaan, populasi paling rentan di perkotaan mengalami hambatan struktural untuk dapat hidup dan berkembang secara optimal.

Mempertimbangkan hal tersebut, dan dengan mengedepankan pentingnya perumusan kebijakan berbasis bukti untuk perkotaan yang inklusif terhadap anak dan kaum muda, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNICEF Indonesia dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) melakukan inisiatif untuk menyusun Studi Situasi Anak dan Kaum Muda di Perkotaan di Indonesia.

Studi ini mencoba menggali karakteristik demografis, sosial, dan ekonomi, serta kesulitan hidup anak dan kaum muda yang tinggal di wilayah perkotaan, serta menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi oleh mereka. Hasil dan temuan studi ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap perencanaan dan pengambilan kebijakan di wilayah perkotaan untuk memperbaiki situasi hidup anak dan kaum muda di Indonesia di masa mendatang.

Apresiasi dan penghargaan kami sampaikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS), UNICEF Indonesia, dan PUSKAPA atas kerja sama dan kerja kerasnya dalam mewujudkan publikasi laporan studi situasi hidup anak dan kaum muda di perkotaan ini. Semoga laporan dan data yang komprehensif ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemenuhan hak-hak anak dan kaum muda di Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di wilayah perkotaan.

Woro Srihastuti Sulistyaningrum
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas

KATA PENGANTAR DARI PUSKAPA

Urbanisasi terus meningkat di Indonesia. Meskipun kesejahteraan anak di perkotaan secara keseluruhan mengalami kemajuan, kelompok anak yang termarginalkan di kota masih menghadapi banyak tantangan untuk bertumbuh kembang dengan optimal. Anak di rumah tangga miskin di perkotaan memiliki lebih sedikit akses kepada layanan dan kesempatan tumbuh kembang dibandingkan rekan sebayanya dari rumah tangga tidak miskin. Kajian literatur juga menunjukkan bahwa kaum muda yang rentan di perkotaan mengalami kesulitan hidup yang unik.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi karakteristik, kesejahteraan, serta pengalaman hidup anak dan kaum muda di perkotaan Indonesia. Berkolaborasi dengan PUSKAPA, UNICEF melakukan penelitian guna mendorong dialog kebijakan yang lebih dalam tentang isu ini, serta menyediakan informasi awal bagi pertimbangan kebijakan dan program yang inklusif dan responsif terkait anak dan kaum muda di perkotaan.

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan. Di tengah persiapan, pandemi COVID-19 menyerang. Kami secara cepat menyesuaikan rencana awal pengumpulan data tatap muka untuk memastikan studi ini tidak membahayakan siapapun dan menggunakan metode digital untuk mencapai tujuan penelitian melalui wawancara asinkron. Hasilnya, kami dapat mendokumentasikan pengalaman beberapa kaum muda terpilih yang bertempat tinggal di perkotaan, meski dalam skala yang lebih kecil dari yang direncanakan sebelumnya.

Kami ingin memberikan apresiasi tertinggi untuk kaum muda yang berpartisipasi dalam studi ini, yang bersedia membagikan cerita mereka dengan penuh semangat. Laporan ini menceritakan pengalaman mereka guna memperkaya pembahasan tentang isu ini dan temuan dari analisis sekunder. Kami juga berterima kasih kepada seluruh peneliti, fasilitator, petugas administratif, dan semua yang melaksanakan, mendukung, membaca, dan menggunakan studi ini dalam bentuk apapun.

Terakhir, kami berterima kasih kepada Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Badan Pusat Statistik untuk masukan mereka yang berharga serta dukungan dalam finalisasi laporan ini. Kami berharap studi ini dapat menginspirasi lebih banyak lagi penelitian, kebijakan, dan praktik yang memungkinkan kesempatan yang sama untuk anak dan kaum muda di Indonesia.

Santi Kusumaningrum
Direktur, PUSKAPA

DAFTAR GAMBAR, KOTAK, TABEL, LAMPIRAN

GAMBAR

Gambar 1.	Proses Skrining Tiga Tahap	13
-----------	----------------------------	----

KOTAK

Kotak 1.	Pengertian dan klasifikasi wilayah perkotaan di indonesia	20
Kotak 2.	Covid-19: potensi implikasi bagi anak dan kaum muda di delapan provinsi utama	30

TABEL

Tabel 1.	Tinjauan literatur sistematis	12
Tabel 2.	Daftar indikator yang dianalisis dari SUSENAS 2019	14
Tabel 3.	Daftar indikator yang dianalisis dari IDHS	16
Tabel 4.	Tren proporsi anak, menurut jenis tempat tinggal, 2015–2019 (%)	34
Tabel 5.	Karakteristik anak yang tinggal di perdesaan dan perkotaan indonesia, 2019	36
Tabel 6.	Proporsi anak-anak terhadap total populasi di perkotaan, perdesaan, daerah kumuh perkotaan, daerah kumuh perdesaan pada tahun 2019, berdasarkan provinsi	37
Tabel 7.	Rasio anak-anak terhadap populasi, berdasarkan ukuran kota dan wilayah mega-urban pada tahun 2019	38
Tabel 8.	Proporsi indikator kesehatan dan gizi anak terpilih dari susenas 2019, menurut klasifikasi perkotaan/perdesaan, kota dan mega-urban (%).	42
Tabel 9.	Provinsi dengan kinerja terendah dalam hal bayi yang lahir di bawah 2,5 kg di perkotaan dan kesenjangan antara proporsi di perkotaan dan perdesaan	43
Tabel 10.	Provinsi dengan kinerja terendah dalam hal balita yang mendapatkan imunisasi lengkap di perkotaan dan kesenjangan antara proporsi di perkotaan dan perdesaan	43
Tabel 11.	Provinsi dengan kinerja terendah dalam hal remaja perokok di perkotaan dan kesenjangan antara proporsi di perkotaan dan perdesaan	44
Tabel 12.	Estimasi survei demografi dan kesehatan indonesia tahun 2012 dan 2017 tentang indikator kesehatan dan gizi yang dipilih (%)	45
Tabel 13.	Proporsi anak-anak yang tidak mengenyam prasekolah, tidak bersekolah, dan tidak memiliki akses ke internet, 2015–2019	49
Tabel 14.	Proporsi anak-anak yang tidak bersekolah, putus sekolah, tingkat kelulusan dan anak-anak yang tidak memiliki akses internet, berdasarkan klasifikasi perkotaan/perdesaan, kota dan mega-urban	51
Tabel 15.	Provinsi dengan kinerja terendah dalam hal anak usia 6 tahun yang tidak pernah mengenyam pendidikan prasekolah dan sekolah dasar di perkotaan dan kesenjangan antara proporsi di perkotaan dan perdesaan, 2019	52

Tabel 16. Provinsi dengan kinerja terendah dalam hal anak usia 5-17 tahun di perkotaan tanpa akses internet dan kesenjangan antara proporsi di perkotaan dan perdesaan, 2019	53
Tabel 17. Prevalensi perkawinan anak dan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak, 2015–2019	55
Tabel 18. Prevalensi perkawinan anak dan kepemilikan akta kelahiran anak, menurut klasifikasi perkotaan/perdesaan, kota dan mega-urban, 2019	56
Tabel 19. Provinsi dengan kinerja terendah dalam hal kepemilikan akta kelahiran anak dan kesenjangan antara proporsi di perkotaan dan perdesaan, 2019	57
Tabel 20. Provinsi dengan kinerja terendah dalam hal prevalensi perkawinan anak dan kesenjangan antara proporsi di perkotaan dan perdesaan, 2019	57
Tabel 21. Proporsi anak-anak yang tinggal di rumah tangga dengan air minum layak dan sanitasi layak, 2015–2019	60
Tabel 22. Proporsi anak-anak yang tinggal di rumah tangga dengan air minum yang layak dan sanitasi yang layak, menurut klasifikasi perkotaan/perdesaan, kota dan mega-urban, 2019	60
Tabel 23. Provinsi dengan kinerja terendah dalam hal anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan yang memiliki akses terhadap air minum layak dan kesenjangan antara proporsi di perkotaan dan perdesaan, 2019	61
Tabel 24. Proporsi anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional dan yang masuk ke dalam 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah, 2015–2019	63
Tabel 25. Proporsi anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional dan yang masuk ke dalam 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah, menurut klasifikasi perkotaan/perdesaan, kota dan mega-urban, 2019.	64
Tabel 26. Provinsi dengan kinerja terendah dengan anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan di wilayah perkotaan dan kesenjangan antara proporsi di perkotaan dan perdesaan, 2019	65
Tabel 27. Provinsi dengan kinerja terendah dalam hal anak-anak yang masuk ke dalam 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah di daerah perkotaan dan kesenjangan antara proporsi di perkotaan dan perdesaan, 2019	65

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peserta konsultasi (wawancara asinkron dan mendalam)	107
Lampiran 2. Sistem skor untuk klasifikasi perkotaan/perdesaan	108
Lampiran 3. Daftar wilayah mega-urban	108
Lampiran 4. Provinsi dengan kinerja terendah dalam hal anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan dengan sanitasi yang layak dan kesenjangan antara proporsi di perkotaan dan perdesaan, 2019	109
Lampiran 5. Angka kematian anak, balita dan bayi di bawah 1 tahun menurut usia ibu saat ini	109
Lampiran 6. Persentase anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami diare dua minggu sebelum survei, menurut kuintil kekayaan	109
Lampiran 7. Provinsi dengan kinerja terendah dengan anak usia 6 tahun yang saat ini mengenyam sekolah dasar tanpa mengenyam prasekolah di perkotaan dan kesenjangan antara proporsi di perkotaan dan perdesaan, 2019	110
Lampiran 8. Provinsi dengan kinerja terendah dengan anak putus sekolah usia 7-12 tahun di perkotaan dan kesenjangan antara proporsi di perkotaan dan perdesaan, 2019	110

Lampiran 9.	Provinsi dengan kinerja terendah dengan anak putus sekolah usia 13-15 tahun di perkotaan dan kesenjangan antara proporsi di perkotaan dan perdesaan, 2019	111
Lampiran 10.	Provinsi dengan kinerja terendah dengan anak putus sekolah usia 16-18 tahun di perkotaan dan kesenjangan antara proporsi di perkotaan dan perdesaan, 2019	111
Lampiran 11.	Provinsi dengan kinerja terendah dengan tingkat kelulusan sekolah dasar di wilayah perkotaan dan kesenjangan antara proporsi di perkotaan dan perdesaan, 2019	112
Lampiran 12.	Provinsi dengan kinerja terendah dengan tingkat kelulusan sekolah menengah pertama di wilayah perkotaan dan kesenjangan antara proporsi di perkotaan dan perdesaan, 2019	112
Lampiran 13.	Provinsi dengan kinerja terendah dengan tingkat kelulusan sekolah menengah atas di wilayah perkotaan dan kesenjangan antara proporsi di perkotaan dan perdesaan, 2019	113
Lampiran 14.	Prevalensi perkawinan anak dan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak, menurut klasifikasi perkotaan – perdesaan di tingkat desa di kota dan mega urban, 2019	113
Lampiran 15.	Proporsi anak-anak yang tinggal di rumah tangga dengan air minum yang layak dan sanitasi yang layak, menurut klasifikasi perkotaan - perdesaan di tingkat desa di kota dan mega urban, 2019	114

DAFTAR ABREVIASI

AKRONIM DAN ABREVIASI	BAHASA INDONESIA	ENGLISH
BPS	Badan Pusat Statistik	Statistics Indonesia
IDHS	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)	Indonesia Demographic and Health Survey
ISCED	Klasifikasi Pendidikan Standar Internasional	International Standard Classification of Education
IYCF	Pemberian Makan Bayi dan Anak	Infant and Young Child Feeding
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional	National Health Insurance
Musrenbang	Musyawahar Perencanaan Pembangunan	Development Planning Consultation Meeting
NEET	Tidak dalam Pendidikan, Pekerjaan, atau Pelatihan	Not in Education, Employment, or Training
NIK	Nomor Induk Kependudukan	National ID Number
OSIS	Organisasi Siswa Intra-Sekolah	Intra-School Students' Organization
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum	Local Government Owned Water Utilities
PKH	Program Keluarga Harapan	Family Hope Programme
PKL	Praktik Kerja Lapangan	On-Job Training
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu	Integrated Service Centre
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat	Community Health Centre
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	National Medium-Term Development Plan
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Long-Term National Development Plan
Rusunawa	Rumah Susun Sederhana Sewa	(Rental) Public Walk-up Flats
SDG	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sustainable Development Goals
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional	The National Socioeconomic Survey

DAFTAR ISTILAH

ISTILAH	DEFINISI
<i>angkot</i>	Singkatan dari “angkutan kota”. Angkutan umum perkotaan dengan trayek tertentu dan tidak memiliki pemberhentian khusus sehingga dapat menaikkan dan menurunkan penumpang di sepanjang rute tersebut.
Constant Comparative Method	Sebuah metode analisis data kualitatif dengan membandingkan (memeriksa persamaan dan perbedaan) pada beberapa temuan.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib, diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (<i>managed care</i>).
<i>kampung</i>	Pemukiman yang dikembangkan secara inkremental oleh masyarakat di perkotaan dengan karakteristik sosial yang masih kuat seperti pada kampung di perdesaan.
Musrenbang	Singkatan dari “Musyawarah Perencanaan Pembangunan.” Bagian dari proses perencanaan dimana masyarakat dalam suatu wilayah berkumpul untuk membahas masalah yang dihadapi di wilayah mereka dan memutuskan prioritas untuk pembangunan jangka pendek.
NEET	Singkatan dari <i>Not in Education, Employment, or Training</i> -- indikator yang menunjukkan proporsi kaum muda yang tidak bekerja, tidak mengenyam pendidikan, atau pelatihan.
<i>ojek</i>	Sepeda motor yang berfungsi seperti taksi.
<i>penertiban</i>	Tindakan dalam rangka mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan dalam masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
PKH	Singkatan dari “Program Keluarga Harapan”. Program Kementerian Sosial Republik Indonesia berupa pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Kurang Mampu (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.
PKL	Singkatan dari “Praktik Kerja Lapangan”. Model pelatihan untuk siswa dan/atau mahasiswa yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mereka sambil mendapatkan pengalaman langsung di tempat kerja.
Posyandu	Singkatan dari “Pos Pelayanan Terpadu”. Tempat untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat seperti layanan Keluarga Berencana (KB) dan layanan kesehatan, antara lain gizi, imunisasi, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dan pengendalian diare. Biasanya ditempatkan di tingkat desa/kelurahan.
Puskesmas	Singkatan dari “Pusat Kesehatan Masyarakat”. Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
Rusunawa	Singkatan dari “Rumah Susun Sederhana Sewa”. Rumah susun sewa yang sebagian besar dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan biaya sewa murah karena biaya yang disubsidi. Rusunawa umumnya dikembangkan di kota-kota dengan konsentrasi penduduk yang besar dengan terbatas. Di banyak kota, rusunawa juga menjadi tempat tinggal tujuan bagi masyarakat yang direlokasi sebagai dampak pembangunan.



DAFTAR ISI

Ringkasan eksekutif	5
1. Latar belakang	8
2. Metodologi	11
2.1. Tinjauan literatur	12
2.2. Analisis sekunder	14
2.3. Konsultasi daring	17
3. Gambaran literatur dari situasi perkotaan di Indonesia	19
3.1. Karakteristik perkotaan Indonesia	22
3.2. Isu-isu perkotaan Indonesia yang dibahas dalam literatur	22
3.2.1 Migrasi desa-kota	22
3.2.2 Hunian	24
3.2.3 Penggusuran permukiman	24
3.3. Anak-anak dan populasi rentan di pusat kota di Indonesia	26
3.4. Anak-anak dan populasi rentan di daerah perkotaan dalam literatur global	27
3.5. Daerah perkotaan dan pandemi COVID-19	28
4. Anak-anak di perkotaan di Indonesia: siapa mereka?	33
5. Situasi anak-anak dan kaum muda di daerah perkotaan	39
5.1. Kesehatan dan kesejahteraan	40
5.1.1. Indikator kesehatan yang dipilih berdasarkan SUSENAS	41
5.1.2. Indikator kesehatan yang dipilih berdasarkan SDKI	44
5.1.3. Akses ke layanan kesehatan	46
5.1.4. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19	46
5.1.5. COVID-19 dan dampaknya terhadap kesejahteraan	48
5.2. Pendidikan dan pembelajaran	48
5.2.1. Indikator pendidikan dan akses ke pendidikan	49
5.2.2. Tantangan dalam belajar daring	53
5.2.3. Tidak bersekolah, Tidak dalam Pendidikan, Pekerjaan, atau Pelatihan (NEET) dan aspirasi pendidikan	54





© UNICEF/UN0409838/Bea



© UNICEF/UN0506284/Ijazah



© UNICEF/UN0506816/Saroni

5.3. Perlindungan dari kekerasan	54
5.3.1. Kepemilikan akta kelahiran dan perkawinan anak	55
5.3.2. Persepsi tentang pernikahan	58
5.3.3. Keamanan dan paparan terhadap kekerasan	58
5.4. Akses ke air dan sanitasi	59
5.4.1. Air dan sanitasi layak	59
5.4.2. Sumber air dan kualitas air	61
5.5. Kemiskinan dan serba kekurangan	62
5.5.1. Tingkat kemiskinan anak di Indonesia	63
5.5.2. Ke(tidak)amanan pekerjaan dan ke(tidak)stabilan pendapatan	66
5.5.3. Akses ke perlindungan sosial	67
5.6. Ruang yang aman dan berkelanjutan	67
5.6.1. Bencana alam dan bencana buatan manusia	68
5.6.2. Hunian yang tidak layak	68
5.6.3. Reklamasi dan penggusuran lahan	69
5.6.4. Migrasi desa-kota	69
5.6.5. Fasilitas umum dan transportasi	70
5.7. Partisipasi dalam pengambilan keputusan	71
5.7.1. Partisipasi dalam kegiatan komunitas	71
5.7.2. Partisipasi melalui wadah formal untuk keterlibatan pemuda	71
5.7.3. Demonstrasi publik sebagai cara berpartisipasi	71
5.7.4. Masalah-masalah terkait partisipasi anak-anak dan kaum muda	72
6. Pembahasan	73
7. Limitasi studi	85
8. Kesimpulan dan rekomendasi	88
8.1. Rekomendasi khusus	89
8.2. Rekomendasi umum untuk pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya	91
9. Referensi	98
10. Lampiran	106



RINGKASAN EKSEKUTIF

GAMBARAN STUDI

Jumlah anak-anak yang tinggal di area perkotaan di Indonesia terus meningkat. Terlepas dari fakta bahwa anak-anak di daerah perkotaan memiliki kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak di perdesaan, kelompok-kelompok yang terpinggirkan masih kesulitan untuk bertahan hidup dan berkembang. Masyarakat miskin dan kelompok rentan di daerah perkotaan, yang mana hampir sepertiganya adalah anak-anak dan kaum muda, memiliki akses yang terbatas ke layanan berkualitas dan peluang yang lebih kecil untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Studi ini melihat karakteristik, kesejahteraan, dan pengalaman hidup anak-anak dan kaum muda sebagai masukan agar kebijakan dan program bisa mewujudkan mitos peluang di kota menjadi suatu kenyataan bagi semua anak dan kaum muda, terutama mereka yang terpinggirkan.

Studi ini menggabungkan tinjauan kuantitatif terhadap indikator-indikator utama kesejahteraan anak-anak dan kaum muda di perkotaan, dengan informasi kualitatif mendalam tentang kehidupan sehari-hari yang dirasakan dan dialami oleh kaum muda perkotaan. Analisis kuantitatif sebagian besar menggunakan data nasional yang ada, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), untuk memahami situasi anak-anak di perkotaan. Analisis sekunder mengukur sekitar 20 indikator berdasarkan tema Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia 2020–2024. Kombinasi antara analisis data sekunder, tinjauan literatur tersistematis, dan konsultasi dengan anak-anak dan kaum muda menghasilkan wawasan tentang kendala dan peluang yang mereka dan komunitas mereka hadapi.

TEMUAN KUNCI

Meskipun beberapa kerentanan sama-sama dialami oleh anak-anak dan kaum muda di perkotaan dan perdesaan, wujudnya bisa berbeda-beda. Temuan dari studi ini juga menunjukkan bahwa tantangan yang sebagian anak atau kaum muda hadapi di perkotaan bisa jadi menciptakan peluang bagi yang lain: peluang dan tantangan bisa saling beririsan. Terakhir, temuan tentang kesenjangan antara desa-kota juga bisa merupakan hasil dari pendefinisian resmi atau pengklasifikasian daerah perkotaan dan perdesaan yang beragam.

Sebisa mungkin, temuan terkait tantangan dan peluang yang dihadapi anak-anak yang tinggal di perkotaan disajikan berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, perbandingan perkotaan-perdesaan, dan latar belakang sosial ekonomi.

KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

- » Data SUSENAS 2019 menunjukkan bahwa kebiasaan merokok di kalangan remaja tidak banyak bisa dibedakan antara di perkotaan/perdesaan, daerah kumuh perkotaan, dan daerah kumuh perdesaan. Sementara, dalam hal berat lahir dan imunisasi, anak-anak di daerah kumuh perdesaan secara konsisten mengalami kondisi yang lebih buruk.
- » Analisis data SDKI menunjukkan bahwa angka kematian balita secara umum lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya, dan juga untuk kelompok usia ini di perdesaan, meskipun angka ini mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2017.
- » Berdasarkan konsultasi dengan kaum muda di perkotaan, perbedaan pemahaman dan kepatuhan mereka pada protokol kesehatan bisa terkait dengan kesalahpahaman tentang pandemi COVID-19. Beberapa peserta mengutarakan bahwa mereka meragukan betapa besar dan

beratnya dampak virus dan pandemi ini, dan hal ini tampak diyakini luas oleh banyak teman mereka di komunitasnya.

- » Meski beberapa masih meragukan, pandemi telah menciptakan situasi penuh ketidakpastian dan kecemasan bagi anak-anak dan kaum muda yang tinggal di perkotaan dan berpartisipasi dalam studi ini.

PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

- » Secara keseluruhan, indikator pendidikan anak-anak di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan dengan anak-anak di daerah perdesaan. Lebih lagi, anak-anak yang tinggal di rumah tangga kumuh di daerah perdesaan tampak paling mengalami kesulitan akses ke sekolah dan Internet.
- » Anak-anak dan kaum muda yang berpartisipasi dalam studi juga kesulitan untuk beradaptasi dengan metode belajar daring, di mana mereka seringkali tidak dapat berinteraksi secara langsung dan lancar dengan guru dan teman sekolahnya.
- » Meskipun daerah perkotaan umumnya memiliki kinerja yang lebih baik daripada daerah perdesaan pada banyak indikator yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran, masih terdapat anak-anak dan kaum muda di kota yang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN

- » Kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak-anak dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik di perdesaan maupun di perkotaan.
- » Meskipun perkawinan anak tampaknya sedikit menurun antara tahun 2015 dan 2019 di daerah perdesaan, praktik kawin anak di daerah perkotaan terus ada dan cenderung tidak menurun.
- » Di perkotaan, perkawinan anak lebih marak terjadi pada rumah tangga yang tinggal di permukiman kumuh dibandingkan dengan anak yang tinggal di rumah tangga yang tidak kumuh.

AKSES KE AIR DAN SANITASI

- » Antara tahun 2015 dan 2019, proporsi jumlah anak-anak yang tinggal di rumah tangga dengan air minum yang layak mengalami penurunan. Namun, hal ini mungkin dapat dijelaskan dengan adanya peningkatan penggunaan air isi ulang bermerek dan praktik isi ulang tangki air, yang merupakan dua sumber yang tidak termasuk dalam definisi air minum layak menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
- » Sebaliknya, akses terhadap sanitasi layak tampaknya telah meningkat antara tahun 2015

hingga 2019, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

- » Akses ke sanitasi layak masih menjadi masalah yang jauh lebih besar di daerah perdesaan.

KEMISKINAN DAN DEPRIVASI

- » Tingkat kemiskinan anak – yang didefinisikan sebagai persentase anak yang hidup di bawah garis kemiskinan, atau yang termasuk dalam 40 persen berpendapatan terendah – lebih rendah di daerah perkotaan Indonesia, dibandingkan dengan di daerah perdesaan.
- » Meskipun perkotaan menunjukkan proporsi anak-anak miskin yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah perdesaan, kemiskinan perkotaan tetap menjadi masalah di Indonesia.
- » Mayoritas informan dari konsultasi melaporkan pernah menerima bantuan dari setidaknya satu jenis program bantuan sosial selama pandemi.

RUANG YANG AMAN DAN BERKELANJUTAN

- » Beberapa anak muda yang berpartisipasi dalam studi menyebutkan bahwa bencana alam dan bencana ulah manusia, seperti banjir, kekeringan dan kebakaran sering mereka alami.
- » Keberadaan permukiman kumuh merupakan gejala minimnya tempat tinggal yang terjangkau dan memadai di perkotaan. Kaum muda yang kami wawancarai sangat menyadari masalah ini dan menyuarakan keprihatinan mereka atas situasi rumah mereka saat ini dan masa depan.
- » Meskipun reklamasi lahan membawa peluang ekonomi baru, reklamasi juga meningkatkan ancaman penggusuran bagi orang-orang yang tinggal di daerah sekitarnya. Penggusuran tidak hanya didorong oleh pembangunan fisik atau infrastruktur besar-besaran, tetapi juga oleh proyek-proyek mitigasi banjir.

PARTISIPASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- » Kaum muda yang berpartisipasi dalam konsultasi menganggap kegiatan masyarakat sebagai bagian dari interaksi sosial perkotaan dan wadah bersama untuk melibatkan anak muda.
- » Para peserta juga mengeksplorasi berbagai jalur formal untuk melibatkan partisipasi publik, seperti Forum Anak atau Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Mereka juga mengungkapkan keinginan

akan wadah yang lebih inklusif dan inovatif yang dapat menjangkau lebih banyak anak muda dari berbagai latar belakang termasuk mereka yang paling rentan dan sulit dijangkau.

PEMBAHASAN

Dengan melihat kerentanan di tiga kategori (ketimpangan akses dan peluang, sistem yang tidak responsif, dan marginalisasi), penelitian ini membantu menunjukkan bagaimana tantangan dan peluang ini bersinggungan dan memengaruhi kehidupan anak-anak, seperti yang disajikan di bawah ini.

- » Analisis data sekunder menunjukkan bahwa rata-rata kondisi anak-anak di daerah perkotaan lebih baik daripada anak-anak di daerah perdesaan, meskipun situasi di daerah perdesaan perlahan-lahan membaik.
- » Namun demikian, beberapa indikator menunjukkan bahwa kesejahteraan beberapa kelompok anak di perkotaan terancam.
- » Anak-anak di daerah perkotaan mungkin tidak menghadapi banyak hambatan ketika mengakses layanan dasar, karena infrastruktur di perkotaan relatif mapan. Namun, anak-anak di perkotaan dapat menghadapi tantangan dalam menggunakan atau memperoleh manfaat dari layanan tersebut secara optimal.
- » Terlepas dari status tempat tinggal mereka di perkotaan atau perdesaan, anak-anak dan kaum muda mengalami ancaman eksternal terhadap kesejahteraan mereka. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk bencana alam dan risiko lingkungan, atau dalam bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- » Kesempatan, pengalaman, dan kemampuan anak-anak dan kaum muda di daerah perkotaan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari di rumah atau di ruang publik, dapat berkontribusi pada daya diri (*agency*) mereka. Studi ini menemukan banyak cara bagi anak-anak dan kaum muda untuk membentuk dan menyampaikan pandangan mereka dalam mempengaruhi rencana dan keputusan yang berkaitan dengan hidup mereka. Hal ini termasuk keterlibatan mereka dalam kegiatan sekolah dan masyarakat.
- » Studi ini mengamati bagaimana pandemi COVID-19 memperparah kerentanan yang telah ada yang dialami oleh anak-anak dan kaum muda perkotaan dan, sebagai akibatnya, bagaimana hal ini menempatkan populasi tersebut pada risiko yang lebih besar yang membuat mereka kesulitan untuk bertahan hidup dari pandemi COVID-19.
- » Cakupan studi ini tidak termasuk mengukur

dampak kerentanan pada anak-anak dan kaum muda perkotaan. Namun, literatur sekunder dan konsultasi dengan anak-anak dan kaum muda memberikan wawasan tentang bagaimana kurangnya akses ke layanan publik, kemiskinan, isolasi, pengucilan, marginalisasi dan sistem dan layanan yang tidak responsif, dapat berdampak pada kesejahteraan mereka.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan-temuan ini, literatur yang dianalisis, dan pengetahuan peneliti sendiri, laporan ini menawarkan rekomendasi dan refleksi untuk prioritas program. Secara umum, pemerintah kota beserta mitra harus bekerja sama untuk memastikan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, gizi, pencatatan sipil, dukungan sosial dan layanan infrastruktur dasar berkualitas tinggi bagi kelompok paling rentan, tanpa memandang status sosial ekonomi, jenis kelamin, agama, etnis atau identitas sosial lainnya. Pertanyaannya selalu soal bagaimana cara menyusun prioritasnya.

Mengingat pentingnya dokumen identitas hukum dalam memfasilitasi akses ke layanan publik di kota-kota modern, studi ini menyarankan daerah perkotaan harus terus meningkatkan sistem pencatatan sipil dan statistik hayati yang mencatat setiap orang sejak lahir dan menggunakan data tersebut untuk meningkatkan layanan. Diperlukan pula peninjauan kerja sama penelitian dengan ibu kota atau di antara kota-kota dalam wilayah mega-urban untuk lebih memahami situasi penduduk rentan, termasuk anak-anak yang tinggal di luar pengasuhan keluarga. Selanjutnya, pemerintah kota dan mitranya harus menerapkan model perlindungan dan kesejahteraan anak yang komprehensif untuk wilayah perkotaan, yang menyediakan akses terhadap perlindungan sosial untuk penduduk yang paling rentan, dukungan keluarga dan layanan perlindungan anak khusus. Terakhir, pemerintah kota dan mitranya harus mendukung partisipasi yang inklusif dan keterlibatan masyarakat.

Untuk pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya, studi ini juga menyarankan rekomendasi menyeluruh yang mungkin perlu diprioritaskan, seperti untuk meningkatkan kualitas layanan, menyediakan infrastruktur perkotaan dan memungkinkan partisipasi anak muda dan keterlibatan masyarakat yang bermakna. Masih diperlukan banyak dialog dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait, untuk terus mengeksplorasi solusi-solusi lain yang dapat diterapkan.



1

LATAR BELAKANG

- » Penelitian ini memberi gambaran tentang kesulitan dan ketimpangan yang dialami anak-anak dan kaum muda di daerah perkotaan Indonesia, serta di daerah perdesaan, bila memungkinkan.
- » Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menilai karakteristik sosial ekonomi anak-anak di daerah perkotaan, dengan perbandingan dengan daerah perdesaan, bila memungkinkan, (2) untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan, dan (3) untuk memberikan rekomendasi kepada UNICEF dan Pemerintah Indonesia.
- » Studi ini menggunakan tiga metode utama: tinjauan literatur tersistematis, analisis data sekunder dan konsultasi daring dengan anak-anak dan kaum muda.
- » Studi ini juga mengeksplorasi bagaimana kota dapat merespons dan pulih dari pandemi seperti COVID-19.

Urbanisasi meningkat pesat di Indonesia, terlihat dari peningkatan jumlah orang yang tinggal di perkotaan dari 8,6 juta pada tahun 1945 menjadi 151 juta orang (sekitar 56 persen dari penduduk Indonesia) yang tinggal di perkotaan saat ini.

Namun, penting untuk dicatat bahwa lonjakan tersebut bisa jadi lebih merupakan cerminan bagaimana survei nasional Indonesia mendefinisikan perkotaan dan perdesaan berdasarkan kepadatan penduduk suatu daerah dan infrastruktur yang ada. Sebagai salah satu konsekuensi pembangunan, kawasan yang maju menarik lebih banyak orang karena menawarkan peluang hidup yang lebih luas; yang nantinya membuat pembangunan infrastruktur mengikuti permintaan masyarakat. Selain itu, peran wilayah mega-urban akan menjadi semakin penting karena semakin banyak menampung penduduk dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Diperkirakan dua pertiga penduduk Indonesia akan tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2035 (Roberts et al., 2019).

Indonesia telah mencapai kemajuan luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan hak-hak mereka dalam beberapa dekade terakhir. Namun, meskipun demikian, pencapaian ini tidak merata di seluruh wilayah dan kelas sosial ekonomi. Kemandekan yang sedang berlangsung, terutama di bidang-bidang kritis seperti kesejahteraan sosial, perlindungan anak dan kesehatan dan pendidikan, dapat dikaitkan dengan tiga masalah mendasar: ketimpangan akses, sistem yang tidak responsif, dan penyisihan atau eksklusif. Akibatnya, muncul kantong-kantong kelompok rentan,¹ seperti anak-anak tanpa identitas, misalnya, yang menjadi rentan sebagai dampak COVID-19, yang berada di luar

jangkauan layanan Pemerintah, dan layanan yang ada saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan mereka.

Faktor utama mendasar yang berkontribusi terhadap kemajuan yang tidak merata ini adalah kurangnya gambaran besar dan analisis mendalam tentang situasi saat ini yang dihadapi anak-anak dan kaum muda dalam kategori demografi tertentu, termasuk mereka yang tinggal di kota. Begitu pula dengan kekurangan data di semua indikator tentang populasi rentan seperti agama, seksual, dan etnis minoritas dan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kurangnya data yang terpilah dan dapat diakses publik tentang kelompok rentan membuat sulit untuk menargetkan program dan kebijakan terhadap anak-anak yang paling berisiko, dan mengancam ketimpangan yang tersembunyi. Selain itu, tidak adanya studi longitudinal membuat sulit untuk memahami bagaimana masa kanak-kanak yang dilalui dengan serba kekurangan berdampak pada kesejahteraan mereka pada saat remaja.

Studi ini mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menggabungkan penilaian kuantitatif dari indikator utama kesejahteraan anak-anak dan kaum muda di perkotaan dengan analisis kualitatif tentang bagaimana indikator-indikator ini dirasakan dan dialami oleh kaum muda perkotaan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk:

- » menilai karakteristik sosial ekonomi anak-anak di daerah perkotaan dan membandingkan karakteristik ini dengan anak-anak di perdesaan (untuk data yang tersedia)
- » menggali peluang dan tantangan yang dihadapi anak-anak yang tinggal di perkotaan

¹ Rincian lebih lanjut dapat ditemukan dalam makalah kebijakan tentang pencegahan dan penanganan COVID-19: Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak, 'Impacts on Children and Vulnerable Individuals', Pusaka, Jawa Barat, 2020, <<https://puskapa.org/en/publication/1004>>.



© UNICEF/UN0380441/Bea

- » memberikan rekomendasi kebijakan dan program intervensi kepada UNICEF dan Pemerintah Indonesia, dan agar lebih memastikan kesejahteraan anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan

Pertanyaan penelitian dari studi ini adalah:

- » Apa karakteristik demografi, sosial dan ekonomi anak-anak di daerah perkotaan (termasuk kota kecil, menengah, dan besar dan daerah metropolitan), khususnya dalam hal usia, jenis kelamin, latar belakang sosial ekonomi dan bagaimana hal ini dibandingkan dengan anak-anak di perdesaan?
- » Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi oleh anak-anak yang tinggal di perkotaan?
- » Bagaimana tantangan dan peluang ini bervariasi akibat perbedaan kelompok usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial ekonomi?

Studi ini menganalisis data nasional yang ada untuk mendapatkan wawasan tentang situasi anak-anak di perkotaan. Analisis data sekunder membantu kita untuk memahami bagaimana anak-anak, kaum muda, dan keluarga/anggota rumah tangga mereka mengakses layanan publik dan memanfaatkan peluang yang ada di perkotaan. Studi ini menggunakan sekitar 20 indikator berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia 2020–2024. Studi ini juga melakukan tinjauan literatur sistematis untuk mengeksplorasi pengetahuan terkini tentang kesejahteraan anak-anak di perkotaan di Indonesia

dan negara-negara serupa lainnya. Terakhir, penelitian ini menyajikan temuan dari serangkaian konsultasi dengan anak-anak dan anak muda berusia 10 hingga 24 tahun.

Gabungan antara analisis sekunder, tinjauan literatur sistematis, dan konsultasi dengan anak-anak dan anak muda ini menyortir kendala dan peluang yang dihadapi oleh anak-anak dan komunitas mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Wawasan dari laporan ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan solusi yang layak untuk peningkatan akses, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan yang relevan dan inklusivitasnya, untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Di seluruh dokumen, istilah “kota” dan “daerah perkotaan” digunakan secara bergantian ketika membahas temuan konsultasi kami. Namun, dalam analisis sekunder, penelitian ini terutama menganut definisi formal yang digunakan dalam survei dan literatur yang ada.

Pandemi COVID-19 melanda Indonesia di tengah-tengah penelitian ini. Daerah perkotaan menjadi pusat pandemi sehingga meningkatkan risiko yang dihadapi anak-anak perkotaan. Studi ini mengeksplorasi bagaimana kota dapat merespons dan pulih dari pandemi seperti COVID-19. Studi ini meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana akses ke layanan publik (termasuk fasilitas perawatan kesehatan) dan ketiadaan akses, dialami oleh kaum muda sebelum dan selama pandemi. Untuk mengikuti protokol keselamatan dan kesehatan dalam pengumpulan informasi, penelitian ini menerapkan metode dengan media digital ketika melakukan konsultasi dengan anak-anak dan kaum muda.

2

METODOLOGI

Bagian ini menyajikan gambaran singkat tentang bagaimana cara pengumpulan dan analisis data, berbagai metode yang digunakan dan limitasi dalam studi.

- » Literatur yang relevan dari Indonesia, Brasil, India, Bangladesh dan Vietnam dianggap memenuhi syarat untuk tinjauan literatur sistematis.
- » Analisis sekunder menggunakan kumpulan data yang representatif secara nasional, seperti SUSENAS dan SDKI, untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana indikator TPB terkait dapat berbeda antara daerah perkotaan dan perdesaan.
- » Mengingat pandemi, penelitian ini menggunakan wawancara individu secara asinkron melalui media digital dengan 16 anak dan kaum muda yang tinggal di daerah perkotaan.
- » Untuk mendapatkan perspektif kaum muda di bawah 25 tahun, UNICEF meluncurkan jajak pendapat U-Report pada November 2020. Respons dikumpulkan dari 370 responden dengan 47 persen respons berasal dari remaja berusia 15–19 tahun.

2.1. TINJAUAN LITERATUR

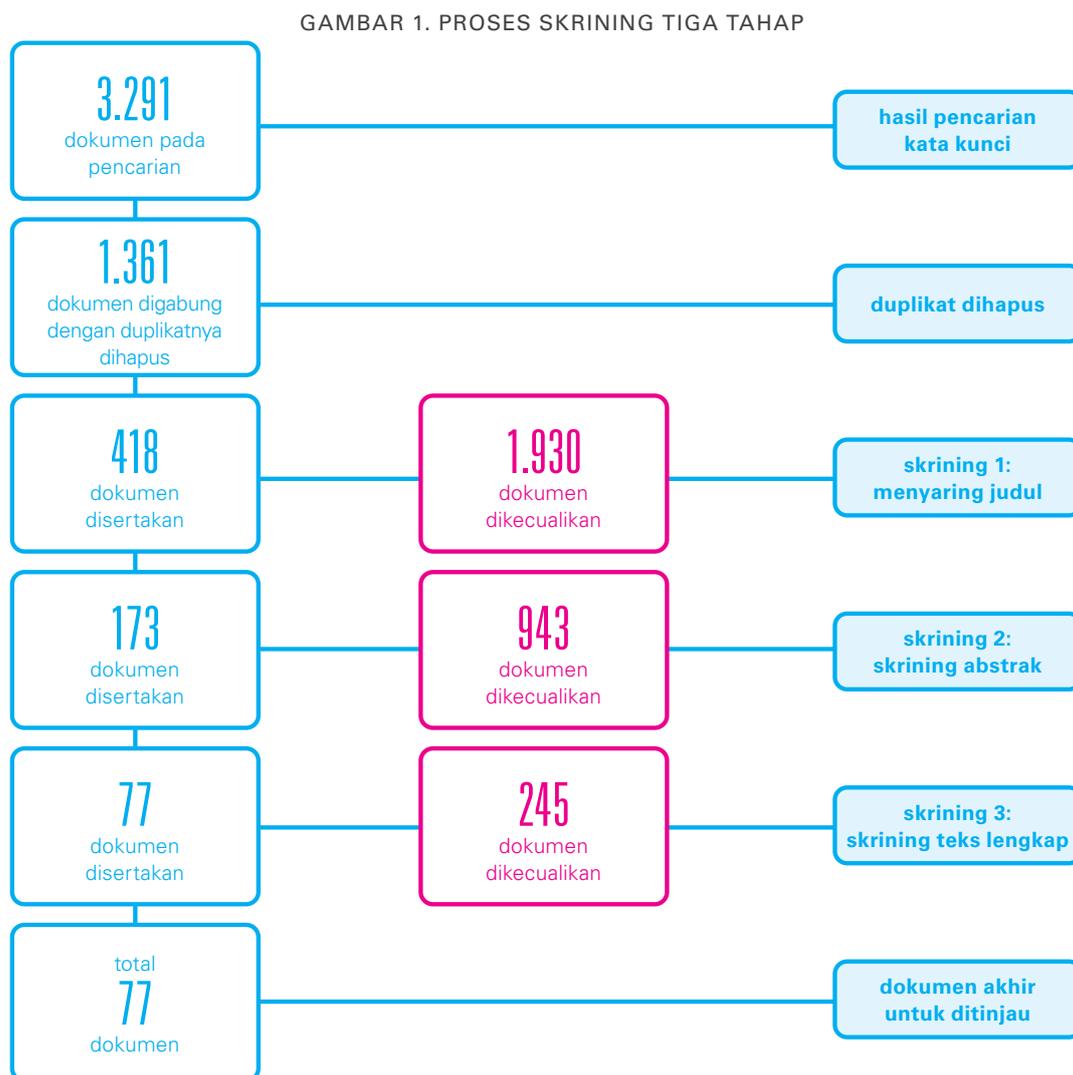
Studi ini menggunakan tinjauan literatur sistematis untuk memastikan status pengetahuan terkini tentang kesejahteraan anak di perkotaan, khususnya di Indonesia. Dalam tinjauan literatur, studi ini memasukkan negara-negara dengan karakteristik yang mirip dengan Indonesia untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan untuk memperdalam pemahaman kita tentang anak-anak yang tinggal di lingkungan perkotaan. Pemilihan negara-negara ini didasarkan pada populasi mereka, rasio ketergantungan kaum muda (sekitar 39 persen), dan klasifikasi pendapatan Bank Dunia (Negara Berpenghasilan Rendah dan Menengah). Setelah membandingkan kriteria utama ini dengan kategori lain, seperti wilayah dan populasi, studi ini memutuskan untuk memasukkan empat negara tambahan ke dalam tinjauan: Brasil, India, Bangladesh, dan Vietnam.

Studi ini menggunakan kata kunci yang luas untuk menangkap populasi yang diminati, seperti “anak-anak”, “remaja”, “kaum muda”, dan “anak muda”, dan untuk memilih studi terkait yang membahas pengaturan perkotaan menggunakan kata-kata seperti “perkotaan”, “kota”, “kumuh” atau “metropolitan”. Kata kunci ini diterapkan dalam pencarian judul menggunakan kriteria inklusi tertentu (lihat Tabel 1).

TABEL 1. TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS

KOMPONEN	TUJUAN TINJAUAN LITERATUR
Populasi atau peserta	Anak-anak atau kaum muda berusia 0–24 tahun; atau pengasuh/orang tua/ anggota rumah tangga yang membahas kehidupan anak-anak atau kaum muda
Desain studi	Penelitian kuantitatif atau kualitatif
Karakteristik tempat tinggal	Perkotaan; penelitian ini mencakup studi tentang situasi perkotaan yang juga melibatkan situasi perdesaan
Cakupan	Indonesia, India, Brasil, Bangladesh, dan Vietnam (termasuk studi tingkat perwakilan nasional dan kabupaten/kota)
Jangka waktu	2010–2020; studi ini menggunakan jangka waktu tertentu dengan memasukkan literatur yang diterbitkan lima tahun sebelum dan setelah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan TPB. Batas waktu tersebut diharapkan dapat menangkap setiap perubahan, jika ada, dalam definisi kesejahteraan selama periode tersebut
Bahasa	Bahasa Inggris
Jenis	Tinjauan sejawat (<i>peer review</i>) dan literatur kelabu (<i>grey literature</i>)
Basis data	Google Scholar Columbia University CLIO Australia National University Supersearch Universitas Indonesia Library

Proses pencarian dan pemilihan masing-masing negara dilakukan dalam tiga tahap utama skrining sebagai berikut:



Saat melakukan skrining judul dan abstrak, penelitian ini mengecualikan penelitian terdahulu yang membahas indikator klinis/medis yang sangat spesifik, seperti defisiensi besi atau mutasi gen, dan penelitian yang dilaksanakan di daerah pinggiran kota. Saat melakukan skrining teks lengkap, penelitian ini juga mengecualikan penelitian yang tidak memberikan informasi yang jelas dan koheren tentang perbedaan antara metodologi dan temuan.

Informasi dari daftar literatur yang sudah final diekstraksi dan dimasukkan ke dalam matriks untuk memberikan gambaran umum studi tentang anak-anak perkotaan di setiap negara. Gambaran umum ini mencakup informasi tentang:

- » tujuan
- » metodologi
- » indikator kesejahteraan
- » peserta (seperti jumlah, usia, jenis kelamin dan etnis)
- » metode pengambilan sampel
- » temuan

Analisis ini juga mempertimbangkan bagaimana studi-studi tersebut mendefinisikan perkotaan atau kota. Berdasarkan matriks ini, studi ini mengembangkan ringkasan tinjauan yang ada saat ini untuk anak-anak di kota-kota di Indonesia dan negara-negara terpilih lainnya. Ringkasan matriks menyajikan penilaian singkat tentang keadaan pengetahuan, termasuk konsensus umum, bukti yang ada saat ini, dan informasi yang masih kurang. Sebanyak 77 dokumen dipilih untuk dilakukan tinjauan akhir (lihat Gambar 1).

2.2. ANALISIS SEKUNDER

Analisis sekunder dari data set yang merepresentasikan kondisi nasional, yang sebagian besarnya diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana indikator TPB yang relevan bisa jadi berbeda antara daerah perkotaan dan perdesaan.

Analisis ini memeriksa 20 indikator, yang sebagian besar diambil dari SUSENAS 2019, dimana data tersebut dikumpulkan dari sekitar 300.000 rumah tangga setiap tahunnya (lihat Tabel 2). Analisis tren tambahan dari 2015–2019 juga dilakukan pada indikator tertentu, tergantung pada ketersediaan data. Selain itu, penelitian ini mengkaji data SDKI 2012 dan 2017.

Analisis ini menyelidiki bagaimana setiap indikator bervariasi dalam setiap definisi kasus perkotaan. Secara umum, analisis deskriptif berisi:

- » perbandingan antara perkotaan versus perdesaan menggunakan definisi yang diberikan oleh BPS
- » perbandingan antara kota-kota kecil, menengah dan besar
- » karakteristik dalam wilayah-wilayah metropolitan utama

Selain itu, analisis antar kota dan provinsi dilakukan bila memungkinkan.

TABEL 2. DAFTAR INDIKATOR YANG DIANALISIS DARI SUSENAS 2019

TUJUAN TPB	INDIKATOR	DEFINISI YANG DIGUNAKAN
Tujuan 1: Menghapus Kemiskinan	Anak-anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan	Anak-anak yang tinggal di rumah tangga dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan nasional tahun 2019
	Anak-anak berusia 0–17 tahun yang masuk ke dalam 40% penduduk dengan pendapatan terendah	Anak yang tinggal dalam rumah tangga pada kuintil pertama dan kedua distribusi pengeluaran per kapita (studi ini menggunakan pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan rumah tangga)
Tujuan 2: Mengakhiri Kelaparan	Berat badan lahir rendah	Anak yang baru lahir memiliki berat badan kurang dari 2,5 kg (pertanyaan ini hanya diajukan kepada perempuan berusia 10–54 tahun yang telah menikah dan hamil. Tidak termasuk perempuan hamil yang belum menikah)
Tujuan 3: Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan	Balita yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap	Balita yang mendapat vaksinasi HepB saat lahir, BCG, tiga dosis DPT, tiga dosis HepB (dosis non-lahir), empat dosis vaksin polio oral, dan satu dosis vaksin campak
	Remaja usia 15–19 tahun yang merokok	Remaja berusia 15–19 tahun yang pernah merokok rokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhir
Tujuan 4: Pendidikan Bermutu	Anak-anak berusia 6 tahun yang tidak pernah mengenyam prasekolah dan SD	Anak-anak berusia 6 tahun (berdasarkan tahun ajaran 2018/2019) yang tidak bersekolah di prasekolah atau SD
	Anak-anak berusia 6 tahun yang saat ini duduk di sekolah dasar tanpa pernah prasekolah	Anak-anak berusia (berdasarkan tahun ajaran 2018/2019) yang sedang duduk di bangku sekolah dasar tetapi tidak pernah prasekolah

TUJUAN TPB	INDIKATOR	DEFINISI YANG DIGUNAKAN
Tujuan 4: Pendidikan Bermutu	Anak-anak berusia 7-12 tahun yang saat ini tidak bersekolah	Anak-anak berusia 7-12 tahun (berdasarkan tahun ajaran 2018/2019) yang saat ini tidak bersekolah
	Anak-anak berusia 13-15 tahun yang saat ini tidak bersekolah	Anak-anak berusia 13-15 tahun (berdasarkan tahun ajaran 2018/2019) yang saat ini tidak bersekolah
	Anak-anak berusia 16-18 tahun yang saat ini tidak bersekolah	Anak-anak berusia 16-18 tahun (berdasarkan tahun ajaran 2018/2019) yang saat ini tidak bersekolah
	Tingkat kelulusan sekolah dasar kelompok anak usia 13–15 tahun	Individu berusia 13–15 tahun (berdasarkan tahun ajaran 2018/2019) yang memiliki ijazah sekolah dasar (1–3 tahun di atas tingkat penyelesaian ISCED)
	Tingkat kelulusan sekolah menengah atas kelompok anak usia 19–21 tahun	Individu berusia 19–21 tahun (berdasarkan tahun ajaran 2018/2019) yang memiliki ijazah sekolah dasar (1–3 tahun di atas tingkat penyelesaian ISCED)
	Anak-anak berusia 15-17 tahun yang tidak memiliki akses Internet	Anak-anak berusia 5-17 tahun yang tidak menggunakan Internet dalam tiga bulan sebelumnya (termasuk <i>Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, & WhatsApp</i>)
Tujuan 5: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Perkawinan anak: perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun	Perempuan berusia 20-24 tahun yang pernikahan pertamanya dilakukan sebelum usia 18 tahun
Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi	Anak-anak berusia 0–17 tahun yang tinggal di rumah tangga yang memiliki akses ke air bersih	Anak-anak berusia 0–17 tahun yang tinggal dalam rumah tangga dengan sumber air minum utama: air ledeng, sumur bor/pompa, air layak, mata air layak, air hujan, dan air dalam kemasan dan air isi ulang bermerek (jika rumah tangga menggunakan air ledeng, sumur bor/pompa, air layak, mata air layak, air hujan untuk kegiatan rumah tangga lainnya seperti mencuci dan mandi)
	Anak-anak berusia 0–17 tahun yang tinggal di rumah tangga yang memiliki akses ke sanitasi layak	Anak-anak berusia 0–17 tahun yang tinggal di rumah tangga yang memiliki toilet pribadi atau bersama, dan yang menggunakan jamban tipe siphon dan tangki septik
Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat	Anak-anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran	Anak-anak berusia 0–17 tahun yang dilaporkan memiliki akta kelahiran (termasuk mereka yang tidak menunjukkannya pada saat survei)

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan indikator kesehatan dan gizi, studi ini juga menggunakan SDKI. Perubahan indikator kesehatan dan gizi yang dipilih di daerah perdesaan dan perkotaan diteliti untuk melengkapi data SUSENAS (lihat Tabel 3). Mengingat SDKI diselenggarakan lima tahun sekali, data SDKI terbaru yang tersedia adalah SDKI 2017 dan 2012.

TABEL 3. DAFTAR INDIKATOR YANG DIANALISIS DARI SDKI

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	DEFINISI YANG DIGUNAKAN
Tingkat kematian	Angka kematian bayi	Peluang kematian antara kelahiran dan ulang tahun pertama (studi ini menggunakan definisi yang ditentukan oleh SDKI dan mengadopsi protokol estimasi mereka)
	Angka kematian balita	Peluang kematian antara kelahiran dan sebelum mencapai ulang tahun kelima (studi ini menggunakan definisi yang ditentukan oleh SDKI dan mengadopsi protokol estimasi mereka)
	Angka kematian anak balita	Peluang kematian antara ulang tahun pertama dan ulang tahun kelima (studi ini menggunakan definisi yang ditentukan oleh SDKI dan mengadopsi protokol estimasi mereka)
Berat Badan Lahir Rendah	Bayi baru lahir yang memiliki berat kurang dari 2,5 kg	Persentase kelahiran dengan berat badan lahir yang dilaporkan kurang dari 2,5 kilogram tanpa mempertimbangkan usia kehamilan
Imunisasi	Balita yang menerima imunisasi dasar	Balita yang menerima vaksinasi dasar: BCG, tiga dosis DPT, tiga dosis vaksin polio oral, dan satu dosis campak (pertanyaan imunisasi lengkap tidak ditanyakan dalam kuesioner 2012)
Asupan vitamin A	Anak-anak berusia 6-59 bulan yang mendapat vitamin A	Anak-anak berusia 6-59 bulan yang diberikan suplementasi vitamin A
Obat cacing	Sekelompok balita diberikan obat cacing	Anak-anak berusia 6-59 bulan yang diberikan obat cacing
Diare	Sekelompok balita yang mengalami diare	Balita yang mengalami diare dalam 2 minggu sebelum survei
Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)	Sekelompok balita yang mengalami gejala ISPA	Balita yang mengalami gejala ISPA dalam 2 minggu sebelum survei
ASI Eksklusif	Anak yang termuda (bungsu) di bawah enam bulan yang diberi ASI eksklusif	Persentase anak yang termuda (bungsu) di bawah 6 bulan yang tinggal bersama ibunya yang mendapatkan ASI eksklusif di bawah usia 6 bulan (penelitian ini menggunakan definisi yang ditentukan oleh SDKI dan mengadopsi program estimasi mereka)
Kontrasepsi	Perempuan berusia 15-24 tahun yang menggunakan metode kontrasepsi modern apa pun	Persentase remaja perempuan yang sudah menikah (usia 15-24 tahun) yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi modern apa pun
Praktik Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PPMBA)	Anak-anak berusia 6-23 bulan yang tidak mendapat ASI atau mendapatkan produk susu lainnya	Menyusui, maupun tidak menyusui dan menerima dua kali atau lebih susu formula bayi komersial; susu hewani segar, susu kaleng, dan susu bubuk; dan yogurt
	Anak-anak berusia 6-23 bulan yang memiliki frekuensi minimal mendapat makanan	Untuk anak yang diberi ASI, frekuensi minimal mendapat makanan adalah mendapatkan makanan padat atau semi padat minimal dua kali sehari untuk bayi usia 6-8 bulan dan minimal tiga kali sehari untuk anak usia 9-23 bulan. Untuk anak yang tidak diberi ASI usia 6-23 bulan, frekuensi minimal mendapat makanan adalah menerima makanan padat atau semi padat atau makanan susu setidaknya empat kali sehari

	<p>Anak-anak berusia 6–23 bulan yang memiliki minimal diet makanan yang diterima</p>	<p>Anak-anak yang disusui usia 6-23 bulan dianggap memiliki minimal diet makanan yang diterima jika mereka memiliki keragaman makanan minimal untuk anak-anak yang disusui dan frekuensi minimal mendapat makanan untuk anak-anak yang disusui</p> <p>Anak-anak yang tidak disusui usia 6–23 bulan dianggap memiliki minimal diet makanan yang diterima jika mereka menerima susu atau produk susu lainnya setidaknya dua kali sehari, memiliki frekuensi minimal mendapat makanan untuk anak-anak yang tidak disusui, dan menerima makanan padat atau semi padat dari setidaknya empat kelompok makanan, tidak termasuk kelompok makanan susu atau produk susu</p>
--	--	---

Seperti terlihat di atas, dan dengan mempertimbangkan ketersediaan data, studi ini berfokus pada anak-anak dan remaja, dan menyajikan data untuk mereka yang berusia di bawah 18 atau 15-24 tahun, tergantung pada indikatornya. Penting untuk dicatat bahwa beberapa variabel mungkin hanya ada pada tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mewakili karakteristik individu anak-anak atau remaja.

Terakhir, semua analisis menggunakan bobot sampling untuk memastikan bahwa analisis-analisis ini merepresentasikan populasi yang lebih besar. Kesalahan sampling (*sampling error*) sudah disesuaikan dengan desain pengambilan sampel yang rumit yang digunakan oleh SUSENAS dan SDKI.

2.3. KONSULTASI DARING

Rencana kerja lapangan penelitian ini harus diubah drastis karena adanya pandemi COVID-19. Akibatnya, penelitian ini menggunakan media digital untuk wawancara individu secara asinkron.

Wawancara asinkron adalah metode penelitian kualitatif di mana informasi dipertukarkan berulang kali antara peneliti dan peserta dalam periode tertentu, biasanya melalui pesan teks, email atau surat-menyurat.

Penelitian ini menggunakan WhatsApp sebagai platform wawancara untuk proses pengumpulan data. Penggunaan metode asinkron berarti bahwa pewawancara dan responden tidak mengadakan percakapan secara *real time*, sehingga peserta diberi waktu dan fleksibilitas untuk menjawab pertanyaan wawancara.

Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan untuk mendukung temuan dari tinjauan literatur dan analisis data sekunder, dan, khususnya, untuk menjawab dua pertanyaan berikut:

1. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi oleh anak-anak dan remaja yang tinggal di perkotaan baik sebelum maupun selama pandemi COVID-19?
2. Bagaimana pengaruh status usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial ekonomi terhadap pengalaman hidup peserta di perkotaan?

Pemilihan peserta penelitian melalui nominasi oleh LSM/OMS yang bermitra dengan PUSKAPA atau UNICEF Indonesia. Pemilihan responden didasarkan pada lima kriteria utama:

- » usia (antara 13 dan 24 tahun)
- » keseimbangan proporsi gender (delapan perempuan dan delapan laki-laki)
- » tempat tinggal (mewakili wilayah Jabodetabek dan Indonesia bagian timur)
- » tidak ikut serta dalam penelitian serupa antara April–Juni 2020
- » berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah

Kelompok umur dari peserta konsultasi dalam penelitian ini adalah usia 13–24 tahun. Dari segi latar belakang sosial ekonomi, pemilihan dilakukan melalui pengetahuan yang dimiliki mitra lokal tentang calon peserta berdasarkan (tetapi tidak terbatas pada) pertimbangan berikut:

- » pendapatan keluarga
- » karakteristik lingkungan
- » profesi orang tua/pengasuh
- » tingkat pendidikan/sekolah

Lihat Lampiran 1 untuk daftar nama samaran peserta dan berbagai karakteristiknya.

Empat peneliti PUSKAPA masing-masing dipasangkan dengan masing-masing 16 peserta berusia 13-24 tahun dari empat kota, yaitu:

- » Area Jabodetabek
- » Makassar (Sulawesi Selatan)
- » Surakarta (Jawa Tengah)
- » Kupang (Nusa Tenggara Timur)

Konsultasi berlangsung selama 5-7 hari per peserta. Setiap hari, responden diberikan tiga pertanyaan utama sesuai dengan tema penelitian yang dipilih, yang dapat mereka jawab pada waktu yang mereka tentukan sendiri dan melalui berbagai medium komunikasi, seperti teks, file audio atau video. Berbagai macam topik wawancara dipilih berdasarkan temuan dari analisis sekunder dan tinjauan literatur, khususnya tema-tema utama yang muncul seperti kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, dan partisipasi masyarakat. Untuk setiap tema, pertanyaan difokuskan pada persepsi dan aspirasi anak-anak dan kaum muda terkait akses dan kualitas layanan yang mereka terima. Pertanyaan juga disesuaikan sedemikian rupa untuk menangkap peran gender dan proses eksklusi/pengucilan dan bagaimana kedua hal ini terkait dengan akses anak-anak dan kaum muda ke layanan publik sebelum dan selama pandemi COVID-19. Pertanyaan disampaikan baik dalam bentuk tertulis (teks) atau rekaman suara (file audio). Di akhir konsultasi, dilakukan serangkaian wawancara mendalam dengan 8 dari 16 informan. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang sulit dikumpulkan, atau untuk informasi yang masih belum lengkap setelah dilakukan konsultasi, wawancara dilakukan dengan lima fasilitator lokal di keempat kota.

Untuk mendapatkan perspektif kaum muda di bawah usia 25 tahun, UNICEF meluncurkan jajak pendapat U-Report pada November 2020. Respons dikumpulkan dari 370 responden dengan 47 persen respons berasal dari remaja berusia 15-19 tahun. Survei online ini secara khusus menanyakan 11 pertanyaan tertutup terkait pengalaman sehari-hari mereka selama pandemi COVID-19. Pertanyaan yang tercakup meliputi:

- » persepsi anak muda tentang praktik pengasuhan di rumah
- » dukungan dari teman
- » risiko dan pengalaman penggusuran dan pengungsian
- » perlindungan dari risiko penularan virus corona
- » partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
- » pembelajaran daring
- » perlindungan dari kekerasan

Temuan dari jajak pendapat U-Report memperkuat temuan dari konsultasi dengan kaum muda pada

studi ini. Hasil U-Report tematik lainnya dari survei sebelumnya juga digunakan untuk membantu mengisi kesenjangan seputar topik yang tidak tercakup melalui konsultasi pada studi ini.

Protokol perlindungan anak diterapkan selama proses penelitian berdasarkan pedoman Etika Melibatkan Anak dalam Penelitian (Graham et al., 2013). Protokol tersebut mensyaratkan:

- » mendapatkan persetujuan resmi dari peserta, pengasuh (untuk peserta di bawah 18 tahun) dan fasilitator lokal
- » memberikan kompensasi yang memadai kepada peserta sesuai dengan kondisi setempat (layanan Internet, transfer uang, dan pulsa telepon sebagai bentuk penghargaan)
- » menyesuaikan pertanyaan berdasarkan konteks lokal dan menyediakan bantuan penerjemahan untuk bahasa lokal
- » menyiapkan mekanisme rujukan perlindungan anak
- » menyimpan dan menganalisis data untuk memastikan keamanan dan anonimitas peserta

Studi ini mendapat persetujuan dari Dewan Komisi Etik Universitas Atma Jaya.²

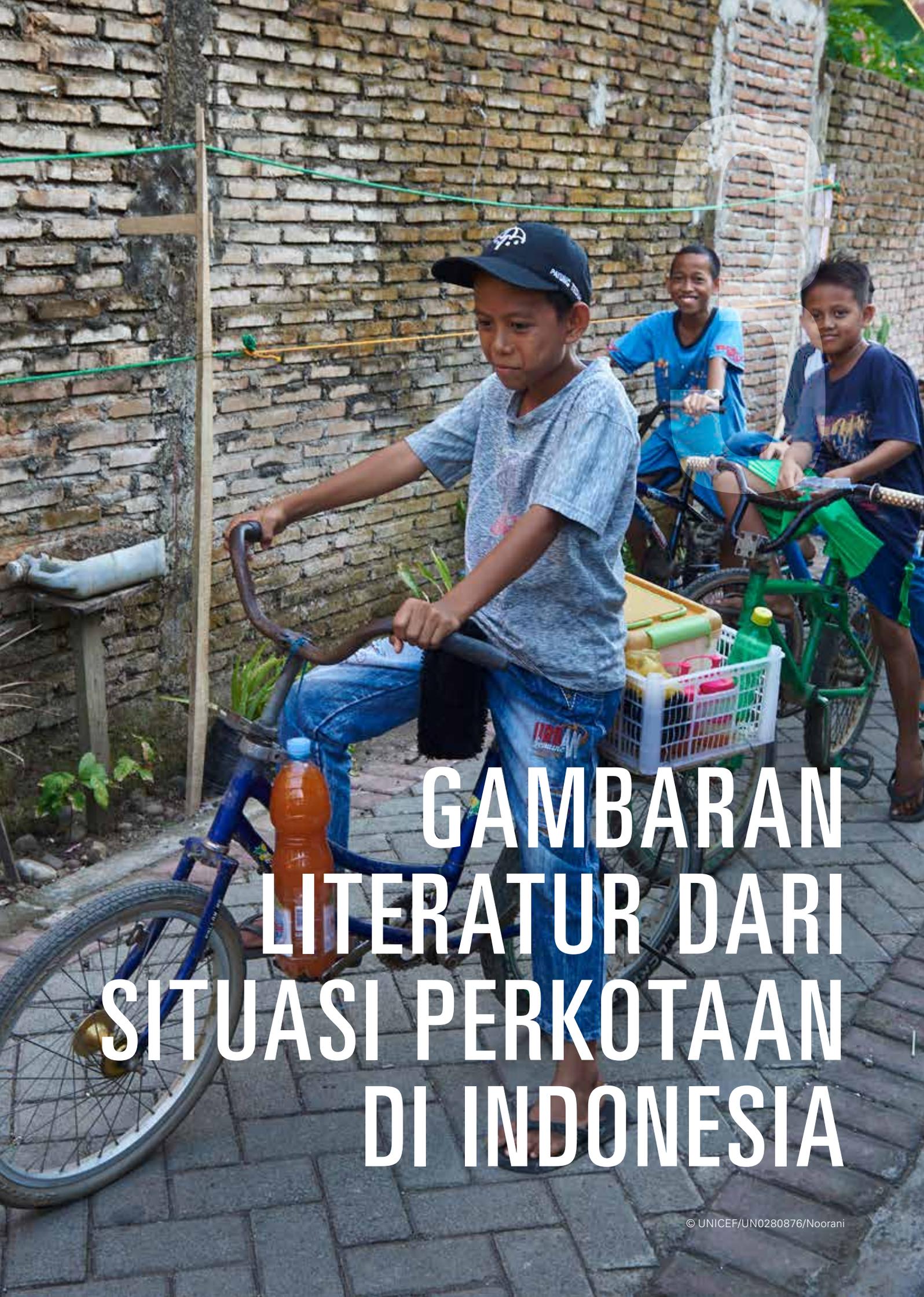
Studi ini mengadopsi Metode Perbandingan Konstan dalam menganalisis data kualitatif.

Tim peneliti menerapkan pengkodean aksial (*axial coding*) pada catatan lapangan dan transkrip dan mengelompokkan kode-kode yang muncul dari data. Kode-kode ini dikelompokkan berdasarkan kategori yang telah ditentukan sebelumnya mengikuti variabel TPB. Tiga peninjau melakukan pemeriksaan langsung terhadap kode dan penetapan kategori untuk menjamin kualitas penelitian.

Konsultasi dengan kaum muda dimasukkan dalam studi ini untuk menyoroti pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari di daerah perkotaan.

Lebih lanjut, karena banyak anak yang “tidak terlihat” mungkin tidak ditangkap dalam data set yang merepresentasikan situasi nasional; dengan menggunakan purposive sampling, kita dapat sengaja memasukkan anak-anak yang berpotensi terpinggirkan ini ke dalam penelitian. Temuan kualitatif dapat memberikan nuansa yang menegaskan, melengkapi atau bahkan bertentangan dengan temuan kuantitatif. Dalam menyajikan hasil konsultasi, laporan ini menggunakan nama samaran, meskipun tetap menyebutkan kota asal peserta untuk memberikan konteks sesuai kondisi daerah mereka.

² Disetujui oleh Ketua Komisi Etik Penelitian Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, dengan surat persetujuan nomor 1223A/III/LPPM. PM.10.05/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020.



GAMBARAN LITERATUR DARI SITUASI PERKOTAAN DI INDONESIA

Bagian ini menyajikan gambaran singkat tentang situasi perkotaan di Indonesia. Bagian ini berfokus pada berbagai isu perkotaan yang biasa dibahas dalam literatur terkait, seperti urbanisasi, pengurusan permukiman dan deprivasi anak-anak dan kelompok rentan. Tinjauan singkat literatur tentang pandemi COVID-19 dalam konteks perkotaan juga akan disajikan pada bagian ini. Informasi dalam bagian ini sebagian besar berasal dari tinjauan literatur.

- » Meskipun pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia sebagian disebabkan oleh urbanisasi, umumnya pertumbuhan ini adalah implikasi dari perubahan dalam cara mendefinisikan status perkotaan.
- » Tinjauan literatur menunjukkan bahwa peluang ekonomi yang lebih baik di daerah perkotaan berkontribusi pada produktivitas dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi.
- » Kemiskinan perkotaan umumnya terkait dengan kawasan kumuh dan penghuninya. Tingginya biaya hidup di pusat kota juga memaksa kaum miskin kota untuk tinggal di permukiman kumuh.
- » Bukti terbaru menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 menimbulkan beban terbesar di daerah perkotaan.

KOTAK 1. PENGERTIAN DAN KLASIFIKASI WILAYAH PERKOTAAN DI INDONESIA

Definisi “perkotaan” berbeda-beda di setiap negara, yang membuat perbandingan indikator kesejahteraan anak-anak antar-kota menjadi lebih menantang. Di Indonesia, ada dua definisi utama “perkotaan” tergantung pada status dan fungsi suatu tempat. Definisi pertama terkait dengan status administratif, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah (baik kota atau kabupaten) diberikan status resmi sebagai kota atau kotamadya. Definisi kedua terkait fungsi, yang berarti bahwa unit administrasi terkecil diberi klasifikasi perkotaan atau perdesaan tergantung pada karakteristik tertentu (Jones dan Mulyana, 2015). Institusi lain juga menggunakan berbagai kategorisasi “perkotaan” dan “perdesaan”. Bank Dunia, misalnya, dalam laporan terbarunya (Roberts et al., 2019) secara konsisten mengacu pada empat jenis daerah perkotaan dan perdesaan:

- » wilayah metro multidistrik (terdiri dari inti metro dan pinggiran metro)
- » wilayah metro distrik tunggal
- » wilayah perkotaan non-metro
- » wilayah perdesaan non-metro

Laporan World Vision (World Vision International, 2016), sebaliknya, menggunakan karakteristik multidimensional untuk menentukan apa yang dianggap sebagai perkotaan atau perdesaan:

- » fisik
- » ekonomi
- » manusia/demografis
- » politik
- » lingkungan

Studi ini menggunakan definisi BPS tentang perbedaan antara perkotaan atau perdesaan, yang didefinisikan di tingkat desa. BPS menggunakan sistem peringkat komposit yang mempertimbangkan kepadatan penduduk, persentase rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, dan keberadaan fasilitas perkotaan seperti sekolah, pasar, toko, bioskop, dan hotel, serta akses ke telepon dan listrik (lihat Lampiran 2).

Studi ini juga mengkaji situasi anak-anak yang tinggal di rumah tangga kumuh untuk lebih memahami bagaimana kesejahteraan mereka mungkin berbeda dari anak-anak lain yang

tinggal di daerah perkotaan dan perdesaan. BPS mendefinisikan rumah tangga kumuh sebagai sekelompok orang yang tinggal di dalam bangunan yang sama yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak dan dengan luas tinggal yang tidak mencukupi yang ditentukan oleh ukuran luas lantai dan bahan bangunan (lihat Tabel A).

TABEL A. SISTEM PENILAIAN KLASIFIKASI RUMAH TANGGA KUMUH

INDIKATOR	KRITERIA	SKOR	BOBOT
Air tidak layak minum	<ol style="list-style-type: none"> Sumber utama air minum adalah air kemasan bermerek, air isi ulang, sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, atau perairan terbuka seperti sungai/danau/kolam. Jarak ke tempat pembuangan sampah terdekat kurang dari 10 meter. 	1	15%
Sanitasi tidak layak	<ol style="list-style-type: none"> Tidak memiliki toilet pribadi atau bersama Jenis kloset adalah jamban cemplung tanpa dudukan jamban/slab atau saluran pembuangan Tidak menggunakan tanki septik untuk pembuangan akhir kotoran 	1	15%
Luas lantai per kapita kurang dari 7,2 m ²		1	35%
Perumahan tidak layak = 1 jika setidaknya dua kriteria terpenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Bahan atap rumah terbuat dari jerami/ijuk/daun atau lainnya Bahan dinding rumah terbuat dari bambu atau lainnya Bahan lantai dari tanah atau lainnya 	1	35%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, 2015.

Dengan menggunakan data SUSENAS dan SDKI, studi ini juga menyelidiki subset indikator di kota-kota kecil, menengah, besar, dan metropolitan (*small, medium, large, and metropolitan* atau SMLM) di Indonesia untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang situasi anak-anak di berbagai wilayah perkotaan. Klasifikasi kota SMLM yang digunakan dalam studi ini didasarkan pada jumlah penduduk di tingkat distrik. Kota kecil adalah distrik dengan jumlah penduduk mencapai 100.000 dan kota sedang adalah distrik dengan jumlah penduduk antara 100.000 – 500.000. Sedangkan kota besar adalah distrik dengan jumlah penduduk antara 500.000 – 1.000.000, dan kota metropolitan adalah distrik dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta. (lihat Tabel B).

TABEL B. KLASIFIKASI KOTA KECIL, MENENGAH, BESAR DAN METROPOLITAN

NO.	KLASIFIKASI	POPULASI	JUMLAH DISTRIK
1	Kota metropolitan	Lebih dari 1 juta	77
2	Kota besar	Antara 500.000 dan 1.000.000	70
3	Kota sedang	Antara 100.000 dan 500.000	295
4	Kota kecil	Hingga 100.000	72

Sumber: Diadaptasi dari UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan SUSENAS 2019 untuk memperkirakan jumlah distrik.

Terakhir, studi ini mengkaji serangkaian indikator yang relevan dengan 12 wilayah mega-urban teratas di Indonesia yang dipilih berdasarkan Kawasan Strategis Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019–2024. Penting untuk dicatat bahwa definisi Wilayah mega-urban yang diberikan oleh RPJMN hanya mencakup beberapa subdistrik di daerah tersebut. Sementara itu, data set utama yang digunakan dalam penelitian ini hanya dapat dipilah di tingkat distrik. Setiap interpretasi dan kesimpulan dari hasil yang berkaitan dengan wilayah mega-urban harus mempertimbangkan perbedaan definisi ini.

3.1. KARAKTERISTIK PERKOTAAN INDONESIA

Urbanisasi meningkat pesat di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan dari 8,6 juta orang yang tinggal di perkotaan pada tahun 1945 menjadi 151 juta orang, atau sekitar 56 persen dari penduduk Indonesia, yang tinggal di perkotaan saat ini. Namun, laju urbanisasi saat ini dapat digambarkan sebagai hal yang lumrah dibandingkan dengan laju atau urbanisasi di negara lain, yaitu dengan laju lebih dari tiga persen per tahun (Roberts et al., 2019). Telah diproyeksikan bahwa dua pertiga dari penduduk Indonesia akan tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2035. Sebagai contoh, 90 persen dari penduduk Jawa diperkirakan menjadi penduduk perkotaan yang akan terkonsentrasi di daerah mega-urban Jakarta dan Bandung. Namun, di daerah lain, seperti NTT, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara, kurang dari 40 persen penduduk akan tinggal di daerah perkotaan. (Jones, 2014).

Meskipun pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia sebagian disebabkan oleh urbanisasi, umumnya pertumbuhan ini adalah implikasi dari perubahan dalam cara mendefinisikan status perkotaan (Roberts et al. 2019). Khususnya antara tahun 2000 dan 2010, “kurang dari 20 persen pertumbuhan penduduk perkotaan disebabkan oleh migrasi internal, sedangkan lebih dari 80 persen berasal dari reklasifikasi permukiman perdesaan menjadi daerah perkotaan dan pertumbuhan alami di daerah perkotaan” (Roberts et al., 2019, hal.51). Peranan wilayah mega-urban akan menjadi semakin penting karena menampung jumlah penduduk yang semakin banyak dan mendorong pertumbuhan ekonomi; sebaliknya, populasi perdesaan diproyeksikan terus menurun. Sementara pemerintah mungkin tertarik untuk memprioritaskan penduduk perkotaan, mereka juga harus berhati-hati agar penduduk desa tidak semakin dirugikan (Jones, 2014).

Literatur ini menunjukkan bahwa peluang ekonomi yang lebih baik di daerah perkotaan berkontribusi pada produktivitas dan pendapatan

per kapita yang lebih tinggi. Namun, pekerja di daerah perkotaan banyak ditemukan di sektor informal karena sektor ini tidak memerlukan keterampilan khusus atau teknis. Hal ini menimbulkan berbagai potensi risiko dan peluang dan, dengan meningkatnya para pencari kerja yang baru tinggal di perkotaan, disebutkan bahwa “risiko potensi konflik sosial dan meningkatnya tindak kriminal di antara kelompok-kelompok sosial yang tidak puas” mungkin muncul (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Indonesia, 2016).

3.2. ISU-ISU PERKOTAAN INDONESIA YANG DIBAHAS DALAM LITERATUR

3.2.1 MIGRASI DESA-KOTA

Meskipun kontribusinya lebih sedikit terhadap urbanisasi daripada sebelumnya, seperti yang diindikasikan dalam berbagai literatur, migrasi penduduk perdesaan ke kota adalah salah satu faktor yang terus-menerus mendorong peningkatan populasi perkotaan (Roberts et al., 2019). Kaum muda adalah bagian penting dari pergerakan migrasi ini karena mereka terdorong untuk mencari peluang ekonomi dan pekerjaan di daerah perkotaan (Reality Check Approach+, Pulse Lab Jakarta dan World Bank Indonesia, 2018). Dalam studi mereka tentang orang dewasa muda di Jabodetabek, Ariane Utomo et al. melihat bahwa banyak migran muda yang dijelaskan dalam penelitian mereka pindah ke kota setelah putus sekolah dan beberapa tahun menganggur. Ini menunjukkan bahwa migrasi lebih merupakan sebagai bentuk akibat dari putus sekolah daripada sebagai penyebabnya (Utomo et al., 2014).

Anak-anak dan kaum muda juga bermigrasi ke kota untuk mencari pendidikan yang lebih baik dan lebih tinggi, seperti kuliah, baik bersama keluarga maupun sendiri (Clendenning, 2018; Reality Check Approach+ et al., 2018). Di India, Agarwal et al. juga menemukan bahwa beberapa keluarga pindah ke kota untuk melepaskan diri dari norma gender

yang kaku di daerah perdesaan yang menghalangi anak perempuan mereka untuk mengejar pendidikan tinggi yang membuat mereka menunda pernikahan (Agarwal dan Urban Health Resource Centre, 2016). Faktor-faktor lainnya meliputi kurangnya hiburan dan kemerosotan ekonomi musiman di daerah perdesaan. Beberapa dari migrasi ini bersifat musiman dan sirkular, tetapi banyak migran akhirnya memutuskan untuk pindah permanen, sehingga perlahan-lahan membawa lebih banyak anggota keluarga mereka ke kota (Reality Check Approach+ et al., 2018).

Banyak orang yang pindah dari desa ke kota dengan mengandalkan jaringan teman, tetangga, dan keluarga mereka, termasuk anak muda lain yang sudah bermigrasi (Clendenning, 2018; Utomo et al., 2014).

Orang cenderung mengikuti pola dan rute yang sama dengan kerabat dan tetangga mereka, yang berarti mereka tinggal di wilayah yang sama dan mencari pekerjaan atau mengenyam pendidikan melalui bantuan jaringan mereka. Jaringan semacam ini sering menjadi dasar topangan awal hidup mereka dengan menyediakan penginapan sementara dan membantu para migran menjelajahi kota. Jaringan ini beserta modal sosial yang diberikannya juga penting untuk “menciptakan suasana kampung halaman” di tempat migrasi mereka (Reality Check Approach+ et al. 2018). Perlu dicatat di sini bahwa istilah kampung, atau kampung kota, digunakan dalam laporan ini untuk merujuk pada kampung-kampung perkotaan, yang memiliki karakteristik yang sama sekali berbeda dengan kampung-kampung di perdesaan. Namun, dalam kasus India, Agarwal et al. menemukan bahwa, ketika anak perempuan pindah ke kota bersama keluarga mereka, dibandingkan pindah sendirian dan tinggal bersama keluarga besar, mereka cenderung memperoleh pendidikan yang lebih baik dan mobilitas mereka tidak terbatas (Agarwal dan Urban Health Resource Centre, 2016).

Akomodasi adalah salah satu pertimbangan utama bagi pekerja migran karena permukiman di kota-kota tidak terjangkau dan mahal. Orang cenderung lebih memilih pekerjaan yang menawarkan semacam jaminan tempat tinggal seperti asrama yang dekat dengan tempat kerja mereka (Reality Check Approach+ et al., 2018). Orang juga cenderung mengabaikan sanitasi, air dan infrastruktur dasar lainnya daripada akses terhadap akomodasi murah, yang umumnya terletak di daerah kumuh tetapi lebih dekat dengan tempat kerja mereka. Namun pilihan strategis ini seringkali menghadirkan ancaman penggusuran, terutama di Jakarta dan Medan, sekalipun jika komunitas migran ini sudah menetap, tercatat, dan tinggal di kota selama beberapa generasi (Reality Check Approach+ et al., 2018).

Banyak migran berusaha untuk menjaga hubungan dekat dengan kampung halaman mereka, terutama dengan mengirim uang ke keluarga di kampung halaman dan rutin mengunjungi kampung halaman mereka. Fenomena ini terutama terjadi pada migran yang pindah sementara ke kota dengan alasan ekonomi.

Sebuah studi tentang migrasi ke daerah perkotaan pesisir di Jawa menemukan bahwa penduduk perdesaan sering terpaksa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan di luar sektor pertanian setiap kali terjadi penurunan produksi ekonomi perdesaan musiman (Handayani dan Kumalasari, 2015; Reality Check Approach+ et al., 2018). Semakin banyak pula penduduk perdesaan yang bermigrasi ke kota untuk menambah pendapatan keluarga karena masyarakat perdesaan tidak dapat lagi mengandalkan produksi pertanian untuk menopang diri mereka sendiri dalam transisi ke ekonomi yang mengandalkan uang (Reality Check Approach+ et al., 2018).

Keberadaan para migran sering menghadirkan tantangan sosial-budaya bagi tata kelola perkotaan.

Sebuah studi oleh World Vision di enam kota di enam negara, termasuk kota Surabaya di Indonesia, menemukan bahwa banyak migran masih menganggap tempat tinggal mereka di Surabaya hanyalah tempat tinggal sementara, bahkan setelah tinggal di sebuah kota selama 10 tahun atau lebih (World Vision International, 2016). Bagi para migran ini, hubungan dengan kampung halaman mereka di perdesaan tetap menjadi ciri penting dari identitas diri mereka. Akibatnya, mereka lebih cenderung mengirim uang ke kampung halaman mereka dan lebih kecil kemungkinannya untuk berkontribusi ke lingkungan perkotaan mereka atau untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat setempat. Selain itu, para migran yang pergerakannya didominasi oleh motif ekonomi selalu mencari peluang baru di daerah lain (World Vision International, 2016).

Dalam laporan UN-Habitat 2016, Pemerintah Indonesia mengakui pentingnya mengelola migrasi desa-kota daripada mencegah mobilitas penduduk.

Laporan tersebut menekankan pentingnya mempersiapkan kota-kota tujuan untuk menerima dan menampung migran baru, terutama dalam hal penyediaan permukiman, transportasi dan layanan dasar dan utilitas serta menciptakan peluang ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan bersama. Selain itu, Pemerintah juga mengantisipasi beberapa tantangan yang akan dihadapi kota karena proyeksi perubahan demografi ke arah kelompok usia yang lebih produktif (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Indonesia, 2016).

3.2.2 HUNIAN

Pemerintah telah lama menyadari masalah kelangkaan rumah dan konstruksi yang tidak memadai di kota-kota. Tujuan untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi semua adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Indonesia 2005–2025. Tujuan ini juga telah menjadi bagian dari Rencana Jangka Menengah atau RPJMN berikutnya. Hunian yang layak secara resmi didefinisikan sebagai hunian yang mengandung empat aspek berikut:

- » integritas fisik
- » ukuran lantai per kapita
- » akses air
- » akses sanitasi

Dalam RPJMN saat ini (2020–2024), Pemerintah mengidentifikasi tiga isu umum terkait hunian:

- » kurangnya kapasitas keuangan di antara penduduk
- » kurangnya hunian yang layak
- » tidak adanya kerangka peraturan, atau insentif ekonomi, untuk memastikan tidak hanya ketersediaan permukiman tetapi juga konstruksi yang memadai

Pemerintah juga mengakui bahwa kebijakan perumahan di banyak daerah masih terfokus pada perbaikan kondisi rumah (bedah rumah), sementara lebih sedikit upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan permintaan perumahan secara struktural.

Menurut RPJMN saat ini (2020–2024), Pemerintah berupaya untuk menyediakan hunian layak bagi 70 persen rumah tangga (baseline 54,1 persen). Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah berencana melakukan intervensi di tiga bidang: sisi permintaan, sisi penawaran, serta kebijakan dan tata kelola pendukung (Kementerian PPN/ BAPPENAS, 2020). Dari sisi permintaan, bantuan keuangan akan diberikan untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah untuk mengakses perumahan atau membangun sendiri rumahnya. Dalam hal kelangkaan pasokan, Pemerintah berencana untuk mengkonsolidasikan dan memanfaatkan lahan yang ada untuk membangun permukiman baru yang didanai oleh anggaran Pemerintah (baik pusat/APBN maupun daerah/APBD) atau dengan memberikan insentif kepada sektor swasta untuk membangun perumahan yang terjangkau. Terakhir, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, Pemerintah berjanji untuk meningkatkan penerapan standar perumahan, memangkas proses administrasi pertanahan, dan

menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta untuk membangun lebih banyak rumah.

Secara historis, upaya Pemerintah untuk menyediakan perumahan umum tidak berhasil menutup kesenjangan antara permintaan dan penawaran perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa pihak telah mengkritik program perumahan Pemerintah karena memungkinkan pengembang swasta untuk mendapatkan kepemilikan tanah bernilai tinggi di pusat kota. Kepemilikan tersebut seringkali diperoleh dengan menggusur penduduk berpenghasilan rendah (yang kadang-kadang tinggal di lahan kosong milik Pemerintah) yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program perumahan ini (Kusno, 2015; Silver, 2008). Selain itu, persyaratan untuk mendapatkan hipotek tidak mungkin dipenuhi bagi penduduk yang bekerja di sektor informal karena kurangnya pendapatan bulanan yang stabil. Akibatnya, warga sering memilih rumah yang dibangun sendiri yang memiliki tingkat kualitas bangunan yang beragam di atas tanah terlantar, yang menyebabkan munculnya perkampungan (Kusno, 2015).

Namun, pada saat yang sama, Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk memperbaiki kawasan kumuh kota pada tahun 2020 sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) nasional melalui program perbaikan kawasan kumuh dan melalui penyediaan hunian bagi penduduk miskin perkotaan. Dalam laporan Pemerintah kepada UN-Habitat, pemerintah menunjukkan pergeseran cara memandang/menilai kampung sebagai pemukiman informal. Alih-alih memperdebatkan penghapusan kampung, laporan Pemerintah mengakui perkampungan sebagai bagian penting dari kota yang memungkinkan produktivitas ekonomi dan yang menyediakan ruang bagi banyak rumah yang dibangun sendiri yang dihuni oleh kaum miskin kota (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Indonesia, 2016). Fokus Pemerintah juga telah bergeser ke arah penyediaan layanan dan utilitas dasar (seperti listrik, air, pengelolaan limbah dan transportasi) dan memperbaiki kondisi rumah di kampung (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Indonesia, 2016).

3.2.3 PENGUSURAN PERMUKIMAN

Pengusuran bukanlah fenomena baru di kota-kota di seluruh Indonesia, dan terjadi terutama melalui pembukaan lahan di daerah kumuh atau kampung kota. Dalam kajiannya tentang tata kota di Jakarta, Christopher Silver mencatat bahwa

penggusuran kampung telah terjadi setidaknya sejak tahun 1911 di bawah pemerintahan kolonial Belanda (Silver, 2008). Penggusuran ini seringkali diikuti dengan perjuangan hukum yang panjang (LBH Jakarta, 2017). Kasus penggusuran yang diwarnai kekerasan yang didukung atau dilakukan negara masih umum terjadi terlepas dari keterlibatan sistem peradilan dalam kasus tersebut. LBH Jakarta mencatat, pada tahun 2015, 57 persen penggusuran warga di permukiman informal di Jakarta melibatkan militer dan 59 persen melibatkan kepolisian (LBH Jakarta 2017, hlm.20). Tren ini terus berlanjut.

Penggusuran seringkali dibenarkan karena berbagai alasan, seperti pembukaan lahan untuk pembangunan infrastruktur termasuk gerbang tol, jalan raya, dan kawasan bisnis. Penggusuran juga sering dibenarkan sebagai tindakan untuk mengendalikn perumahan ilegal dan permukiman informal (LBH Jakarta, 2016a).

Selain itu, fakta bahwa permukiman ini dibangun di kawasan yang tidak ditujukan untuk daerah tempat tinggal sesuai dengan sistem zonasi Pemerintah (Koesoemawiria 2017; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Indonesia 2016, hlm. 33–40; Winayanti dan Lang, 2004) sering menjadi alasan penertiban. Pada tahun 2016, LBH Jakarta mencatat bahwa lebih dari 70 persen penggusuran (baik perumahan maupun warung informal) tergolong penertiban (LBH Jakarta, 2017, hlm. 32). Karena banyak tempat tinggal ilegal yang dibangun di pinggir sungai atau dekat dengan laut, daerah ini juga rentan terhadap banjir. Pada tahun 2015, di Jakarta, misalnya, setidaknya 35 kasus penggusuran dibenarkan dengan alasan normalisasi sungai dan upaya mitigasi banjir (LBH Jakarta 2016a, hlm. 19). Antara 2015–2018, LBH Jakarta mendokumentasikan total 495 kasus penggusuran di permukiman informal atau kampung, yang menelantarkan 15.319 rumah tangga (LBH Jakarta 2016a, 2017).

Konsekuensi dari pengusiran paksa dan pemindahan didokumentasikan dengan baik.

Karena penggusuran daerah kumuh terbaru di Jakarta tanpa disertai kompensasi, penggusuran telah memiskinkan banyak keluarga melalui hilangnya rumah dan aset (Ichwatus Sholihah dan Shaojun, 2018).³ Keluarga yang dulunya hidup bebas tanpa mengeluarkan biaya sewa kini terpaksa menjadi penyewa baik di Perumahan Pemerintah (bagi yang direlokasi) maupun di unit rumah sewa lainnya (Savirani dan Wilson, 2017) sehingga semakin menambah beban keuangan mereka. Perlu dicatat bahwa hanya sebagian kecil dari keluarga yang tergusur yang direlokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa. Pada tahun 2015, menurut dokumentasi

LBH Jakarta, 72 dari 113 kasus penggusuran tidak diberikan kompensasi atau relokasi apapun dan, hanya 32 kasus yang ditawarkan relokasi ke perumahan rakyat (LBH Jakarta 2016a). Meski begitu, pada sembilan dari 32 kasus tersebut, relokasi hanya ditawarkan kepada beberapa keluarga yang terkena dampak (LBH Jakarta, 2016a). Survei Sholihah dan Shaojun terhadap 550 rumah tangga yang digusur dan direlokasi di 17 rusunawa di Jakarta menunjukkan bahwa hanya 29 persen rumah tangga yang digusur yang mengatakan bahwa mereka mampu membayar sewa rutin tepat waktu (Ichwatus Sholihah dan Shaojun 2018). Pada tahun 2015, LBH Jakarta melakukan survei terhadap warga tergusur di beberapa rusunawa yang mendokumentasikan beberapa dampak awal penggusuran dan perpindahan tempat tinggal pada anak-anak. Meskipun tempat tinggal yang baru dianggap cocok untuk anak-anak, dengan mempertimbangkan ruang publik yang ramah anak, responden menyatakan bahwa anak-anak mereka sekarang harus menempuh perjalanan panjang ke sekolah mereka karena penggusuran terjadi selama tahun ajaran. Selain itu, tidak semua rusunawa memiliki layanan bus sekolah dan jadwal bus sekolah seringkali tidak sesuai dengan jam buka dan tutup sekolah (LBH Jakarta, 2016b). Namun perlu dicatat bahwa penelitian ini tidak melibatkan anak-anak sebagai peserta tetapi mencari informasi tentang anak-anak dari responden dewasa yang mewakili rumah tangga.

Di permukiman informal, rumah juga berfungsi sebagai ruang produksi, terutama untuk industri rumahan dan kios kecil, sehingga penggusuran sering diikuti dengan penurunan pendapatan (Ichwatus Sholihah dan Shaojun 2018; Tilley et al., 2019). Hilangnya pendapatan juga dijelaskan oleh hilangnya patron/pelanggan ketika industri rumahan ini harus pindah dari lokasi asalnya. Perempuan, seperti yang diamati oleh Tilley et al. (2019), jauh lebih terdampak oleh penggusuran atau perubahan mata pencaharian semacam ini, karena mereka tidak lagi dapat mencari nafkah dan mengurus rumah secara bersamaan. Di tempat lain telah didokumentasikan bahwa beberapa anak putus sekolah dan mengambil pekerjaan yang dibayar setelah mereka diusir untuk mengkompensasi hilangnya pendapatan keluarga mereka (Hackenbroch et al., 2008; Patel et al., 2015).

³ untuk kasus-kasus di India lihat Patel et al., 2015 dan Dupont dan Vacquire, 2013



3.3. ANAK-ANAK DAN POPULASI RENTAN DI PUSAT KOTA DI INDONESIA

Publikasi terbaru UNICEF tentang anak-anak di daerah perkotaan (2018) membahas gagasan “paradoks perkotaan,” yang mengacu pada kecenderungan untuk mengabaikan ketimpangan internal perkotaan karena ekspektasi tentang keuntungan tinggal di daerah perkotaan. Namun laporan ini juga menggarisbawahi bahwa, meskipun terdapat ketimpangan di daerah perkotaan, masih sedikit bukti yang menunjukkan kesenjangan selalu lebih besar di daerah perkotaan dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Sebenarnya jika kita menghitung dari segi kekayaan, banyak keuntungan dari tinggal di perkotaan menjadi hilang, bahkan jika dibandingkan dengan anak-anak di daerah perdesaan, kehidupan anak-anak termiskin di daerah kota jauh lebih buruk. Salah satu alasannya adalah karena definisi resmi kemiskinan seringkali tidak memperhitungkan biaya kebutuhan di luar makanan. Di lingkungan perkotaan, misalnya, biaya hidup juga dapat mencakup transportasi, sewa tempat tinggal, air dan sanitasi (UNICEF, 2012). Beberapa situasi di perkotaan juga meningkatkan kerentanan seseorang

seperti risiko penggusuran, guncangan ekonomi, kekerasan dan kejahatan dan bencana. Studi UNICEF menemukan bahwa di beberapa negara, anak-anak miskin di perkotaan tertinggal dalam beberapa indikator dibandingkan dengan anak-anak termiskin di perdesaan. Indikator tersebut antara lain imunisasi (DPT3), pencatatan kelahiran, dan lulus sekolah dasar (UNICEF, 2018a).

Kemiskinan di perkotaan berkaitan dengan kemampuan rumah tangga untuk menghadapi guncangan jangka pendek seperti tumpang-tindih tiba-tiba dan kesulitan ekonomi untuk jangka panjang seperti naiknya biaya hidup (World Vision International 2016). Anak-anak dan keluarga yang mengalami kemiskinan secara moneter lebih berpeluang memiliki pendapatan yang tidak mencukupi atau tidak memiliki “jaring pengaman”. Hal ini secara langsung akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar yang membuat mereka semakin bergantung pada sektor ekonomi informal meskipun menghadapi kondisi kerja yang buruk, dan memaksa mereka untuk tinggal di perumahan dan permukiman yang tidak layak. Selain kemiskinan, masyarakat miskin perkotaan juga mengalami kerentanan sosial, seperti kurangnya keterwakilan mereka dalam dinamika kekuasaan di kota.

Tingginya biaya hidup di pusat kota juga memaksa masyarakat miskin kota untuk tinggal di permukiman kumuh dan informal seperti di bantaran sungai, rawa atau di pinggir rel kereta. Estimasi ukuran populasi permukiman kumuh bervariasi menurut definisi yang berbeda-beda. Pada tahun 2019, total 29 juta orang Indonesia, atau 22 persen dari populasi perkotaan, tinggal di daerah kumuh (Roberts et al., 2019). Permukiman ini biasanya bermunculan tanpa adanya perencanaan kota dan dengan berbagai tingkat kepemilikan tanah dan properti (Kusno, 2015; Simone, 2010). Seperti disebutkan sebelumnya, sebagian besar penduduk di daerah perkampungan bekerja di sektor informal, yang biasanya terletak relatif dekat dengan pusat ekonomi utama di kota untuk mengurangi biaya dan waktu perjalanan (Simone, 2014, hlm.201). Sebagian besar penduduk yang tinggal di perkampungan adalah warga pendatang dari desa ke kota dengan penghasilan yang rendah dan datang musiman. Namun, perlu dicatat bahwa di banyak kota di Indonesia, permukiman informal semacam ini tidak hanya menampung penduduk berpenghasilan rendah. Mengingat mahalnya biaya untuk mendapatkan sertifikat tanah, banyak rumah tangga berpenghasilan menengah juga memilih untuk tidak mendapatkan sertifikat untuk rumah dan tanah mereka (Monkkonen 2013; Reerink & van Gelder 2010).

Sifat informal dari perkampungan kumuh atau kampung membuat penduduknya seringkali tidak mendapatkan layanan dan fasilitas Pemerintah. Mereka mungkin juga tidak memiliki dokumen hukum pribadi, terutama karena Pemerintah tidak mengakui tempat tinggal mereka secara administratif. Tanpa pengakuan hukum, penghuni kawasan kumuh yang miskin menjadi terabaikan dari sisi hukum dan harus menanggung “kerentanan sosial”, yang berarti bahwa suara dan partisipasi mereka kurang dihargai dan kurang dicari (World Vision International 2016). Bank Dunia memperkirakan bahwa sekitar 40 persen penghuni kawasan kumuh tidak memiliki akses yang “mudah” atau “sangat mudah” ke layanan dokter, yang mana dua kali lipat dari jumlah penghuni yang tidak tinggal di permukiman kumuh dan menghadapi masalah yang sama. Demikian pula, 6% penghuni kawasan kumuh tidak memiliki akses ke prasekolah, dibandingkan dengan sekitar 2% penghuni yang tidak tinggal di permukiman kumuh (Roberts et al., 2019).

3.4. ANAK-ANAK DI DAERAH PERKOTAAN DAN POPULASI RENTAN DALAM LITERATUR GLOBAL

Temuan dari tinjauan literatur sistematis menunjukkan bahwa sebagian besar studi tentang anak-anak dalam konteks perkotaan membahas topik terkait kesehatan (dan gizi).

Aspek kesehatan yang diteliti bervariasi, dan cenderung terkait dengan kelompok usia. Studi pada anak usia 0–5 tahun cenderung mengeksplorasi topik seperti status gizi (berat badan kurang, kelebihan berat badan, dan stunting), praktik pemberian makan dan indikator kesehatan ibu dan anak seperti persalinan dan imunisasi. Studi terhadap anak-anak dan remaja kebanyakan terkait dengan status gizi dan kebiasaan makan, kesehatan mental, kesehatan reproduksi (termasuk kebersihan menstruasi dan HIV), dan perilaku yang menimbulkan risiko kesehatan seperti alkohol dan penyalahgunaan obat. Topik lain yang termasuk dalam kategori kesehatan termasuk morbiditas, kesehatan mulut dan kebiasaan sedentari. Studi-studi yang berfokus pada kesehatan cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif dan menyelidiki prevalensi berbagai indikator kesehatan dan determinannya. Sejumlah penelitian di India, Bangladesh dan Vietnam juga membahas perilaku mencari layanan kesehatan. Beberapa penelitian di berbagai negara membahas hubungan antara berbagai indikator kesehatan dan karakteristik perkotaan yang berbeda seperti kebersihan, sanitasi, polusi udara, lalu lintas, konsumsi makanan cepat saji, dan paparan digital.

Beberapa studi di Brasil, dan satu studi di India, membahas keterpaparan anak-anak terhadap kekerasan dan, dalam kasus Brasil, kriminalisasi korban kekerasan juga dibahas. Pekerja anak dibahas dalam studi perkotaan di Brasil dan Bangladesh, sedangkan peran migrasi disebutkan dalam studi perkotaan di India dan Vietnam. India juga memiliki beberapa studi yang meneliti ketimpangan gender. Sebagian kecil literatur membahas anak jalanan (Brasil), paparan digital dan globalisasi (India), praktik pengasuhan anak (Indonesia), dan pemberdayaan pemuda (Vietnam).

Literatur di Indonesia dan Bangladesh kebanyakan membahas anak-anak usia 0–5 tahun. Namun, di India, Brasil, dan Vietnam, remaja muncul sebagai kelompok yang paling banyak dipelajari. Beberapa studi lintas negara juga menyelidiki anak-anak sekolah dasar dan remaja. Studi kualitatif yang mengumpulkan data langsung dari anak-anak yang lebih besar kebanyakan memperlakukan

anak-anak dan remaja sebagai peserta pasif. Meskipun suara dan pengalaman mereka didokumentasikan, studi ini dilakukan dengan minimnya upaya untuk menyediakan wadah bagi partisipasi yang bermakna⁴ yang mencakup peluang bagi mereka untuk bersama-sama mengarahkan dan mempengaruhi penelitian.

Meskipun beberapa studi dari tinjauan literatur dilakukan dalam konteks perkotaan, dan memperkirakan berbagai hasil standar hidup dan kesejahteraan dalam situasi ini, studi-studi ini tidak fokus pada bagaimana atau mengapa hasil ini mungkin berbeda untuk situasi khusus di perkotaan (dibandingkan dengan situasi di perdesaan). Beberapa studi membandingkan hasil perdesaan dan perkotaan, tetapi hanya sedikit yang membahas tentang aspek apa saja yang membedakan lingkungan perkotaan dari lingkungan perdesaan. Namun, dua studi di India secara khusus tertarik untuk menyelidiki peran “keuntungan perkotaan” (*“urban advantage”*) dengan membedakan antara populasi perkotaan dan populasi miskin perkotaan. Hanya satu dari studi ini yang juga membandingkan kelompok miskin perkotaan dan perkotaan dengan anak-anak perdesaan.

Studi-studi yang dilakukan di kawasan kumuh umumnya memilih daerah-daerah ini sebagai proksi kemiskinan atau, dalam beberapa kasus, indikator kesehatan yang buruk. Studi-studi ini dengan demikian menyamakan “kumuh” dan “kemiskinan” tanpa menyelidiki nuansa mereka atau bagaimana nuansa ini membentuk kondisi kehidupan penduduk. Namun, satu studi di Bangladesh memberikan analisis yang lebih mendalam tentang daerah kumuh dengan mengkategorikan daerah kumuh berdasarkan status permukiman dan kepemilikan hunian, dan dengan membahas peran peraturan dan dinamika kekuasaan yang berbeda antar kategori. Kategori status dan kepemilikan adalah:

- » swasta (didirikan oleh perusahaan untuk karyawan bergaji rendah)
- » diakui oleh Pemerintah
- » didirikan secara informal di atas tanah Pemerintah

Satu studi di India membahas masalah dengan definisi permukiman kumuh Pemerintah India, dan analisis lain mencoba membedakan antara berbagai permukiman kumuh dan permukiman informal dengan melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi fasilitas sanitasi di setiap permukiman.

3.5. DAERAH PERKOTAAN DAN PANDEMI COVID-19

Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 paling parah melanda daerah perkotaan. Di Indonesia, kota Jakarta, Surabaya, dan Makassar secara konsisten disebut sebagai lima kota terparah di Indonesia untuk periode tertentu di tahun 2020. (Satgas Penanganan COVID-19, 2020). Bank Dunia memperkirakan bahwa 22 persen penduduk perkotaan di Indonesia tinggal di daerah kumuh, terhitung sekitar 29 juta orang (Roberts et al., 2019). Di Jakarta, sekitar sepertiga rumah tangga tinggal di ruang yang penuh sesak dengan akses air bersih dan sanitasi yang buruk, di hunian yang tidak layak, atau di ruang publik terbuka (Roberts et al., 2019). Sekitar 28 persen populasi memiliki ukuran lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi. Terlepas dari upaya awal Pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, keluarga yang tinggal di permukiman padat tidak dapat mempraktikkan jaga jarak, kebersihan yang baik, dan melakukan isolasi mandiri selama COVID-19.

Sebuah laporan global baru-baru ini dari Bank Dunia (2020) memperkenalkan istilah “orang miskin baru” yang mengacu pada populasi miskin yang muncul sebagai akibat dari pandemi, yang mungkin berbeda dari populasi yang sudah miskin sebelumnya (Bank Dunia, 2020). Orang miskin baru diperkirakan lebih cenderung tinggal di daerah perkotaan, tinggal di tempat tinggal dengan akses infrastruktur yang lebih baik, dan memiliki aset dasar yang sedikit lebih banyak daripada mereka yang miskin pada tahun 2019 dan 2020 (Bank Dunia, 2020). Orang miskin baru, berusia 15 tahun ke atas, juga cenderung bekerja di sektor non-pertanian, merupakan karyawan berupah, dan memiliki pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan orang miskin kronis (Bank Dunia, 2020). Bukti dari Indonesia menunjukkan peningkatan kemiskinan paling signifikan diperkirakan terjadi di pusat-pusat perkotaan di mana tingkat kemiskinan pra-pandemi paling rendah (Bank Dunia, 2020). Menurut laporan yang sama, proporsi penduduk miskin baru yang lebih tinggi adalah mereka yang bekerja di sektor jasa (grosir dan eceran, transportasi dan pergudangan, perhotelan dan restoran). Bantuan pangan Pemerintah mencakup kurang dari setengah dari mereka yang bekerja di sektor jasa (dan sedikit

⁴ Penelitian ini menggunakan definisi UNICEF tentang partisipasi remaja (UNICEF, 2020) terutama berfokus pada mempengaruhi keputusan dan hal-hal yang mempengaruhi remaja. Menurut definisi ini, partisipasi yang bermakna bergantung pada upaya strategis dan praktis dengan menjamin adanya ruang (penyediaan peluang yang aman dan inklusif), suara (penyediaan informasi yang tepat untuk menginformasikan pandangan mereka dan penggunaan media pilihan mereka untuk mengkomunikasikan pandangan mereka), audiens (pandangan mereka harus didengar dengan hormat dan serius oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan otoritas), dan pengaruh (pandangan mereka harus mendapat pertimbangan dan umpan balik yang tepat).

kurang dari 60 persen dari wiraswasta), dan populasi ini juga tidak mendapat skema bantuan tunai yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak pandemi.

Pandemi COVID-19 telah memaksa sistem pendidikan untuk beradaptasi dengan cepat dan beralih ke format pembelajaran daring, yang sangat bergantung pada akses Internet dan ketersediaan perangkat digital.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa banyak siswa menghadapi kesulitan belajar di rumah karena beberapa daerah tidak memiliki jaringan Internet (di luar jangkauan jaringan telepon seluler) dan tidak semua orang mampu membayar biaya langganan kuota Internet (seluler) (Yarrow et al., 2020). Meskipun sebagian besar rumah tangga baik di perkotaan maupun perdesaan sudah memiliki telepon seluler/smartphone, hanya sebagian kecil yang memiliki akses ke komputer dan jaringan internet. Studi ini menunjukkan bahwa rumah tangga perkotaan memiliki akses komputer.

yang agak lebih baik (15 persen) dibandingkan dengan rumah tangga perdesaan (9 persen), tetapi kedua jenis rumah tangga ini memiliki peluang akses Internet yang sama (5 persen). Analisis dari segi status sosial ekonomi menunjukkan kesenjangan yang lebih signifikan, yaitu pada rumah tangga di kuintil terbawah (baik di perkotaan maupun perdesaan) lebih kecil kemungkinannya memiliki komputer (2 persen) dan jaringan Internet (1 persen) dibandingkan rumah tangga di kuintil tertinggi (masing-masing 29 persen dan 16 persen). Penutupan sekolah juga meningkatkan risiko putus sekolah di kalangan siswa sekolah menengah dan perguruan tinggi, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah. Murid-murid ini lebih cenderung memasuki pasar tenaga kerja daripada kembali ke sekolah setelah situasinya membaik, terutama karena kebutuhan untuk membantu perekonomian keluarga (Bank Dunia, 2020).



KOTAK 2.

COVID-19: POTENSI IMPLIKASI BAGI ANAK DAN KAUM MUDA DI DELAPAN PROVINSI UTAMA

Di bulan keenam pandemi COVID-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo menginstruksikan gugus tugas untuk fokus pada pengendalian penyebaran virus di delapan provinsi utama.

Dengan menggunakan data terbaru ini, dari SUSENAS 2019, kami menyoroti potensi implikasi pandemi terhadap anak-anak dan kaum muda di delapan provinsi prioritas COVID ini.⁵ Kategori kelompok merujuk pada identifikasi anak dan populasi rentan di tengah COVID-19 (Indonesia, The Ministry of National Development Planning et al., 2020).

Anak-anak, orang tua dan orang dengan disabilitas di rumah tangga miskin dan sangat miskin jauh lebih terdampak oleh langkah-langkah pengendalian pandemi.

Kemampuan untuk mendapatkan penghasilan yang terhalang akibat pembatasan pergerakan akibat COVID telah memengaruhi kualitas dan jaminan hunian kaum muda. Orang-orang yang kurang beruntung dari segi ekonomi mungkin lebih cenderung tinggal dalam kondisi hunian yang buruk dan mengalami penggusuran, karena risiko infeksi COVID-19 dan konsekuensi dari ketidakstabilan keuangan. Berbagai kerentanan dalam populasi yang berbeda dapat semakin membebani perjuangan mereka dalam menangani pandemi COVID-19.

Bukti telah menunjukkan bahwa anak-anak, orang tua, dan orang dengan disabilitas adalah tiga kelompok paling rentan yang terkena dampak pandemi COVID-19 (Kelly dan Lloyd-Sherlock, 2020; Pineda dan Corburn, 2020; Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2020). Saat ini, sebagian besar bantuan Pemerintah, sebagai bagian dari respons COVID-19, bergantung pada status sosial ekonomi rumah tangga, terutama ditentukan oleh konsumsi atau kekayaan secara keseluruhan. Beberapa program juga mempertimbangkan status pekerjaan kepala rumah tangga atau kondisi kesehatan anggota rumah tangga. Mengingat kerentanan rumah tangga bergantung pada beban pengasuhan

mereka, kami mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian bantuan perawatan sosial bagi keluarga miskin dan berpenghasilan sangat rendah yang merawat anak-anak, orang tua, dan orang dengan disabilitas.

Untuk mengatasinya, program-program bantuan ini harus memprioritaskan anak balita di rumah tangga yang dikepalai oleh orang tua tunggal, perempuan pencari nafkah, lansia dan anak di bawah umur. SUSENAS 2019 memperkirakan terdapat 19.663.302 rumah tangga miskin dan sangat miskin yang memiliki anggota keluarga anak di seluruh Indonesia, dimana 64 persennya tinggal di delapan provinsi prioritas COVID-19. Selain itu, SUSENAS 2019 juga mengestimasi ada 8.479.634 rumah tangga miskin dan sangat miskin dengan anggota keluarga lansia dan 2.551.829 rumah tangga miskin dan sangat miskin dengan orang dengan disabilitas di seluruh Indonesia, dimana 72 persen dan 65 persennya tinggal di delapan provinsi prioritas COVID-19.

Anak-anak yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan dasar, identitas hukum atau jaminan kesehatan berpeluang tidak mampu bertahan hidup dan berkembang.

Ketiadaan NIK dan akta kelahiran dapat menjadi indikator kerentanan pada anak, lansia, dan orang dengan disabilitas, terutama terkait dengan kekurangan dokumen hukum mereka yang membuatnya tidak dapat mengakses program bantuan pemerintah (Duff et al., 2016; Jackson et al., 2014; Kusumaningrum et al., 2016; Sumner dan Kusumaningrum, 2014).

Bagi kelompok rentan, mengeluarkan uang untuk kesehatan dapat menjadi beban tersendiri, dan dapat menghalangi mereka untuk berobat. Dengan demikian, anak-anak, orang tua, dan orang dengan disabilitas yang tidak memiliki jaminan kesehatan dapat lebih rentan terhadap penyakit, terutama selama masa pandemi. Meski Pemerintah menjamin bahwa semua biaya pengobatan terkait COVID-19 ditanggung pemerintah, Indonesia masih menghadapi beberapa penyakit menular lainnya, seperti

⁵ Implikasi rinci COVID-19 terhadap kesejahteraan anak selengkapnya dapat dilihat di <https://puskapa.org/en/publication/1004>

demam berdarah, TBC, diare, malaria, dan difteri. SUSENAS 2019 memperkirakan, di delapan provinsi utama, terdapat 2.082.187 rumah tangga yang memiliki anak di bawah 12 bulan yang tidak memiliki akta kelahiran, yang merepresentasikan 53 persen rumah tangga Indonesia.

Kapasitas sistem perawatan kesehatan yang memang sudah terbatas sebelum pandemi menjadi semakin parah saat ini karena penyedia layanan tidak dapat tatap muka dengan pasien. Layanan dan kunjungan berbasis masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Posyandu setempat, juga tidak tersedia. Akibatnya, identifikasi dini kebutuhan kesehatan ibu dan anak sulit dilakukan dan seringkali tidak mungkin dilakukan. Lebih lanjut, vaksinasi dasar untuk mencegah berbagai penyakit lain mungkin tertunda. Estimasi cakupan imunisasi dasar terbaru secara nasional di antara anak-anak berusia 36–59 bulan sudah rendah, yaitu 21 persen, sebelum pandemi (Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019). Estimasi cakupan berdasarkan wilayah pada tahun 2017 adalah:

- » DKI Jakarta – 32 persen
- » Jawa Barat – 18 persen
- » Jawa Timur – 31 persen
- » Jawa Tengah – 35 persen
- » Sulawesi Selatan – 19 persen
- » Kalimantan Selatan 24 persen
- » Papua – 4 persen
- » Sumatera Utara – 9 persen

Kekurangan ini juga tercermin dalam program-program lain yang ditujukan untuk mempromosikan gizi yang cukup, seperti menyusui dan diet seimbang, serta layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif.

Anak-anak berisiko tidak bersekolah dan menempuh pendidikan.

Cakupan internet yang rendah di Indonesia menimbulkan tantangan lain untuk sekolah daring selama pandemi. Oleh karena itu, penanganan COVID-19 juga harus mempertimbangkan anak usia sekolah yang berpotensi belajar dari rumah tetapi tinggal di rumah tangga yang tidak memiliki akses internet. Secara nasional, terdapat 43.593.658 rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah yang tidak memiliki akses Internet (baik karena penerimaan yang buruk atau karena mereka tidak mampu membeli kuota internet)

dan 60 persen dari rumah tangga tersebut berada di delapan provinsi. Anak-anak di rumah tangga ini mungkin menghadapi akses Internet yang tidak dapat diandalkan, mahal, dan fasilitas atau perangkat yang tidak memadai untuk belajar daring. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung pembelajaran dari rumah melalui, namun tidak terbatas pada, subsidi kuota internet, yang menurut beberapa anak dalam jajak pendapat baru-baru ini bermanfaat (U-Report, Indonesia 2020a). Perluasan subsidi semacam itu dapat membantu memastikan lebih sedikit anak yang mengalami kesenjangan dalam pendidikan mereka akibat COVID.

Anak-anak, lansia dan orang dengan disabilitas yang tinggal di rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air bersih, listrik, dan sanitasi yang layak, tidak mendapatkan lingkungan yang aman.

Banyak orang Indonesia tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Orang-orang ini, terutama anak-anak, orang tua dan orang dengan cacat, mungkin kurang dapat mematuhi protokol kesehatan yang mengharuskan mereka untuk sering-sering mencuci tangan. Selain itu, mereka berisiko tertular penyakit lain selama pandemi COVID-19.

Kurangnya akses listrik sebagai infrastruktur yang diperlukan dapat mengindikasikan kurangnya akses ke fasilitas kesehatan setempat yang berfungsi dan memadai (Chen et al., 2019). SUSENAS 2019 menemukan bahwa akses terhadap sanitasi yang layak masih jauh lebih besar di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan. Kurangnya akses terhadap air minum layak menghalangi penerapan protokol kesehatan di berbagai rumah tangga, seperti mencuci tangan. Ditambah dengan kurangnya akses terhadap listrik, air, dan sanitasi yang layak dapat mengancam kemampuan mereka untuk mengikuti saran kesehatan selama pandemi ini.

Secara nasional, secara nasional terdapat 14.010.688 rumah tangga yang memiliki anak di bawah 18 tahun yang tidak memiliki sanitasi yang layak, dan 58 persen di antaranya berada di delapan provinsi. Dalam kategori rumah tangga yang sama, data menunjukkan bahwa 544.041

rumah tangga tidak tersambung jaringan listrik, dengan 41 persen di antaranya berada di delapan provinsi. Sekitar 30.041.216 rumah tangga tidak memiliki akses terhadap air bersih, dengan 62 persen di antaranya berada di delapan provinsi.

Anak-anak, apapun gendernya, berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, dan praktik-praktik berbahaya.

Di Indonesia, ada beberapa kelompok berisiko yang sulit ditemukan dan dilacak. Mereka termasuk, replace with tidak terbatas pada:

- » anak-anak di panti asuhan dan mereka yang menerima pendampingan dari pekerja sosial
- » anak-anak dalam tahanan dan lembaga pemasyarakatan
- » anak-anak di asrama dan pondok pesantren
- » anak jalanan
- » anak-anak dan orang dewasa tunawisma
- » anak-anak dan orang dewasa yang tinggal dalam rumah tangga bersama dengan pelaku kekerasan atau penyintas kekerasan dalam rumah tangga

Anak-anak yang tidak dalam pengasuhan rumah tangga menghadapi pilihan yang terbatas dalam mengakses informasi dan sumber daya untuk menekan risiko penularan virus dan risiko kesehatan fisik dan mental lainnya yang terkait dengan pandemi (Goldman et al., 2020). Data Kementerian Sosial pada April 2020 menunjukkan total 102.482 (51 persen perempuan) anak tinggal di 3.575 panti asuhan di seluruh Indonesia. Selain itu, 53 persen dari mereka tinggal di delapan provinsi (dengan total 1.970 fasilitas atau sekitar 55 persen fasilitas di seluruh Indonesia).

Pemerintah perlu mengidentifikasi dan melacak semua kelompok di atas, untuk memastikan bahwa semua penduduk terpinggirkan yang diidentifikasi agar memiliki akses yang setara untuk mendapatkan layanan publik.



ANAK-ANAK DI PERKOTAAN DI INDONESIA: SIAPA MEREKA?

Bagian ini menyajikan temuan tentang karakteristik utama dari segi demografi, sosial, dan ekonomi anak-anak di daerah perkotaan (termasuk kota kecil, sedang dan besar dan kawasan metropolitan). Temuan ini memberikan wawasan spesifik tentang indikator kemiskinan anak serta anak-anak yang tinggal di rumah tangga kumuh. Laporan ini menggunakan istilah “daerah perkotaan” dalam temuan-temuan yang dihasilkan dari penerapan definisi BPS tentang perkotaan versus perdesaan dalam data. Istilah “kota” digunakan ketika laporan ini menerapkan parameter ukuran populasi untuk menentukan tipe area. Istilah “kumuh” digunakan dalam analisis di tingkat rumah tangga, mengikuti definisi BPS tentang kriteria kumuh perkotaan dan kumuh perdesaan. Istilah “kumuh perkotaan” dan “kumuh perdesaan” mengacu pada rumah tangga kumuh yang ditemukan di daerah perkotaan dan perdesaan. Yang dimaksud dengan “perkotaan tidak kumuh” adalah penduduk perkotaan yang tidak dikategorikan sebagai rumah tangga kumuh.

- » Dalam lima tahun terakhir, jumlah anak yang tinggal di perkotaan di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data SUSENAS 2019 diperkirakan pada tahun 2019 hampir 46 juta anak (54 persen) tinggal di perkotaan, dibandingkan dengan 41 juta (49 persen) pada tahun 2015.
- » Pada tahun 2019, sekitar 10 juta atau seperdelapan dari seluruh anak Indonesia tinggal di rumah tangga kumuh.
- » Estimasi studi ini, berdasarkan SUSENAS 2019, mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan substansial dari segi kelompok usia, jenis kelamin, atau disabilitas antara anak-anak yang tinggal di perkotaan dan di perdesaan. Namun, ketika melihat ketimpangan di daerah perdesaan, terdapat beberapa perbedaan mencolok di seluruh distribusi pendapatan.
- » Dalam hal ukuran populasi di kota, pada tahun 2019, hampir setengah (48 persen) anak-anak Indonesia, atau sekitar 40 juta anak, tinggal di kota metropolitan. Selain itu, sekitar 11 juta anak tinggal di Jabodetabek, wilayah mega-urban terbesar di Indonesia pada tahun 2019.

Selama lima tahun terakhir, jumlah anak yang tinggal di perkotaan di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan SUSENAS diperkirakan pada tahun 2019 hampir 46 juta anak (54 persen) tinggal di perkotaan, dibandingkan dengan 41 juta (49 persen) pada tahun 2015. Persentase anak dalam kaitannya dengan total populasi tampaknya sedikit menurun antara 2015–2019. Pada tahun 2019, sekitar 32 persen dari total penduduk Indonesia tahun 2019 (yaitu, 84 juta) diperkirakan adalah anak-anak.

Pada tahun 2019, sekitar 10 juta atau seperdelapan dari seluruh anak Indonesia tinggal di rumah tangga kumuh. Di antara mereka, proporsi mereka yang tinggal di daerah perkotaan (56 persen) agak lebih tinggi daripada mereka yang tinggal di daerah perdesaan (44 persen) (lihat Tabel 4). Namun, kesenjangan antara anak-anak perkotaan dan anak-anak perdesaan yang tinggal di rumah tangga kumuh menurun selama periode 2015–2019.

TABEL 4. TREN PROPORSI ANAK, MENURUT JENIS TEMPAT TINGGAL, 2015–2019 (%)

INFORMASI TENTANG ANAK-ANAK	2015	2016	2017	2018	2019
Anak-anak terhadap total populasi	33,1	32,8	32,5	32,0	31,6
Perempuan	32,5	32,2	31,8	31,4	31,0
Laki-laki	33,7	33,5	33,1	32,6	32,2

INFORMASI TENTANG ANAK-ANAK	2015	2016	2017	2018	2019
Anak-anak yang tinggal di perkotaan terhadap total anak	48,8	49,8	51,4	53,2	54,4
Perempuan	48,9	50,0	51,7	53,3	53,6
Laki-laki	48,7	49,8	51,3	53,1	55,1
Anak-anak yang tinggal di pedesaan terhadap total anak-anak	51,2	50,2	48,6	46,8	45,6
Perempuan	51,1	50,1	48,4	46,7	46,4
Laki-laki pedesaan	51,3	50,3	48,8	46,9	44,9
Anak-anak yang tinggal di rumah tangga kumuh terhadap total anak	17,5	16,5	12,7	12,9	12,7
Perempuan	17,5	16,6	12,7	12,9	12,7
Laki-laki	17,5	16,4	12,7	12,9	12,8
Orang dewasa yang tinggal di rumah tangga kumuh terhadap total orang dewasa	11,8	10,8	8,3	8,6	8,4
Perempuan	11,4	10,4	8,0	8,3	8,1
Laki-laki	12,1	11,1	8,6	8,9	8,7
Anak-anak yang tinggal di rumah tangga kumuh perkotaan terhadap yang seluruh anak-anak yang tinggal di rumah tangga kumuh	47,3	49,8	49,9	52,9	55,8
Perempuan	47,5	50,2	49,7	53,0	55,2
Laki-laki	47,1	49,5	50,1	52,9	56,3
Anak-anak yang tinggal di rumah tangga kumuh pedesaan terhadap yang seluruh anak-anak yang tinggal di rumah tangga kumuh	52,7	50,2	50,1	47,1	44,2
Perempuan	52,5	49,8	50,3	47,0	44,8
Laki-laki	52,9	50,5	49,9	47,1	43,7
Anak-anak yang tinggal di rumah tangga kumuh perkotaan terhadap semua anak di perkotaan	17,0	16,5	12,3	12,9	13,0
Perempuan	17,0	16,6	12,2	12,9	13,1
Laki-laki	17,0	16,3	12,4	12,9	13,0
Anak-anak yang tinggal di rumah tangga kumuh pedesaan terhadap semua anak di pedesaan	18,0	16,5	13,1	13,0	12,3
Perempuan	17,9	16,5	13,2	13,0	12,3
Laki-laki	18,0	16,5	13,0	13,0	12,4

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2015–2019.

Berdasarkan estimasi studi ini, mengacu pada data SUSENAS 2019, ditemukan bahwa tidak ada perbedaan substansial dari segi kelompok usia, jenis kelamin, atau disabilitas antara anak-anak yang tinggal di perkotaan dan di perdesaan. Namun, ketika melihat ketimpangan di daerah perdesaan, terdapat perbedaan mencolok di seluruh distribusi pendapatan (lihat Tabel 5). Persentase anak yang tinggal di rumah tangga yang dikepalai perempuan juga sedikit lebih tinggi di daerah perdesaan.

TABEL 5. KARAKTERISTIK ANAK YANG TINGGAL DI PERDESAAN DAN PERKOTAAN INDONESIA, 2019

SUSENAS 2019	PERKOTAAN	PERDESAAN
Karakteristik anak (0–17 tahun) (%)		
Kelompok usia		
Di bawah 1 tahun	5,4	5,8
1–4 tahun	22,0	22,3
5–9 tahun	28,7	28,5
10–14 tahun	28,0	27,1
15–17 tahun	15,9	16,3
Jenis Kelamin		
Laki-laki	51,9	50,4
Perempuan	48,1	49,6
Disabilitas		
Tidak memiliki disabilitas	99,4	99,3
Memiliki disabilitas	0,6	0,7
Kuintil pendapatan		
Terbawah	17,3	31,2
Kedua	20,0	24,4
Ketiga	20,3	20,8
Keempat	19,8	17,0
Teratas	22,6	6,7
Karakteristik rumah tangga tempat tinggal anak (%)		
Jenis Kelamin		
Rumah tangga yang dikepalai perempuan	91,1	90,2
Rumah tangga yang dikepalai laki-laki	8,9	9,8
Usia		
Rumah tangga yang dikepalai oleh anak (usia 0–17 tahun)	0,1	0,1
Rumah tangga yang dikepalai oleh orang dewasa (di atas 18 tahun)	99,9	99,9

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

Di tingkat provinsi, rasio anak yang tinggal di perkotaan dan di perdesaan berimbang. Provinsi Nusa Tenggara Timur tampaknya memiliki proporsi anak terbesar di antara semua provinsi (lihat Tabel 6). Selain itu, persentase terbesar anak yang tinggal di rumah tangga kumuh perkotaan terdapat di Sulawesi Barat. Sebaliknya, porsi terbesar anak yang tinggal di rumah tangga kumuh perdesaan terdapat di Sumatera Utara.



© UNICEF/UNI329145/Ijazah



© UNICEF/UNI206475/Veska



© UNICEF/UNI347351/Daud

TABEL 6. PROPORSI ANAK-ANAK TERHADAP TOTAL POPULASI DI PERKOTAAN, PERDESAAN, DAERAH KUMUH PERKOTAAN, DAERAH KUMUH PERDESAAN PADA TAHUN 2019, BERDASARKAN PROVINSI

PROVINSI	POPULASI PERKOTAAN (%)	ANAK-ANAK DI DAERAH PERKOTAAN (%)	ANAK-ANAK DI DAERAH PERDESAAN (%)	ANAK-ANAK DI RUMAH TANGGA KUMUH PERKOTAAN (%)	ANAK-ANAK DI RUMAH TANGGA TIDAK KUMUH PERKOTAAN (%)	ANAK-ANAK DI RUMAH TANGGA KUMUH PERDESAAN (%)	ANAK-ANAK DI RUMAH TANGGA TIDAK KUMUH PERDESAAN (%)
Aceh	32,5	36,8	38,3	45,4	35,7	46,3	36,9
Bali	68,8	29,7	29,4	33,4	29,3	42,8	29,1
Bangka Belitung	55,2	32,9	34,1	42,9	32,3	48,7	33,4
Banten	71,4	33,1	36,9	39,5	32,5	43,4	36,4
Bengkulu	33,1	34,4	34,7	44,9	33,3	42,4	33,8
DI Yogyakarta	73,0	26,8	25,9	31,5	26,6	48,5	25,7
DKI Jakarta	100,0	30,1	-	38,2	27,0	-	-
Gorontalo	42,2	33,2	35,4	41,6	31,8	44,7	33,4
Jambi	32,5	33,0	34,2	43,5	32,2	46,2	33,5
Jawa Barat	76,5	33,0	32,6	42,2	31,9	44,2	31,6
Jawa Tengah	51,3	30,1	30,1	37,7	29,8	39,5	30,0
Jawa Timur	53,5	28,5	28,2	35,1	28,0	35,4	28,0
Kalimantan Barat	35,1	35,0	36,2	46,2	34,5	44,7	35,2
Kalimantan Selatan	47,2	33,7	35,0	46,2	32,8	45,1	34,4
Kalimantan Tengah	40,2	33,7	34,5	40,4	32,7	41,1	33,7
Kalimantan Timur	67,4	33,7	34,7	42,3	32,8	43,7	33,7
Kalimantan Utara	61,0	36,2	37,2	46,9	34,4	49,4	36,1
Kepulauan Riau	89,9	35,8	36,7	41,1	35,4	50,6	36,0
Lampung	30,8	33,5	34,2	43,3	32,8	44,1	33,8
Maluku	43,5	37,8	42,3	46,2	36,2	50,1	40,7
Maluku Utara	28,7	37,1	41,6	40,5	36,9	49,8	40,6
Nusa Tenggara Barat	48,3	35,8	37,1	44,6	34,8	44,8	36,0
Nusa Tenggara Timur	23,8	39,7	43,2	44,9	38,9	47,8	41,6
Papua	28,6	34,5	38,8	41,2	32,6	43,2	33,1
Papua Barat	42,1	36,6	38,7	43,8	34,6	46,2	36,9
Riau	40,4	36,2	38,0	49,5	34,7	46,8	37,1
Sulawesi Barat	23,6	38,9	38,9	51,5	37,2	48,2	37,7
Sulawesi Selatan	43,4	34,7	35,8	44,5	33,6	46,9	35,0
Sulawesi Tengah	29,9	34,3	35,8	43,3	33,1	47,7	33,6
Sulawesi Tenggara	39,2	39,4	41,4	46,0	38,6	52,8	40,1
Sulawesi Utara	52,2	31,0	32,4	41,7	29,2	41,4	31,2
Sumatera Barat	47,0	35,9	37,9	46,1	35,1	49,2	36,5
Sumatera Selatan	37,3	34,2	35,5	42,7	32,8	43,4	34,4
Sumatera Utara	54,3	36,9	41,2	49,0	35,7	54,1	38,6

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

Dari segi jumlah penduduk kota, pada tahun 2019, hampir setengah (48 persen) anak Indonesia, atau sekitar 40 juta anak, tinggal di kota metropolitan. Sementara itu, hanya 2 persen dari total jumlah anak di Indonesia, atau kurang dari dua juta anak, tinggal di kota kecil (lihat Tabel 7). Selain itu, sekitar 31 persen atau 26 juta anak-anak tinggal di kota-kota sedang, dan 19 persen atau sekitar 16 juta anak-anak tinggal di kota-kota besar.

TABEL 7. RASIO ANAK-ANAK TERHADAP POPULASI, BERDASARKAN UKURAN KOTA DAN WILAYAH MEGA-URBAN PADA TAHUN 2019

JENIS TEMPAT	RASIO JUMLAH ANAK TERHADAP JUMLAH TOTAL POPULASI (%)	RASIO JUMLAH ANAK TERHADAP JUMLAH TOTAL POPULASI ANAK (%)	ESTIMASI JUMLAH ANAK	ESTIMASI UKURAN POPULASI
INDONESIA	n/a	n/a	84.365.360	267.306.564
Ukuran kota				
Kecil	38,3	2,2	1.831.883	4.781.676
Sedang	34,8	30,9	26.155.625	75.254.275
Besar	30,3	19,1	16.026.391	52.886.974
Metropolitan	30,0	47,9	40.351.461	134.383.640
Wilayah mega-urban				
Jabodetabek	30,6	12,5	10.541.801	34.408.229
Bandung Raya	30,4	3,9	3.326.372	10.931.581
Gerbangkertosusilo	27,6	3,3	2.723.214	9.862.280
Kedungsepur	27,9	2,2	1.829.083	6.556.649
Mebidangro	33,1	1,9	1.566.064	4.737.508
Patungraya Agung	32,2	1,1	939.216	2.914.082
Banjarbakula	31,9	0,7	621.735	1.948.125
Sarbagita	27,1	0,8	695.041	2.566.168
Maminasata	32,2	1	833.246	2.589.668
Bimindo	29,8	0,3	254.181	854.173
Palapa	33,0	0,6	478.875	1.451.235
Mataram Raya	33,4	0,8	707.918	2.122.376

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

Selain itu, pada tahun 2019 sekitar 11 juta anak tinggal di Jabodetabek, wilayah mega-urban terbesar di Indonesia. Di antara 10 wilayah mega-urban yang dibahas dalam studi ini, Jabodetabek adalah wilayah terpadat, dengan 34 juta orang tinggal di wilayah ini—sekitar 13 persen dari total penduduk Indonesia. Wilayah mega urban terbesar kedua adalah Bandung Raya dengan jumlah penduduk sekitar 11 juta jiwa, dan ketiga adalah Gerbangkertosusilo.



SITUASI ANAK-ANAK DAN KAUM MUDA DI PERKOTAAN

Bagian ini menyajikan temuan utama tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh anak-anak yang tinggal di perkotaan yang dibedakan, sebisa mungkin, berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, perbandingan perkotaan/perdesaan, dan latar belakang sosial ekonomi. Temuan disajikan menggunakan kerangka TPB yang dipilih, yang terdiri dari Tujuan 1 (Menghapus Kemiskinan), Tujuan 2 (Mengakhiri Kelaparan), Tujuan 3 (Kesehatan), Tujuan 4 (Pendidikan), Tujuan 5 (Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan), Tujuan 6 (Air dan Sanitasi), dan Tujuan 16 (Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat).

Beberapa indikator yang dipilih dalam penelitian ini disusun dalam lima dimensi hak anak, yang ditunjukkan pada subbagian 5.1–5.5. Subbagian 5.6 dan 5.7 yang berfokus pada ruang yang aman dan berkelanjutan serta partisipasi publik anak-anak dan kaum muda dalam pengambilan keputusan. Pemilahan menurut jenis kelamin dan gender pada beberapa indikator mungkin tidak dapat dilakukan karena ukuran sampel yang terbatas. Studi ini menyajikan temuan kuantitatif di tingkat nasional saja, dan dipilah berdasarkan usia atau jenis kelamin selama memungkinkan.

Temuan di bagian ini juga didasarkan pada analisis sekunder melalui studi dan konsultasi yang dilakukan dengan kaum muda (lihat metodologi di Bagian 2). Konsultasi dalam studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang rinci mengenai pengalaman anak-anak dan kaum muda dalam menjalani hidup mereka di kota tertentu di Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki dokumen formal yang mana mereka bisa jadi tidak terhitung saat dilakukan sensus atau survei, dan membuat mereka “tidak terlihat” oleh pihak berwenang. Nama samaran digunakan untuk identitas mereka, tetapi kota peserta diberikan untuk memastikan bahwa pembaca memahami konteks daerah mereka masing-masing. Data yang tersedia tidak memungkinkan studi ini untuk melakukan analisis mendalam mengenai gender, dan oleh karena itu, tidak ada temuan konklusif mengenai perbedaan gender antara berbagai tema. Laporan observasi atau pengalaman dari peserta anak/kaum muda perempuan serta laki-laki tidak dapat secara serta-merta dan eksklusif diatribusikan kepada perbedaan gender, melihat variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang mungkin berperan.

5.1. KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

Studi ini berusaha untuk menganalisis sejumlah masalah kompleks yang terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan mental dengan menggunakan berbagai metode. Dengan menggunakan data dari SUSENAS, studi ini mengeksplorasi beberapa indikator terkait gizi dan kesehatan anak yang sesuai dengan TPB Tujuan 2 (Mengakhiri Kelaparan) dan Tujuan 3 (Kesehatan dan kesejahteraan yang baik), yaitu ASI, berat badan lahir, imunisasi dan kebiasaan merokok. Menggunakan data dari konsultasi dengan anak-anak dan kaum muda, studi ini membahas akses terhadap perawatan kesehatan, pengetahuan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19 seperti jaga jarak dan praktik kebersihan yang baik, dan konsekuensi pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental.

- » Estimasi indikator kesehatan menggunakan data SUSENAS 2019 menunjukkan bahwa kebiasaan merokok di kalangan remaja tidak banyak bisa dibedakan antara di perkotaan/perdesaan, daerah kumuh perkotaan, dan daerah kumuh perdesaan. Sementara, dalam hal berat lahir dan imunisasi, anak-anak di daerah kumuh perdesaan secara konsisten mengalami kondisi yang lebih buruk.
- » Analisis data SDKI menunjukkan bahwa angka kematian balita secara umum lebih tinggi

(dibandingkan kelompok usia lainnya), dan juga untuk kelompok usia ini di perdesaan, meskipun angka ini mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2017.

- » Berdasarkan konsultasi dengan kaum muda di perkotaan, perbedaan pemahaman dan kepatuhan mereka pada protokol kesehatan bisa terkait dengan kesalahpahaman tentang pandemi COVID-19. Beberapa peserta mengutarakan bahwa mereka meragukan betapa besar dan beratnya dampak virus dan pandemi ini, dan hal ini tampak diyakini luas oleh banyak teman mereka di komunitasnya.
- » Meski beberapa masih meragukan, pandemi telah menciptakan situasi penuh ketidakpastian dan kecemasan bagi anak-anak dan kaum muda yang tinggal di perkotaan dan berpartisipasi dalam studi ini.

5.1.1. INDIKATOR KESEHATAN YANG DIPILIH BERDASARKAN SUSENAS

Mengingat SUSENAS utamanya dirancang untuk memberikan informasi tentang status sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, SUSENAS tidak memuat pertanyaan detail tentang kesehatan dan kesejahteraan (termasuk gizi). Dengan demikian, penelitian ini hanya memberikan analisis terhadap tiga indikator berikut:

1. Proporsi bayi yang lahir di bawah 2,5 kg
2. Proporsi balita yang mendapatkan imunisasi lengkap
3. Proporsi kaum muda berusia 15–19 tahun yang merokok

Studi ini juga memanfaatkan data SDKI untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif tentang kesehatan anak di perkotaan dan perdesaan Indonesia. Rincian indikator yang dianalisis menggunakan SUSENAS dan SDKI dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. Namun, meskipun beberapa indikator lain dapat diperiksa dari SDKI (Tabel 12), data ini tidak memberikan indikator kesehatan dan kesejahteraan yang penting seperti stunting, wasting atau yang berhubungan dengan gizi. Karena keterbatasan ini, setiap interpretasi hasil di bagian ini harus digunakan dengan hati-hati.

Estimasi indikator kesehatan menggunakan data SUSENAS 2019 menunjukkan bahwa kebiasaan merokok di kalangan remaja tidak banyak bisa dibedakan antara di perkotaan/perdesaan, daerah kumuh perkotaan, dan daerah kumuh perdesaan. Sebaliknya, dalam hal berat lahir dan imunisasi, anak-anak di daerah kumuh perdesaan secara konsisten memiliki kondisi yang lebih buruk; persentase bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah dan anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap untuk balita di daerah kumuh perdesaan masing-masing adalah 15 persen dan 30 persen.

Dalam hal ukuran kota, tidak ada variasi bermakna yang ditemukan pada remaja perokok. Anak-anak di kota-kota kecil tampaknya lebih buruk dalam hal berat badan bayi dan imunisasi, yang menunjukkan bahwa sebaiknya diberikan dukungan terhadap sistem kesehatan bayi dan anak usia dini di daerah-daerah ini (lihat Tabel 8). Di wilayah mega-urban, Mamminasata, Patungraya Agung dan Bandung Raya masing-masing memiliki kinerja terburuk dalam hal bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah dan remaja perokok.

TABEL 8. PROPORSI INDIKATOR KESEHATAN DAN GIZI ANAK TERPILIH DARI SUSENAS 2019, MENURUT KLASIFIKASI PERKOTAAN/PERDESAAN, KOTA DAN MEGA-URBAN (%)

JENIS TEMPAT	PROPORSI BAYI YANG LAHIR DI BAWAH 2,5 KG	PROPORSI BALITA YANG MENDAPATKAN IMUNISASI LENGKAP	PROPORSI REMAJA PEROKOK (15–19 TAHUN)
Perkotaan	10,5	47,4	19,0
Perdesaan	13,3	45,2	20,7
Rumah tangga kumuh perkotaan	10,4	46,3	20,6
Rumah tangga tidak kumuh perkotaan	10,6	47,5	18,8
Rumah tangga kumuh perdesaan	15,4	30,4	18,6
Ukuran kota			
Kecil	14,2	29,0	17,8
Sedang	11,5	41,5	17,8
Besar	11,1	50,3	17,7
Metropolitan	10,0	48,8	19,8
Wilayah mega-urban			
Jabodetabek	10,3	44,1	19,3
Bandung Raya	6,0	51,9	24,0
Gerbangkertosusilo	11,1	47,1	17,4
Kedungsepur	10,3	68,3	18,6
Mebidangro	5,1	29,7	16,4
Patungraya Agung	11,5	33,6	17,7
Banjarmakula	10,3	53,3	16,1
Sarbagita	9,4	59,3	14,8
Maminasata	20,3	35,3	16,5
Bimindo	12,1	40,9	15,6
Palapa	4,1*	29,4	18,3
Mataram Raya	9,1	61,7	19,9

*Estimasi dianggap tidak dapat diandalkan. Data yang dibubuhi tanda bintang memiliki *relative standard error* (RSE) lebih besar dari 30 persen dan harus digunakan dengan hati-hati.

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.



Dua provinsi dengan persentase tertinggi bayi yang lahir di bawah 2,5 kg di daerah perkotaan adalah Papua (18 persen) dan Papua Barat (17 persen) (lihat Tabel 9). Meskipun proporsi bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah di sini adalah yang terbesar, proporsi bayi dengan berat badan lahir rendah di perdesaan Papua dan Papua Barat juga tinggi, menunjukkan bahwa masalah ini tidak berarti hanya masalah perkotaan. Kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan untuk bayi baru lahir dengan berat badan rendah adalah yang terbesar di Kalimantan Barat, diikuti oleh Kalimantan Selatan dan Lampung, meskipun ukuran kesenjangan ini minimal.

TABEL 9. PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH DALAM HAL BAYI YANG LAHIR DI BAWAH 2,5 KG DI PERKOTAAN DAN KESENJANGAN ANTARA PROPORSI DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN

10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	PROPORSI BAYI YANG LAHIR DI BAWAH 2,5 KG DI DAERAH PERKOTAAN (%)	10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	KESENJANGAN ANTARA PROPORSI BAYI YANG LAHIR DI BAWAH 2,5 KG DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN (% PERKOTAAN – % PERDESAAN)
Papua	17,6	Kalimantan Barat	2,2
Papua Barat	17,1	Kalimantan Selatan	1,4
Sulawesi Selatan	16,5	Lampung	1,4
Kalimantan Barat	16,4	Nusa Tenggara Barat	0,6
Sulawesi Tengah	16,3	Bali	0,5
Kalimantan Tengah	15,0	Kalimantan Utara	0,2
Sulawesi Barat	14,7	Sulawesi Utara	-0,1
Gorontalo	14,7	Jawa Tengah	-0,5
Sulawesi Utara	14,4	Riau	-1,0
Kalimantan Timur	14,0	Sulawesi Tengah	-1,3

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019

Proporsi terendah balita yang mendapatkan imunisasi lengkap di daerah perkotaan ditemukan di Maluku Utara, diikuti oleh Aceh (lihat Tabel 10). Proporsi berikut juga lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional di perkotaan. Namun, provinsi dengan kesenjangan tertinggi dan dengan proporsi di perkotaan lebih rendah daripada perdesaan adalah Bengkulu.

TABEL 10. PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH DALAM HAL BALITA YANG MENDAPATKAN IMUNISASI LENGKAP DI PERKOTAAN DAN KESENJANGAN ANTARA PROPORSI DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN

10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	PROPORSI BALITA YANG MENDAPATKAN IMUNISASI LENGKAP DI DAERAH PERKOTAAN (%)	10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	KESENJANGAN ANTARA PROPORSI BALITA YANG MENDAPATKAN IMUNISASI LENGKAP DI DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN (% PERKOTAAN – % PERDESAAN)
Maluku Utara	18,2	Bengkulu	-11,7
Aceh	19,0	Kalimantan Utara	-11,3
Sulawesi Tenggara	26,3	Lampung	-8,9
Sumatera Utara	26,9	Sulawesi Tengah	-7,6
Riau	27,4	Sulawesi Selatan	-7,2
Papua Barat	28,9	Sulawesi Utara	-6,9
Papua	32,0	Bali	-6,3
Maluku	33,4	Sulawesi Tenggara	-5,4
Sumatera Selatan	34,3	Sulawesi Barat	-5,2
Sulawesi Tengah	35,7	Di Yogyakarta	-4,8

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

Jawa Barat tampaknya memiliki proporsi tertinggi remaja di daerah perkotaan berusia 15-19 tahun yang mengaku merokok dalam sebulan terakhir. Hal ini sesuai dengan temuan sebelumnya, yang mengungkapkan bahwa Bandung Raya, kawasan mega urban yang terletak di Provinsi Jawa Barat, juga memiliki persentase remaja perokok terbesar (lihat Tabel 11). Namun, hal ini tampaknya tidak menjadi masalah yang hanya terjadi perkotaan di Jawa Barat, karena provinsi ini tidak termasuk dalam 10 provinsi terendah dalam hal kesenjangan merokok antara daerah perkotaan dan perdesaan. Namun, Bali memiliki selisih tertinggi dalam indikator remaja perokok di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan.

TABEL 11. PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH DALAM HAL REMAJA PEROKOK DI PERKOTAAN DAN KESENJANGAN ANTARA PROPORSI DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN

10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	PROPORSI REMAJA PEROKOK (15-19 TAHUN) DI PERKOTAAN (%)	10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	KESENJANGAN ANTARA PROPORSI REMAJA PEROKOK (15-19 TAHUN) DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN (% PERKOTAAN - % PERDESAAN)
Jawa Barat	22,3	Bali	1,6
Lampung	21,5	Papua	1,2
Bangka Belitung	20,4	Bangka Belitung	0,1
Sulawesi Tengah	20,0	Nusa Tenggara Timur	-0,7
Banten	20,0	Sulawesi Barat	-0,7
Bengkulu	19,9	Sumatera Utara	-0,9
Sumatera Barat	19,3	Sulawesi Tengah	-1,0
Nusa Tenggara Barat	19,1	Kalimantan Selatan	-1,1
Jawa Timur	18,8	Maluku Utara	-1,1
Gorontalo	18,1	Papua Barat	-1,4

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

5.1.2. INDIKATOR KESEHATAN TERPILIH DARI SDKI

Analisis data SDKI menunjukkan bahwa angka kematian pada umumnya lebih tinggi balita (dibandingkan kelompok usia lainnya) dan pada anak balita di perdesaan, namun angka ini mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2017. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa angka kematian bayi dan balita tampaknya meningkat pada anak dari ibu remaja (15-19 tahun) di perkotaan (Lampiran 5).

Anak-anak di perkotaan masih memiliki situasi yang lebih baik untuk beberapa parameter kesehatan dasar seperti imunisasi, cakupan vitamin A dan prevalensi diare. Proporsi cakupan imunisasi pada balita dan cakupan suplemen vitamin A pada usia 6-59 bulan pada tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2012 secara keseluruhan. Namun demikian, proporsi rata-ratanya masih lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan, dan tingkat kenaikannya sedikit lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa prevalensi diare lebih rendah untuk anak-anak yang lebih kaya di daerah perkotaan; keterkaitan serupa tidak ditemukan pada anak-anak yang lebih kaya di daerah perdesaan (Lampiran 6).

Menariknya, beberapa praktik kesehatan, seperti penggunaan kontrasepsi di antara mereka yang berusia 15-24 tahun, ditemukan lebih umum di daerah perdesaan daripada di perkotaan. Namun, penggunaan kontrasepsi secara keseluruhan telah menurun antara tahun 2012 hingga 2017.

Indikator Praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PPMBA) juga menunjukkan pola yang sama di mana ditemukan proporsi yang lebih tinggi di daerah perdesaan daripada di daerah perkotaan

(lihat Tabel 12). Persentase anak di bawah 6 bulan yang tinggal bersama ibunya dan mendapatkan ASI eksklusif secara keseluruhan lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan meskipun secara keseluruhan meningkat di kedua wilayah antara tahun 2012 hingga 2017. Selanjutnya, proporsi anak usia 6–23 bulan yang memiliki frekuensi minimal mendapat makanan dan minimal diet makanan yang dapat diterima telah meningkat antara tahun 2012 hingga 2017.

TABEL 12. ESTIMASI SURVEI DEMOGRAFI DAN KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2012 DAN 2017 TENTANG INDIKATOR KESEHATAN DAN GIZI YANG DIPILIH (%)

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	DAERAH PERKOTAAN		DAERAH PERDESAAN		TOTAL	
		2012	2017	2012	2017	2012	2017
Tingkat kematian	Angka kematian bayi (di bawah 1)	25,8	24,1	37,1	23,4	31,5	23,7
	Angka kematian balita	31,8	30,5	47,7	33,0	39,9	31,6
	Angka kematian anak (1-4 tahun)	6,2	6,6	11,0	9,4	8,6	8,1
Berat badan lahir rendah	Persentase kelahiran dengan berat lahir yang dilaporkan kurang dari 2,5 kilogram	6,2	7,2	8,6	7,1	7,3	7,1
Immunisasi*	Persentase anak usia 0–4 tahun yang mendapatkan imunisasi lengkap	60,3	70,1	51,1	69,0	55,7	69,6
Asupan vitamin A	Persentase anak usia 6–59 bulan yang mendapat vitamin A	63,9	80,2	58,4	80,6	61,1	80,4
Obat cacing	Persentase balita yang diberi obat cacing	25,8	38,6	26,0	41,5	25,9	40,1
Diare	Persentase balita yang mengalami diare dalam 2 minggu sebelum survei	13,0	12,8	15,5	15,3	14,3	14,1
ISPA	Persentase balita yang mengalami gejala ISPA dalam 2 minggu sebelum survei	4,4	3,8	5,8	4,5	5,1	4,2
ASI Eksklusif	Persentase anak yang termuda (bungsu) di bawah usia 6 bulan yang tinggal bersama ibunya dan diberi ASI eksklusif	40,3	46,0	43,9	56,2	41,0	51,5
Kontrasepsi	Persentase perempuan usia 15-24 tahun yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi modern apa pun	15,0	11,0	26,0	20,1	20,1	15,2

Praktik PPMB**	Persentase anak usia 6–23 bulan yang memiliki keragaman makanan minimal	65,0	65,7	51,5	54,5	58,2	60,0
	Persentase anak usia 6–23 bulan yang memiliki frekuensi minimal makanan	70,5	76,0	61,6	67,6	66,0	71,7
	Persentase anak usia 6–23 bulan yang memiliki minimal diet makanan yang diterima	42,6	46,1	30,7	34,7	36,6	40,3

*Indikator imunisasi meliputi BCG, tiga dosis DPT, tiga dosis vaksin polio oral, dan satu dosis campak.

**Indikator PPMB: 1) Susu atau produk susu mencakup dua atau lebih pemberian susu formula bayi komersial (susu hewani segar, susu kaleng, dan susu bubuk), dan yogurt; 2) Keragaman makanan minimal meliputi pangan dari empat atau lebih grup makanan berikut: a. susu formula, susu selain ASI, keju atau yogurt atau produk susu lainnya; b. makanan terbuat dari biji-bijian, akar dan batang, termasuk bubur, makanan bayi fortifikasi dari biji-bijian; c. Sayuran dan buah kaya akan vitamin A; d. Sayuran dan buah lain; etelur; f. daging, unggas, ikan, kerang dan daging organ; g. sayuran dan kacang-kacangan; Frekuensi minimal mendapatkan makanan adalah menerima makanan padat atau semi padat paling sedikit dua kali sehari untuk bayi 6-8 bulan yang mendapat ASI dan paling sedikit tiga kali sehari untuk bayi 9-23 bulan yang mendapat ASI dan menerima makanan atau susu padat atau semi padat; Diet minimal yang diterima adalah mendapatkan keragaman diet minimal dan frekuensi minimal mendapatkan makanan untuk anak yang tidak diberi ASI, dan menerima susu atau produk susu lainnya setidaknya dua kali sehari, frekuensi minimal mendapatkan makanan, dan makanan padat atau semi padat dari setidaknya empat grup makanan tidak termasuk grup makanan susu atau produk susu untuk anak yang tidak diberi ASI.

5.1.3. AKSES KE LAYANAN KESEHATAN

Sebagian besar kaum muda yang menjadi peserta konsultasi tidak memiliki masalah dalam mengakses layanan kesehatan tingkat pertama karena mereka semua terdaftar **Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**. Selain itu, fasilitas perawatan tingkat pertama berada dalam jarak yang wajar dari rumah mereka. Namun, salah satu peserta, Siti dari Kupang, merasa terganggu dengan mekanisme rujukan JKN yang berarti meski tinggal di dekat rumah sakit, keluarganya harus mendapatkan rujukan terlebih dahulu dari penyedia layanan kesehatan tingkat pertama, yang berjarak satu jam dari rumahnya.

5.1.4. KEPATUHAN TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

Saat konsultasi berlangsung di tengah pandemi COVID-19, tim peneliti memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempelajari pengalaman anak-anak dan kaum muda, serta perspektif mereka tentang kesehatan masyarakat. Lima bulan setelah penerapan jaga jarak, beberapa informan mengaku mulai kurang mematuhi protokol kesehatan. Mereka mulai melakukan interaksi fisik dan kegiatan sosial seperti menghadiri rapat umum atau acara amal. Karena setiap tempat memiliki tingkat keleluasaan yang berbeda-beda dalam menentukan apakah akan membuka kembali sekolah atau tidak, seorang peserta di Kupang, Ryan, menyebutkan bahwa ia telah mulai bersekolah lagi di bawah protokol kesehatan yang ketat, yang ia sukai karena pertemuan tatap muka akan memungkinkannya untuk menyelesaikan bagian praktek dari kursusnya di sekolah kejuruan.

Para peserta memiliki pandangan yang beragam tentang pemakaian masker wajah selama pandemi. Beberapa peserta cukup disiplin memakainya di luar rumah, dan heran dengan keengganan peserta lain untuk memakainya.

Namun, beberapa peserta acuh tak acuh tentang pemakaian masker. Mereka mengambil pendekatan yang lebih pragmatis dan hanya mengenakan masker wajah untuk menghindari sanksi atau hukuman atas ketidakpatuhan, terutama jika mereka berada di ruang publik. Dimas di Surakarta, misalnya, mempertanyakan efektivitas masker dalam mencegah infeksi COVID-19.

Perbedaan pemahaman dan kepatuhan mereka pada protokol kesehatan bisa terkait dengan kesalahpahaman tentang pandemi COVID-19. Beberapa peserta mengutarakan bahwa mereka meragukan betapa besar dan beratnya dampak virus dan pandemi ini, dan hal ini tampak diyakini luas oleh banyak teman mereka di komunitasnya.

Ilham dari Makassar, misalnya, mengungkapkan sikap skeptisnya terhadap pandemi COVID-19. Sebagai petugas kebersihan, ia menjustifikasi sikapnya ini berdasarkan pengamatannya bahwa tidak ada rekan-rekannya, yang menangani semua jenis sampah, yang terkena COVID-19. Menurutnya COVID-19 hanyalah virus influenza biasa. Dia telah melihat berita tentang tes swab palsu dan ini menambah skeptisnnya. Peserta lain juga menyatakan tingkat keraguan mereka tentang potensi COVID-19, dan memberi contoh tidak adanya lonjakan infeksi setelah protes publik di wilayah mereka. Salah satu peserta, Putri, menjadi lebih lengah setelah hasil tes PCR-nya negatif.



5.1.5. COVID-19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN

Pandemi jelas telah menciptakan situasi penuh ketidakpastian dan kecemasan bagi anak-anak dan kaum muda yang tinggal di perkotaan dan berpartisipasi dalam studi ini. Mengingat keadaan sosial ekonomi mereka, banyak peserta mengungkapkan ketakutan dan kecemasan tentang konsekuensi pandemi terhadap pendapatan dan pekerjaan mereka. Upaya Pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus melalui berbagai pembatasan mobilitas telah menekan aktivitas ekonomi, yang berdampak pada pedagang atau pekerja tidak tetap yang mata pencahariannya bergantung pada mobilitas masyarakat. Perlambatan ekonomi ini juga berimbas pada sebagian informan yang bekerja di sektor informal. Mereka mendapati bahwa pendapatan mereka menurun sementara prospek mendapatkan pekerjaan formal juga berkurang.

Mereka yang tetap melakukan pekerjaan formal, seperti salah satu peserta kami, Annisa, mungkin terus-menerus hidup dalam ketakutan akan diberhentikan karena sifat kontraktual dari pekerjaan mereka. Peserta lain, Doni, di Makassar, mengamati bahwa banyak temannya yang kehilangan pekerjaan bekerja di sektor formal berketerampilan rendah sebagai satpam atau penjaga toko di mal. Mereka kini beralih ke pekerjaan tidak tetap seperti menjadi tukang ojek berbasis aplikasi online atau mengambil pekerjaan sambilan seperti pekerjaan konstruksi atau pengamen. Peserta lain yang tidak bekerja sangat menyadari risiko ekonomi yang dihadapi keluarga mereka selama pandemi. Ratih, misalnya, khawatir tidak punya cukup beras untuk menghidupi seluruh keluarga sementara ayah dan kakak-kakaknya berjuang mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangga mereka.

Kekhawatiran anak-anak dan kaum muda juga berakar pada risiko keluarga mereka dapat terinfeksi COVID-19. Namun, beberapa anak dan keluarga memiliki sarana yang terbatas untuk mengatasi sumber kecemasan tersebut karena mereka tidak dapat terus-menerus menjaga jarak fisik atau tetap diam di rumah karena kewajiban sosial dan ekonomi. Para peserta, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, terpaksa keluar rumah untuk mendapatkan penghasilan dan mempertahankan pekerjaan apa pun yang mereka miliki, bahkan jika hal itu berarti membuat diri mereka dan keluarga mereka terpapar risiko infeksi COVID-19.

Terlepas dari banyak kecemasan yang dialami peserta, mereka juga menyoroti bagaimana teman, orang tua, dan keluarga menjadi sumber dukungan mental selama pandemi. Beberapa peserta menemukan bahwa terdapat aspek positif dari pandemi, seperti dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga, terutama selama karantina.

5.2. PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

Pendidikan adalah bagian besar dari kehidupan anak-anak dan kaum muda. Pada bagian ini, studi ini mempertimbangkan beberapa indikator dan berbagai dimensi pengalaman belajar anak dan kaum muda di perkotaan. Melalui analisis sekunder data SUSENAS, tim peneliti menilai kinerja perkotaan dan perdesaan berdasarkan sejumlah indikator, seperti tingkat kehadiran di semua tingkat sekolah, proporsi anak putus sekolah, tingkat kelulusan dan akses ke Internet. Menggunakan data dari konsultasi, studi ini mengeksplorasi bagaimana pengalaman anak-anak dan kaum muda dalam bersekolah (terutama selama pergeseran ke belajar daring selama pandemi), dan apa saja aspirasi pendidikan dan tantangan utama mereka dalam memperoleh pendidikan.

- » Secara keseluruhan, indikator pendidikan anak-anak di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan dengan anak-anak di daerah perdesaan. Lebih lagi, anak-anak yang tinggal di rumah tangga kumuh di daerah perdesaan tampak paling mengalami kesulitan akses ke sekolah dan Internet.
- » Anak-anak dan kaum muda yang berpartisipasi dalam studi juga kesulitan untuk beradaptasi dengan metode belajar daring, di mana mereka seringkali tidak dapat berinteraksi secara langsung dan lancar dengan guru dan teman sekolahnya.
- » Meskipun daerah perkotaan umumnya memiliki kinerja yang lebih baik daripada daerah perdesaan pada banyak indikator yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran, masih terdapat anak-anak dan kaum muda di kota yang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

5.2.1. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN AKSES PENDIDIKAN

Analisis indikator pendidikan dari data sekunder menunjukkan bahwa proporsi anak putus sekolah secara konsisten lebih tinggi di perdesaan, bahwa tingkat kelulusan sekolah secara konsisten lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan, dan bahwa prevalensi indikator-indikator tersebut relatif stabil dari waktu ke waktu di kedua wilayah. Pengecualian untuk ini adalah anak berusia enam tahun di daerah perdesaan, di mana tampaknya semakin banyak anak dalam kelompok ini yang mengenyam prasekolah (lihat Tabel 13).

TABEL 13. PROPORSI ANAK-ANAK YANG TIDAK MENGENYAM PRASEKOLAH, TIDAK BERSEKOLAH, DAN TIDAK MEMILIKI AKSES KE INTERNET, 2015–2019

INDIKATOR PENDIDIKAN	2015	2016	2017	2018	2019
1. Anak-anak berusia 6 tahun yang tidak pernah mengenyam prasekolah dan SD (%)					
Perkotaan	2,9	3,8	4,7	3,6	2,6
Perdesaan	5,4	6,5	5,6	4,7	4,9
2. Anak-anak berusia 6 tahun yang saat ini duduk di sekolah dasar tanpa pernah prasekolah (%)					
Perkotaan	16,3	14,9	15,7	15,2	16,0
Perdesaan	30,9	25,8	24,8	24,8	23,6
3. Anak-anak berusia 7-12 tahun yang saat ini tidak bersekolah (%)					
Perkotaan	0,2	0,4	0,3	0,4	0,5
Perdesaan	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
4. Remaja berusia 13-15 tahun yang saat ini tidak bersekolah (%)					
Perkotaan	6,1	6,1	5,8	5,5	5,5
Perdesaan	10,8	10,0	10,1	8,6	9,3
5. Remaja berusia 16-18 tahun yang saat ini tidak bersekolah (%)					
Perkotaan	23,1	17,7	17,6	16,7	19,5
Perdesaan	38,9	32,5	31,1	30,3	29,4
6. Tingkat kelulusan sekolah dasar (13–15 tahun) (%)					
Perkotaan	94,6	95,6	97,2	96,3	97,0
Perdesaan	88,5	92,2	93,2	92,8	93,7
7. Tingkat kelulusan sekolah menengah pertama (16–18 tahun) (%)					
Perkotaan	85,3	89,3	89,2	89,2	88,6
Perdesaan	72,3	77,6	79,7	79,8	80,8
8. Tingkat kelulusan sekolah menengah atas (19–21 tahun) (%)					
Perkotaan	64,3	69,1	66,7	71,6	65,9
Perdesaan	36,9	43,9	45,8	47,8	47,3
9. Anak-anak berusia 5-17 tahun yang tidak memiliki akses Internet (%)					
Perkotaan	64,7	64,4	61,6	57,7	49,5
Perdesaan	80,6	80,3	78,7	74,1	67,1

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2015-2019

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara anak usia enam tahun di perkotaan yang saat ini duduk di bangku sekolah dasar tanpa mengenyam pendidikan prasekolah dibandingkan dengan anak yang tinggal di perdesaan. Proporsi anak usia enam tahun yang bersekolah di sekolah dasar tanpa bersekolah di prasekolah juga meningkat secara negatif dengan ukuran kota. Secara keseluruhan, terdapat persentase yang



© UNICEF/UN0409852/Bea

lebih rendah pada indikator-indikator pendidikan yang negatif di daerah perkotaan, dan anak-anak yang tinggal di rumah tangga kumuh di daerah perdesaan tampaknya paling kurang memiliki akses ke sekolah dan internet.

Di antara kota-kota mega-urban, Mamminasata dan Banjarbakula tampak memiliki kondisi yang paling buruk; Mamminasata memiliki tingkat kelulusan terendah untuk anak-anak sekolah menengah pertama dan tingkat anak-anak putus sekolah berusia 16–18 tahun tertinggi (lihat Tabel 14). Lebih jauh, Banjarbakula memiliki kinerja terburuk untuk tingkat kelulusan sekolah dasar dan anak putus sekolah berusia 13-15 tahun, dan Palapa memiliki proporsi tertinggi untuk anak-anak tanpa akses internet.

TABEL 14. PROPORSI ANAK-ANAK YANG TIDAK BERSEKOLAH, PUTUS SEKOLAH, TINGKAT KELULUSAN DAN ANAK-ANAK YANG TIDAK MEMILIKI AKSES INTERNET, BERDASARKAN KLASIFIKASI PERKOTAAN/PERDESAAN, KOTA DAN MEGA-URBAN

JENIS TEMPAT	PROPORSI ANAK-ANAK USIA 6 TAHUN YANG TIDAK PERNAH BERSEKOLAH DI PRASEKOLAH DAN SEKOLAH DASAR (%)	PROPORSI ANAK-ANAK BERUSIA 6 TAHUN YANG SAAT INI DUDUK DI SEKOLAH DASAR TANPA PERNAH PRASEKOLAH (%)	PROPORSI ANAK-ANAK BERUSIA 7-12 TAHUN YANG SAAT INI TIDAK BERSEKOLAH	PROPORSI ANAK-ANAK BERUSIA 13-15 TAHUN YANG SAAT INI TIDAK BERSEKOLAH	PROPORSI ANAK-ANAK BERUSIA 16-18 TAHUN YANG SAAT INI TIDAK BERSEKOLAH	TINGKAT KELULUSAN SEKOLAH DASAR (13-15 TAHUN) (%)	TINGKAT KELULUSAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (16-18 TAHUN) (%)	TINGKAT KELULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (19-21 TAHUN) (%)	PROPORSI ANAK-ANAK BERUSIA 15-17 TAHUN YANG TIDAK MEMILIKI AKSES INTERNET
	Perkotaan	2,6	16,0	0,5	5,5	19,5	97,0	88,6	65,9
Perdesaan	4,9	23,6	1,3	9,3	29,4	93,7	80,8	47,3	67,1
Rumah tangga kumuh perkotaan	4,4	20,1	0,7	8,8	26,7	94,7	84,8	56,2	60,7
Rumah tangga tidak kumuh perkotaan	2,3	15,4	0,5	5,1	18,6	97,3	89,1	67,0	47,9
Rumah tangga kumuh perdesaan	13,1	37,6	4,8	15,8	39,5	85,3	68,2	32,7	84,7
Ukuran kota									
Kecil	11,5	28,5	4,7	10,2	22,9	88,2	77,7	53,9	79,6
Sedang	4,5	24,6	1,3	7,5	21,8	93,3	83,0	56,6	66,0
Besar	3,1	18,3	0,6	6,8	24,2	95,7	84,9	58,3	55,4
Metropolitan	2,8	16,1	0,5	7,1	24,7	97,2	86,9	59,4	51,9
Wilayah mega-urban									
Jabodetabek	2,8	19,2	0,4	7,3	22,9	97,4	90,1	66,5	48,7
Bandung Raya	2,2*	14,0	0,8*	8,2	21,8	98,8	86,2	70,0	52,3
Gerbangkertosusilo	2,4*	6,2	0,4*	5,2	23,5	97,0	88,7	58,6	44,0
Kedungsepur	0,7*	6,5	0,4*	6,0	25,5	98,1	88,0	50,5	43,5
Mebidangro	3,5*	20,8	0,4*	3,9	11,1	97,1	90,6	79,3	56,3
Patungraya Agung	1,4*	34,5	0,4*	7,1	23,9	94,7	83,2	59,6	58,1
Banjarkuala	0,2*	8,9	1,6*	11,2	28,2	92,5	83,8	61,4	44,0
Sarbagita	2,4*	7,3*	0,3*	2,8*	16,1	97,7	95,3	67,2	42,2
Mamminasata	9,6*	29,2	0,6*	7,1	31,2	95,9	82,7	61,2	52,9
Bimindo	1,0*	19,8	1,1*	5,4	15,9	96,7	85,4	73,6	51,7
Palapa	4,3*	27,3	0,2*	4,3	7,7	94,6	90,7	76,6	58,3
Mataram Raya	2,6*	21,2	0,2*	5,2	19,5	96,8	89,4	58,6	57,0

* Estimasi dianggap tidak dapat diandalkan. Data yang dibubuhi tanda bintang memiliki relatif standard error (RSE) lebih besar dari 30 persen dan harus digunakan dengan hati-hati.
Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.



© UNICEF/UN0506588/ljazah



© UNICEF/UN0506303/ljazah



© UNICEF/UN0506285/ljazah

Provinsi Papua memiliki persentase terbesar anak usia 5–6 tahun di perkotaan yang tidak pernah mengenyam pendidikan prasekolah dan sekolah dasar (lihat Tabel 15). Namun, provinsi dengan kesenjangan tertinggi antara perkotaan dan perdesaan adalah Maluku; prevalensi anak usia 6 tahun putus sekolah di perkotaan di sini 3,5 poin persentase lebih tinggi dari prevalensi di perdesaan provinsi ini.

TABEL 15. PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH DALAM HAL ANAK USIA 6 TAHUN YANG TIDAK PERNAH MENGENYAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH DAN SEKOLAH DASAR DI PERKOTAAN DAN KESENJANGAN ANTARA PROPORSI DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN, 2019

10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	PROPORSI ANAK-ANAK USIA 6 TAHUN YANG TIDAK PERNAH BERSEKOLAH DI PRASEKOLAH DAN SEKOLAH DASAR (%)	10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	KESENJANGAN ANTARA ANAK USIA 6 TAHUN YANG TIDAK PERNAH MENGENYAM PRASEKOLAH DAN SEKOLAH DASAR DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN (% PERKOTAAN - % PERDESAAN)
Papua	9,2	Maluku	3,5
Maluku Utara	8,1	Maluku Utara	3,1
Kalimantan Barat	7,8	Kalimantan Barat	2,4
Maluku	7,5	Kalimantan Timur	1,8
Papua Barat	6,5	Kepulauan Riau	1,3
Kepulauan Riau	6,4	Kalimantan Utara	1,3
Riau	5,8	Lampung	0,7
Kalimantan Utara	5,6	Sulawesi Tengah	0,6
Nusa Tenggara Timur	5,1	Sulawesi Selatan	0,5
Sulawesi Selatan	4,8	Bali	0,4

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

Sulawesi Barat tampak merupakan provinsi dengan proporsi terbesar anak-anak di perkotaan berusia 5–17 tahun tanpa akses Internet. Proporsi anak-anak perkotaan tanpa akses Internet di Sulawesi Barat adalah 11,7 poin persentase lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak perdesaan. Yang perlu diingat, angka ini mewakili provinsi perkotaan dengan kinerja terburuk pada indikator ini, yang sekali lagi menggarisbawahi akses internet yang jauh lebih besar dimiliki anak-anak perkotaan.

Sulawesi Barat memiliki kinerja terburuk dalam tiga dari sembilan indikator pendidikan (tingkat putus sekolah anak usia 13–15 tahun, tingkat kelulusan sekolah menengah atas anak usia 16–18 tahun, akses ke Internet) (lihat Tabel 16). Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk membantu Sulawesi Barat dalam meningkatkan tingkat pencapaian pendidikannya.

TABEL 16. PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH DALAM HAL ANAK USIA 5-17 TAHUN DI PERKOTAAN TANPA AKSES INTERNET DAN KESENJANGAN ANTARA PROPORSI DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN, 2019

10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	PROPORSI ANAK USIA 5-17 TAHUN DI PERKOTAAN TANPA AKSES INTERNET (%)	10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	KESENJANGAN ANTARA PROPORSI ANAK USIA 5-17 TAHUN TANPA AKSES INTERNET DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN (% PERKOTAAN - % PERDESAAN)
Sulawesi Barat	52,4	Sulawesi Barat	-11,7
Nusa Tenggara Barat	46,7	Jawa Tengah	-13,0
Aceh	45,4	Kalimantan Timur	-14,9
Sumatera Utara	44,4	Gorontalo	-15,2
Gorontalo	44,1	Nusa Tenggara Barat	-15,8
Nusa Tenggara Timur	43,3	Bangka Belitung	-15,9
Maluku	43,2	Sulawesi Utara	-16,9
Sumatera Selatan	42,9	Jawa Timur	-17,9
Sumatera Barat	42,8	Sumatera Utara	-18,0
Bangka Belitung	42,2	Aceh	-18,2

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

5.2.2. TANTANGAN BELAJAR DARING

Pandemi dan pembatasan pada mobilitas fisik menawarkan wawasan berharga tentang pengalaman hidup anak-anak dalam menghadapi belajar secara virtual. Selain minimnya akses internet di beberapa wilayah perkotaan di Indonesia, anak-anak di perkotaan juga dihadapkan pada banyak masalah dalam hal pendidikan daring. Dari percakapan dengan informan, sangat jelas bahwa anak-anak tidak hanya membutuhkan akses Internet untuk pengalaman belajar yang optimal, tetapi mereka juga membutuhkan teknologi canggih dan sambungan internet yang andal. Selain itu, beberapa informan juga merasa kesulitan untuk membayar kuota internet yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan pembelajaran daring sehari-hari. Dina dari Makassar, misalnya, menyebutkan bahwa dia melewatkan sesi *streaming* langsung ketika dia tidak memiliki akses Internet yang memadai atau ketika koneksi Internet tidak stabil.

Para informan juga mengkhawatirkan dan menyadari dampak jangka panjang dari pembelajaran daring terhadap pendidikan mereka. Desti dari Jakarta mengaku khawatir sekolah daring akan memperlambat kemajuan belajarnya. Senada dengannya, Dina, siswa SMK dari Makassar, mengatakan bahwa dia khawatir pembelajaran daring tidak hanya akan memengaruhi kinerja dan nilai sekolahnya, tetapi juga Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang merupakan hal penting, tetapi untuk saat ini, serba tidak pasti dan sulit untuk memenuhi persyaratannya. Seiring dengan meningkatnya tekanan dan tantangan pembelajaran daring, beberapa informan telah menyatakan preferensi untuk mengikuti pembelajaran luring, terutama untuk sekolah kejuruan yang membutuhkan sesi praktik. Beberapa informan menyatakan bahwa kurikulum sekolah mereka memiliki komponen praktik yang sulit untuk diselesaikan melalui pembelajaran daring. Seperti disebutkan sebelumnya, salah satu peserta, Ryan dari Kupang, mengatakan sekolah kejuruannya, tempat ia berada di tahun terakhirnya, belum menggunakan pembelajaran daring tetapi menerapkan protokol pencegahan COVID-19 untuk melanjutkan pembelajaran luring.

Anak-anak dan kaum muda yang berpartisipasi dalam studi juga kesulitan untuk beradaptasi dengan metode belajar daring, di mana mereka seringkali tidak dapat berinteraksi secara langsung dan lancar dengan guru dan teman sekolahnya. Misalnya, ketika menonton video rekaman dari guru mereka, mereka tidak dapat berinteraksi secara langsung dan mengajukan pertanyaan kepada guru. Dua informan di Kupang dan Jakarta mengemukakan jadwal sekolah yang tidak menentu dibandingkan dengan pengalaman belajar luring yang disebabkan oleh ketersediaan dosen yang bervariasi serta kurangnya pengawasan atau umpan balik dari guru.

Pembelajaran daring tidak hanya menimbulkan tantangan teknis, tetapi juga kekhawatiran tentang kesehatan mental, yang terkait dengan pandemi secara umum. Mengingat pembelajaran daring

menghalangi anak-anak dan kaum muda untuk berinteraksi dengan teman sekolah mereka, banyak informan melaporkan rasa cemas, bosan, dan sedih yang mereka rasakan. Meski salah satu informan, Galih dari Surakarta, mengapresiasi rasa “santai” yang ia kaitkan dengan pembelajaran daring karena ia tidak harus terburu-buru di pagi hari, yang lain mengungkapkan perasaan bosan dan sedih. Untuk menyiasatinya, Annisa dari Jakarta menghabiskan waktunya dengan menonton film bersama teman-temannya, nongkrong di salah satu rumah temannya, memasak bersama mereka atau pergi ke mall terdekat. Namun, kegiatan ini juga membuat ia dan orang-orang di sekitarnya berisiko terinfeksi COVID-19.

5.2.3. TIDAK BERSEKOLAH, TIDAK DALAM PENDIDIKAN, PEKERJAAN, ATAU PELATIHAN (NEET) DAN ASPIRASI PENDIDIKAN

Meskipun daerah perkotaan umumnya memiliki kinerja yang lebih baik daripada daerah perdesaan pada banyak indikator yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran, masih terdapat anak-anak dan kaum muda di kota yang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Selama konsultasi, beberapa informan menjelaskan bagaimana kesulitan ekonomi telah menghambat aspirasi pendidikan mereka. Doni, yang tinggal di lingkungan berpenghasilan rendah di Makassar, mengamati bahwa banyak anak muda di daerahnya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak karena tingkat pendidikan mereka yang rendah. Ilham, misalnya, yang tinggal di wilayah yang sama, pernah dua kali putus sekolah, pertama saat duduk di bangku SMP setelah itu dibantu oleh organisasi masyarakat untuk kembali bersekolah, dan kedua saat duduk di bangku sekolah menengah kejuruan. Ilham menyebut ketidakmampuan untuk membayar biaya sekolah, terutama selama masa sekolah menengah kejuruan, sebagai alasan utama putus sekolah.

Gangguan juga dapat disebabkan oleh faktor di luar ekonomi. Fadhil, informan lain yang putus sekolah, mengatakan dua kali pindah ke sekolah yang berbeda selama di SMP dan SMA setelah dikeluarkan karena berkelahi dengan teman sebaya dan absen lama. Pertengkaran dan perkelahian dengan teman sebaya adalah fenomena umum di kalangan siswa sekolah menengah perkotaan, yang tidak hanya mengganggu pembelajaran mereka, tetapi juga, seperti yang dicontohkan oleh pengalaman Fadhil, dapat menyebabkan cedera fisik. Ratih di Surakarta memutuskan untuk berhenti sekolah ketika dia duduk di kelas lima karena dia takut dengan gurunya yang sering memarahinya di kelas.

Sementara beberapa anak yang awalnya putus sekolah kemudian dapat memiliki pekerjaan atau mengikut pelatihan lain, seperti yang dicontohkan oleh kisah Ilham dan Fadhil, yang lain tidak seberuntung mereka. Ratih dan Dimas di Surakarta, masing-masing berusia 15 dan 19 tahun, tidak sedang mengenyam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan (NEET) dalam bentuk apa pun. Ratih sesekali membantu teman-temannya berjualan tas melalui WhatsApp untuk mendapatkan komisi dan orang tuanya sangat ingin dia mulai bekerja penuh waktu, meskipun dia mengaku tidak tahu di mana dan bagaimana cara mulai mencari pekerjaan.

Meskipun menghadapi banyak tantangan dalam menyelesaikan sekolah dan berprestasi di sekolah, banyak informan yang bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, beberapa dari mereka mengakui bahwa masuk ke universitas atau perguruan tinggi itu sulit, terutama mengingat keuangan mereka yang tidak mencukupi. Galih di Surakarta mengatakan bahwa rasa takut tidak masuk universitas membuat dia dan teman-temannya cemas. Namun, Fadhil di Jakarta menyadari prospek dirinya untuk menempuh jenjang perguruan tinggi karena prestasi akademiknya yang rendah dan kesulitan keuangan.

5.3. PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN

Bagian ini membahas beberapa indikator dan aspek lain yang berkaitan dengan perlindungan dari kekerasan, terutama yang berkaitan dengan Tujuan 5 (Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) dan Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat). Perlindungan dari kekerasan, harus dicatat, adalah sebuah konsep luas yang mencakup beragam indikator dan berbagai dimensi. Namun karena keterbatasan data yang ada, penelitian ini hanya berfokus pada dua indikator kuantitatif, yaitu akta kelahiran dan perkawinan anak. Seperti indikator lain yang telah dibahas sebelumnya, daerah perkotaan memiliki kinerja yang lebih baik daripada daerah perdesaan pada kedua indikator tersebut, meskipun kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan semakin

menyempit. Tim peneliti tidak mengeksplorasi pengalaman pribadi mereka tentang kekerasan dalam rumah tangga karena metode penelitian tidak memberikan protokol mitigasi dan keamanan yang memadai untuk isu terkait keselamatan atau kesejahteraan psikologis yang mungkin muncul selama percakapan mengenai hal tersebut.

- » Kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak-anak dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik di perdesaan maupun di perkotaan.
- » Meskipun perkawinan anak tampaknya sedikit menurun antara tahun 2015 dan 2019 di daerah perdesaan, praktik kawin anak di daerah perkotaan terus ada dan cenderung tidak menurun.
- » Di perkotaan, perkawinan anak lebih marak terjadi pada anak-anak yang tinggal di rumah tangga kumuh dibandingkan dengan anak yang tinggal di rumah tangga yang tidak kumuh.

5.3.1. KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN PERKAWINAN ANAK

Karena keterbatasan data tentang keadaan anak dan kaitannya dengan Tujuan 5 dan Tujuan 16, laporan ini hanya membahas dua indikator relevan yang tersedia dari SUSENAS 2019. Pertama, kepemilikan akta kelahiran anak digunakan untuk menguji indikator yang terkait dengan Tujuan 16, dan khususnya Target 16.9, yang mengupayakan “penyediaan identitas legal (dokumen kependudukan) bagi semua, termasuk akta kelahiran” pada tahun 2030. Kedua, prevalensi perkawinan anak digunakan untuk menguji Tujuan 5, dan secara khusus Target 5.3, yang bertujuan untuk “menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat pada perempuan” pada tahun 2030.

Studi ini mendefinisikan kepemilikan akta kelahiran sebagai proporsi anak usia 0–17 tahun yang dilaporkan memiliki akta kelahiran pada saat survei. Perkawinan anak didefinisikan sebagai proporsi perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun.

Kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun, baik di perdesaan maupun perkotaan. Meskipun kepemilikan akta kelahiran di antara anak-anak lebih tinggi di perkotaan, kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan telah menyempit antara 2015–2019 (lihat Tabel 17).

TABEL 17. PREVALENSI PERKAWINAN ANAK DAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PADA ANAK, 2015–2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Perkawinan anak: perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun (%)					
Persentase perkawinan anak di perkotaan	7,1	6,5	7,0	7,2	7,2
Persentase perkawinan anak di perdesaan	18,3	17,1	17,6	16,9	16,0
Anak-anak yang memiliki akta kelahiran (%)					
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran di perkotaan	86,7	87,7	88,8	88,6	89,8
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran di perdesaan	73,9	76,2	78,1	78,4	82,1

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2015–2019.

Analisis menggunakan data SUSENAS menunjukkan selisih yang mencolok antara daerah perkotaan dan perdesaan dalam hal prevalensi perkawinan anak. Meskipun perkawinan anak tampaknya sedikit menurun antara tahun 2015 dan 2019 di daerah perdesaan, praktik kawin anak di daerah perkotaan

terus ada dan cenderung tidak menurun.. Namun, penting untuk dicatat bahwa perkawinan anak pada tahun 2019 secara signifikan lebih rendah di daerah perkotaan (7,2 persen) dibandingkan dengan daerah perdesaan (16 persen).

Di daerah perkotaan, prevalensi perkawinan anak lebih tinggi di antara anak-anak yang tinggal di rumah tangga kumuh (15 persen), dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di rumah tangga tidak kumuh (6 persen) (lihat Tabel 18). Prevalensi perkawinan anak juga menurun seiring dengan meningkatnya ukuran kota. Selain itu, Banjarkabula tampaknya merupakan wilayah mega-urban dengan prevalensi pernikahan anak tertinggi (20 persen), diikuti oleh Mataram Raya (15 persen).

TABEL 18. PREVALENSI PERKAWINAN ANAK DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK, MENURUT KLASIFIKASI PERKOTAAN/PERDESAAN, KOTA DAN MEGA-URBAN, 2019

JENIS TEMPAT	PERKAWINAN ANAK: PEREMPUAN BERUSIA 20–24 TAHUN YANG MENIKAH SEBELUM USIA 18 TAHUN (%)	ANAK-ANAK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN (%)
Perkotaan	7,2	89,8
Perdesaan	16,0	82,1
Rumah tangga kumuh perkotaan	15,1	83,2
Rumah tangga tidak kumuh perkotaan	6,2	90,7
Rumah tangga kumuh perdesaan	20,1	63,3
Ukuran kota		
Kecil	15,4	75,5
Sedang	12,4	84,1
Besar	11,4	88,9
Metropolitan	9,6	87,1
Wilayah mega-urban		
Jabodetabek	3,0	87,7
Bandung Raya	13,0	84,6
Gerbangkertosusilo	5,8	92,9
Kedungsepur	7,2	95,7
Mebidangro	4,3	78,8
Patungraya Agung	10,6	84,7
Banjarkabula	20,0	87,3
Sarbagita	6,6	92,9
Maminasata	8,6	89,0
Bimindo	5,9	89,5
Palapa	3,4	87,4
Mataram Raya	15,3	80,8

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019

Dalam klasifikasi kota dan mega-urban, ketika prevalensi perkawinan anak tampaknya secara konsisten lebih rendah di daerah perkotaan, kepemilikan akta kelahiran ditemukan secara konsisten lebih tinggi.

Di antara wilayah mega-urban, Bandung Raya dan Kedungsepur tampaknya memiliki kesenjangan terkecil antara daerah perdesaan dan perkotaan dalam hal kepemilikan akta kelahiran (Lampiran 14).

Di antara semua provinsi, anak-anak di daerah perkotaan di Nusa Tenggara Timur adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk memiliki akta kelahiran (76 persen) (lihat Tabel 19). Namun, jika dilihat dari kesenjangan kepemilikan akta kelahiran antara perkotaan dan perdesaan, daerah perkotaan di Kepulauan Riau tampaknya paling tertinggal. Di sini, nilai negatif dari kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan menunjukkan cakupan yang lebih rendah di daerah perkotaan daripada daerah perdesaan dalam satu provinsi.

TABEL 19. PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH DALAM HAL KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK DAN KESENJANGANNYA ANTARA PROPORSI DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN, 2019

10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	PROPORSI ANAK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN DI DAERAH PERKOTAAN (%)	10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	KESENJANGAN ANTARA PROPORSI ANAK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN (% PERKOTAAN - % PERDESAAN)
Nusa Tenggara Timur	76,2	Kepulauan Riau	-1,4
Sumatera Utara	81,0	DI Yogyakarta	-0,9
Papua	83,6	Lampung	0,2
Riau	83,9	Jawa Tengah	1,6
Jawa Barat	85,1	Bengkulu	1,6
Papua Barat	85,9	Bangka Belitung	2,1
Maluku	86,0	Bali	2,4
Nusa Tenggara Barat	87,6	Kalimantan Selatan	2,7
Banten	87,8	Sulawesi Selatan	3,2
Sulawesi Tengah	88,0	Sulawesi Barat	3,2

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

Di seluruh provinsi, prevalensi perkawinan anak di perkotaan tertinggi ditemukan di Sulawesi Barat (18 persen) (lihat Tabel 20). Meskipun begitu, penting untuk dicatat bahwa analisis komparatif perkawinan anak di perkotaan dan perdesaan menunjukkan bahwa 10 provinsi dengan kinerja terburuk menunjukkan tingkat perkawinan anak yang lebih rendah di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. Angka-angka ini semakin menegaskan bahwa perkawinan anak secara konsisten lebih tinggi di daerah perdesaan.

TABEL 20. PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH DALAM HAL PREVALENSI PERKAWINAN ANAK DAN KESENJANGANNYA ANTARA PROPORSI DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN, 2019

10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	PREVALENSI PERKAWINAN ANAK DI PERKOTAAN (%)	10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	KESENJANGAN ANTARA PREVALENSI PERKAWINAN ANAK DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN (% PERKOTAAN - % PERDESAAN)
Sulawesi Barat	18,3	Kepulauan Riau	-1,1
Kalimantan Selatan	14,1	DI Yogyakarta	-3,9
Nusa Tenggara Barat	12,8	Lampung	-4,5
Bangka Belitung	12,4	Jawa Tengah	-4,7
Kalimantan Barat	10,9	Bengkulu	-4,9
Sulawesi Tenggara	10,8	Bangka Belitung	-5,1
Papua Barat	10,0	Bali	-5,6
Kalimantan Tengah	10,0	Kalimantan Selatan	-5,6
Jawa Barat	9,7	Sulawesi Selatan	-6,0
Kalimantan Timur	9,0	Sulawesi Barat	-6,1

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

5.3.2. PERSEPSI TENTANG PERNIKAHAN

Selama konsultasi dengan kaum muda, beberapa percakapan menyentuh gagasan soal pernikahan dan persepsi peserta tentang hal ini, meskipun harus diakui masalah ini hanya sedikit dieksplorasi. Desti dari Jakarta, misalnya, memiliki saudara perempuan yang menikah pada usia 17 tahun. Berkaca pada peristiwa ini, Desti lebih memilih untuk tidak menikah di usia muda karena ia bercita-cita memiliki kebebasan lebih untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik tanpa beban daripada harus merawat anak. Lebih lanjut, Desti prihatin dengan dampak pernikahan dini terhadap pendidikan saudaranya, terutama karena perempuan yang menikah dan hamil di usia muda cenderung dikeluarkan dari sekolah.

Namun, peserta, lain terutama orang dewasa muda, umumnya memiliki pandangan positif terhadap pernikahan. Annisa, 22, seorang buruh pabrik di Jakarta, ingin segera menikah karena lebih memilih tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Dia menunjukkan bahwa ide-idenya tentang pernikahan dan peran domestik perempuan dalam rumah tangga juga dimiliki oleh rekan-rekan perempuannya. Ilham, dari Makassar, juga menantikan pernikahan melalui taaruf (pernikahan yang diatur oleh perantara, seringkali ulama) dalam waktu dekat. Dia ingin segera menikah karena dia adalah anggota termuda dari keluarganya dan dia ingin ibunya ada di sana saat pernikahannya.

5.3.3. KEAMANAN DAN PAPARAN TERHADAP KEKERASAN

Dari hasil konsultasi menunjukkan bahwa para peserta sangat menganggap penting rasa aman di rumah dan lingkungan mereka, dan bahwa keselamatan merupakan aspek penting dari kesejahteraan bagi mereka. Informan yang lebih muda menyebutkan kehadiran orang dewasa setiap kali mereka mengikuti kegiatan di sekitar lingkungan sebagai salah satu faktor yang membuat mereka merasa aman. Informan lain juga mengomentari tidak adanya kekerasan, seperti tawuran dan perampokan, sebagai faktor yang berkontribusi terhadap persepsi keamanan di lingkungan mereka. Peserta dari Kupang, Makassar dan Jakarta mencontohkan bahwa tawuran kerap terjadi di lingkungan mereka. Informan di Kupang dan Makassar menyatakan bahwa konflik kebanyakan dipicu oleh perselisihan kecil. Di Makassar, Ilham melihat frekuensi tawuran sudah berkurang, meski tidak tahu apa penyebab perubahan tersebut. Dia juga menyebutkan bahwa, di masa lalu, dia jarang pergi ke luar lingkungan tempat tinggal karena takut akan

pembalasan. Keluarganya bahkan pindah kembali ke desa mereka di beberapa titik karena orang tuanya juga takut akan pembalasan. Seringnya tawuran di masa lalu membuat lingkungannya terkenal di Makassar. Selain itu, Marta dari Kupang, yang tinggal bersama keluarga besarnya, merefleksikan pentingnya ruang aman di dalam rumahnya saat ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari bibinya. Dia merasa aman hanya jika ia berada di kamar tidurnya, karena ini adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa sendirian.

Konsultasi ini juga mengungkapkan bahwa anak-anak dan kaum muda sering mengalami kekerasan publik di lingkungan mereka. Selain tawuran dan pertengkaran, anak-anak dan kaum muda juga menyaksikan berbagai jenis kekerasan publik yang terjadi di sekitar mereka.

Firly, 16, dari Surakarta, mengatakan bahwa dia telah dilecehkan oleh tetangga dewasa sejak dia masih kecil dan sekarang merasa takut untuk berjalan di dekat rumah tetangga. Dia tidak melaporkan kejadian ini kepada keluarganya atau orang dewasa lainnya karena dia takut mereka tidak percaya. Ia juga prihatin dengan pengalaman perempuan muda lain seperti dirinya yang juga mengalami pelecehan, terutama kekerasan seksual. Dia menyebutkan sebuah cerita tentang seorang anak yang memiliki disabilitas mental di lingkungannya yang mengalami pelecehan seksual. Dia menceritakan bahwa orang-orang di lingkungannya ragu-ragu untuk melaporkan kasus ini, karena takut hal ini akan menciptakan ketidakharmonisan di antara tetangga.

Kekerasan juga mempengaruhi hasil pendidikan anak-anak dan kaum muda karena mereka mengkhawatirkan keselamatan mereka di sekolah. Beberapa peserta menyebutkan pengalaman langsung mengalami kekerasan dan menyaksikan kekerasan di sekolah. Firly, misalnya, mengamati bahwa anak-anak penyandang disabilitas lebih berpeluang mengalami perundungan di sekolahnya. Ratih, dari Surakarta, berbagi pengalaman pernah diperlakukan tidak baik oleh gurunya saat duduk di bangku sekolah dasar. Keluarganya tidak melaporkan kejadian ini ke sekolah karena mereka terlalu takut untuk melakukannya. Pada saat wawancara, Ratih telah meninggalkan sekolah dasar tersebut dan tidak ingin melanjutkan pendidikannya.

5.4. AKSES KE AIR DAN SANITASI

Bagian ini membahas temuan terkait TPB Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi). Dari data SUSENAS, studi ini menyajikan gambaran umum akses anak terhadap air dan sanitasi. Studi ini menggunakan definisi formal BPS tentang "air minum layak" yang tidak memasukkan air minum dalam kemasan dan air isi ulang, yang dapat menjelaskan perbedaan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Meskipun akses terhadap air bersih lebih tinggi di daerah perdesaan, anak-anak di daerah perkotaan lebih berpeluang memiliki akses terhadap sanitasi layak daripada anak-anak di daerah perdesaan. Ini adalah pola yang mirip dengan indikator lain di bagian sebelumnya. Dengan menggunakan data dari konsultasi, penelitian ini mengkaji sumber dan akses terhadap air yang dimiliki informan serta penilaian mereka terhadap kualitas air yang mereka konsumsi. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa banyak warga kota yang masih kesulitan untuk mendapatkan akses pasokan air bersih yang dapat diandalkan.

- » Antara tahun 2015 dan 2019, proporsi jumlah anak-anak yang tinggal di rumah tangga dengan air minum yang layak mengalami penurunan. Namun, hal ini mungkin dapat dijelaskan dengan adanya peningkatan penggunaan air isi ulang bermerek dan praktik isi ulang tangki air, yang merupakan dua sumber yang tidak termasuk dalam definisi air minum layak menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
- » Sebaliknya, akses terhadap sanitasi layak tampaknya telah meningkat antara tahun 2015 hingga 2019, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.
- » Akses ke sanitasi layak masih menjadi masalah yang jauh lebih besar di daerah perdesaan.

5.4.1. AIR DAN SANITASI LAYAK

Studi ini mengkaji dua indikator yang menyajikan informasi tentang lingkungan tempat tinggal anak, yaitu proporsi anak yang tinggal di rumah tangga dengan air dan sanitasi yang layak. Yang dimaksud dengan "air minum yang layak" adalah rumah tangga yang sumber utama air minumnya adalah:

- » keran
- » pompa bor/sumur
- » air hujan yang diperoleh dari sumber dalam jarak 10 meter dari rumah

Definisi ini tidak termasuk air dalam kemasan dan air isi ulang bermerek, atau air sumur, mata air atau perairan terbuka yang tidak terlindungi. Selain itu, "sanitasi yang layak" didefinisikan sebagai rumah tangga yang memiliki toilet pribadi atau jamban bersama, dan yang menggunakan jamban tipe siphon dan tangki septik.

Antara tahun 2015 dan 2019, jumlah anak yang tinggal di rumah tangga dengan air minum yang layak turun dari 37,4 persen menjadi 30,5 persen. Namun, penurunan ini mungkin disebabkan oleh peningkatan penggunaan air kemasan bermerek dan air isi ulang. Hal ini dapat membantu menjelaskan mengapa anak-anak perdesaan memiliki akses yang lebih besar ke air minum layak daripada anak-anak perkotaan.

Sebaliknya, akses terhadap sanitasi yang layak tampaknya telah meningkat antara tahun 2015 dan 2019 baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Meskipun demikian, akses ke sanitasi yang layak tetap jauh lebih besar di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan (masing-masing 81,8 persen berbanding 56,4 persen) (lihat Tabel 21).

TABEL 21. PROPORSI ANAK-ANAK YANG TINGGAL DI RUMAH TANGGA DENGAN AIR MINUM LAYAK DAN SANITASI LAYAK, 2015–2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Anak-anak (0–17 tahun) yang tinggal di rumah tangga dengan air minum layak (%)					
Persentase anak di perkotaan	94,9	94,1	94,1	93,8	95,0
Persentase anak di perdesaan	77,4	76,0	78,4	78,7	80,2
Anak-anak (0–17 tahun) yang tinggal di rumah tangga dengan sanitasi yang layak (%)					
Persentase anak di perkotaan	75,1	80,3	79,8	80,3	81,8
Persentase anak di perdesaan	46,5	53,4	52,5	55,1	56,4

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2015–2019.

Akses ke sanitasi yang layak adalah masalah yang jauh lebih besar di daerah perdesaan. Bahkan anak-anak di rumah tangga kumuh perkotaan tampaknya memiliki akses yang lebih baik ke sanitasi yang layak (68 persen) daripada mereka yang tinggal di rumah tangga kumuh perdesaan (23 persen) (lihat Tabel 22). Proporsi anak yang tinggal di rumah tangga dengan sanitasi yang layak juga meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran kota. Selain itu, Sarbagita (96 persen) memiliki persentase tertinggi anak dengan sanitasi yang layak di antara wilayah mega-urban yang dibahas dalam penelitian ini.

TABEL 22. PROPORSI ANAK-ANAK YANG TINGGAL DI RUMAH TANGGA DENGAN AIR MINUM YANG LAYAK DAN SANITASI YANG LAYAK, MENURUT KLASIFIKASI PERKOTAAN/PERDESAAN, KOTA DAN MEGA-URBAN, 2019

JENIS TEMPAT	ANAK-ANAK (0–17 TAHUN) YANG TINGGAL DI RUMAH TANGGA DENGAN AIR MINUM LAYAK (%)	ANAK-ANAK (0–17 TAHUN) YANG TINGGAL DI RUMAH TANGGA DENGAN SANITASI YANG LAYAK (%)
Perkotaan	95,0	81,8
Perdesaan	80,2	56,4
Rumah tangga kumuh perkotaan	78,9	67,9
Rumah tangga tidak kumuh perkotaan	95,8	83,9
Rumah tangga kumuh perdesaan	54,6	23,4
Ukuran kota		
Kecil	65,9	51,3
Sedang	81,0	64,5
Besar	86,1	71,8
Metropolitan	94,8	74,1
Wilayah mega-urban		
Jabodetabek	97,8	83,6
Bandung Raya	96,9	64,0
Gerbangkertosusilo	96,1	85,4
Kedungsepur	93,3	86,4
Mebidangro	98,1	93,2
Patungraya Agung	83,7	75,3
Banjarbakula	76,3	59,8
Sarbagita	99,0	96,3
Maminasata	98,3	93,0
Bimindo	92,0	86,1
Palapa	93,3	67,7
Mataram Raya	95,8	76,3

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

Ketika melihat cakupan anak-anak yang tinggal di rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang layak di daerah perkotaan dan perdesaan dalam klasifikasi kota, terbukti semua angkanya lebih tinggi di daerah perdesaan. Namun, kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dalam jenis kota yang sama meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran kota.

Pola sebaliknya ditemukan untuk anak-anak yang tinggal di rumah tangga dengan sanitasi yang layak; persentasenya lebih tinggi di perkotaan daripada di perdesaan terlepas dari ukuran kota. Anak-anak di semua wilayah mega-urban juga tampaknya memiliki akses yang lebih baik ke sanitasi yang layak jika mereka tinggal di wilayah perkotaan daripada di perdesaan (Lampiran 15).

Di semua provinsi, Kalimantan Utara memiliki persentase terendah dalam hal anak-anak yang tinggal di rumah tangga dengan air minum layak (lihat Tabel 23). Data SUSENAS juga mengungkapkan bahwa proporsi anak-anak yang memiliki akses terhadap air minum yang layak lebih rendah di daerah perkotaan di kebanyakan provinsi. Namun, kesenjangan tertinggi antara anak-anak perkotaan dan perdesaan yang memiliki akses terhadap air minum layak ditemukan di Bali. Selain itu, Kalimantan Utara menempati peringkat kesepuluh sebagai provinsi dengan kesenjangan terbesar antara angka di perkotaan dan perdesaan.

TABEL 23. PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH DALAM HAL ANAK-ANAK YANG TINGGAL DI DAERAH PERKOTAAN YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK DAN KESENJANGAN ANTARA PROPORSI DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN, 2019

10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	PROPORSI ANAK-ANAK YANG TINGGAL DI RUMAH TANGGA DENGAN AIR MINUM LAYAK DI DAERAH PERKOTAAN (%)	10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	KESENJANGAN ANTARA PROPORSI ANAK-ANAK YANG TINGGAL DI RUMAH TANGGA DENGAN AIR MINUM LAYAK DI DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN (% PERKOTAAN - % PERDESAAN)
Kalimantan Barat	46.0	Gorontalo	2.1
Kalimantan Utara	75.9	Lampung	2.8
Bangka Belitung	82.3	Nusa Tenggara Barat	3.2
Bengkulu	83.4	Jawa Timur	4.2
Jambi	84.1	Sulawesi Utara	4.7
Papua	85.4	Jawa Tengah	5.5
Kalimantan Tengah	85.5	Sulawesi Tenggara	8.3
Kalimantan Selatan	85.9	Bengkulu	8.5
Riau	86.2	Bangka Belitung	8.6
Lampung	86.9	Maluku	8.7

Source: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

Untuk indikator sanitasi layak, Jawa Barat tampaknya memiliki porsi terkecil dalam hal anak-anak di perkotaan yang tinggal di rumah tangga dengan sanitasi layak. Namun, untuk semua provinsi, proporsi anak-anak yang memiliki akses terhadap sanitasi layak lebih tinggi di perkotaan daripada di perdesaan.

5.4.2. SUMBER DAN KUALITAS AIR

Sebagian besar peserta menyebutkan air galon yang dikemas dan didistribusikan oleh pihak swasta sebagai sumber air minum mereka. Atau, beberapa peserta merebus air ledeng untuk diminum. Untuk keperluan cuci dan bersih-bersih, peserta di semua lokasi penelitian menggunakan air ledeng dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pengecualian ditemukan di Jakarta, Surakarta, dan Makassar di mana air cuci dan bersih-bersih diambil dari sungai atau air tanah, atau diperoleh dari penjual air setempat. Pengadaan dari penjual air juga ditemukan di antara peserta dari Kupang. Karena terkadang terjadi pemadaman air, peserta dari Kupang seringkali harus membeli air dari pedagang atau membeli dari tetangga mereka. Penjual air sudah umum ditemukan

di Jakarta, Kupang dan Makassar, di mana mereka menjual air dari tangki di mobil mereka. Ilham di Makassar mendapat air dari tetangganya yang memiliki pasokan dari air ledeng, dan dia menyimpan gerobak dengan jerigen di luar rumahnya untuk keperluan sehari-hari. Peserta yang membeli air untuk keperluan sehari-hari harus membayar antara Rp10.000 – 20.000 (menggunakan wadah air kecil) di Jakarta dan Makassar dan sekitar Rp70.000 (untuk satu tangki air) di Kupang.

Ada hubungan antara jenis sumber air dan lokasi lingkungan, yang karenanya juga terkait dengan latar belakang sosial ekonomi peserta. Sebagian besar peserta memiliki akses air ledeng di rumah tangganya, kecuali masing-masing satu peserta di Jakarta, Makassar dan Surakarta. Untuk keperluan cuci dan bersih-bersih, peserta di semua lokasi penelitian menggunakan air ledeng dari Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM). Pengecualian ditemukan di Jakarta, Surakarta, dan Makassar di mana air cuci dan bersih-bersih diambil dari sungai atau air tanah, atau diperoleh dari penjual air setempat. Pengadaan dari penjual air juga ditemukan di antara peserta dari Kupang. Karena terkadang terjadi pemadaman air, peserta dari Kupang seringkali harus membeli air dari pedagang atau membeli dari tetangga mereka. Penjual air sudah umum ditemukan di Jakarta, Kupang dan Makassar, di mana mereka menjual air dari tangki di mobil mereka. Ilham di Makassar mendapat air dari tetangganya yang memiliki pasokan dari air ledeng, dan dia menyimpan gerobak dengan jerigen di luar rumahnya untuk keperluan sehari-hari. Peserta yang membeli air untuk keperluan sehari-hari harus membayar antara Rp10.000 – 20.000 (menggunakan wadah air kecil) di Jakarta dan Makassar dan sekitar Rp70.000 (untuk satu tangki air) di Kupang.

5.5. KEMISKINAN DAN SERBA KEKURANGAN

Bagian ini membahas kemiskinan di kalangan anak-anak dan kaum muda, dan berfokus pada kurangnya pendapatan dan kaitannya dengan TPB Tujuan 1 (Penghapusan Kemiskinan). Tim peneliti menggunakan data dari SUSENAS untuk menyajikan gambaran indikator ekonomi anak-anak dan untuk membandingkan kinerja daerah perdesaan dan perkotaan serta rumah tangga kumuh dan tidak kumuh. Melihat data dari lima tahun terakhir, telah terjadi kemajuan substansial dalam pengurangan kemiskinan, yang akibatnya juga mengurangi jumlah anak yang hidup dalam kemiskinan. Namun, secara umum, anak-anak masih terwakili secara tidak proporsional di antara kelompok termiskin. Selain itu, anak-anak di daerah perkotaan masih lebih kecil kemungkinannya untuk tinggal di rumah tangga miskin atau hampir miskin dibandingkan anak-anak di daerah perdesaan. Di dalam perkotaan sendiri, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah anak yang hidup dalam kemiskinan di kawasan kumuh dan tidak kumuh.

Konsultasi yang dilakukan selama studi ini menawarkan wawasan berharga tentang pengalaman hidup anak-anak miskin di kota, terutama karena perekrutan responden sengaja ditujukan untuk anak-anak dan kaum muda dari latar belakang sosial ekonomi rendah dan lingkungan miskin. Kisah-kisah mereka menyajikan contoh-contoh nyata tentang dampak kemiskinan dan kesulitan keuangan terhadap kehidupan anak-anak dan kaum muda. Bagian ini juga mempertimbangkan bagaimana anak-anak dan kaum muda mengatasi dan mengelola kekurangan pendapatan dan membahas peran intervensi Pemerintah selama ini.

- » Studi ini menemukan bahwa tingkat kemiskinan anak – yang didefinisikan sebagai persentase anak yang hidup di bawah garis kemiskinan, atau yang termasuk dalam 40 persen berpendapatan terendah – lebih rendah di daerah perkotaan Indonesia, dibandingkan dengan di daerah perdesaan.
- » Meskipun kota-kota menunjukkan proporsi anak-anak miskin yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah perdesaan, kemiskinan perkotaan tetap menjadi masalah di kota-kota di seluruh Indonesia.
- » Mayoritas informan dari konsultasi melaporkan pernah menerima bantuan dari setidaknya satu jenis program bantuan sosial selama pandemi.

5.5.1. TINGKAT KEMISKINAN ANAK DI INDONESIA

Berdasarkan garis kemiskinan nasional, angka kemiskinan Indonesia telah menurun dalam satu dekade terakhir, mencapai sekitar 9 persen pada tahun 2019. Terlepas dari pencapaian tersebut, anak-anak tetap rentan terhadap kemiskinan. Pada tahun 2019, misalnya, BPS mengidentifikasi bahwa sekitar 12 persen anak-anak dan remaja hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dibandingkan dengan 8 persen orang dewasa berusia 18 tahun ke atas (BPS, 2019).

Studi ini menemukan bahwa tingkat kemiskinan anak – yang didefinisikan sebagai persentase anak yang hidup di bawah garis kemiskinan atau sebagai bagian dari 40 persen penduduk berpendapatan terendah – lebih rendah di daerah perkotaan Indonesia dibandingkan dengan daerah perdesaan (lihat Tabel 24). Studi ini menggunakan indikator anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan untuk mewakili anak-anak yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Indikator anak-anak yang masuk ke dalam 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah termasuk anak-anak yang tinggal di rumah tangga yang berisiko menjadi miskin atau hampir miskin. Proporsi anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan telah menurun antara 2015–2019, dengan tingkat penurunan yang lebih cepat di perkotaan daripada di perdesaan. Namun, persentase anak-anak yang masuk ke dalam 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah antara 2015–2019. Laju peningkatan indikator ini tampaknya lebih tinggi di daerah perkotaan. Karena 40 persen penduduk berpendapatan terendah ditentukan dengan menggunakan data pendapatan tingkat rumah tangga, bukan dengan data dari masing-masing anak, persentase anak-anak yang masuk ke dalam 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah mungkin tidak selalu masuk ke 40 persen.

TABEL 24. PROPORSI ANAK-ANAK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL DAN YANG MASUK KE DALAM 40 PERSEN PENDUDUK DENGAN PENDAPATAN TERENDAH, 2015–2019

	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
Anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan di perkotaan	10,3	9,8	9,9	8,9	8,7
Anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan di perdesaan	16,9	16,8	16,7	15,7	15,5
Anak-anak yang masuk ke dalam 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah di perkotaan	35,3	35,8	36,9	36,8	37,3
Anak-anak yang masuk ke dalam 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah di perdesaan	54,7	54,8	54,8	55,2	55,6

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2015-2019.

Meskipun proporsi keseluruhan anak yang hidup di bawah garis kemiskinan di perkotaan lebih rendah daripada di daerah perdesaan, persentase anak yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerah perkotaan jauh lebih tinggi (18 persen) di rumah tangga kumuh daripada mereka yang tinggal di rumah tangga tidak kumuh (7 persen). Selain itu, proporsi anak-anak yang tinggal di rumah tangga kumuh perdesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah dua kali lipat dari anak-anak yang tinggal di rumah tangga kumuh perkotaan (36 persen). Angka-angka ini menunjukkan kesenjangan kemiskinan yang cukup besar antara anak-anak yang tinggal di rumah tangga kumuh dan mereka yang tidak tinggal di daerah perkotaan, tetapi hal ini sudah diprediksi, mengingat definisi kumuh ditentukan oleh rendahnya kapasitas sosial ekonomi rumah tangga. Meskipun demikian, terdapat pula kesenjangan anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan antara daerah kumuh perkotaan dan perdesaan. Melihat klasifikasi kota, jumlah anak yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat seiring dengan semakin kecil ukuran kota. Selain itu, di antara wilayah mega-urban yang diteliti dalam studi ini, persentase anak di bawah garis kemiskinan tertinggi adalah di Patungraya Agung (13 persen), dan Mataram Raya (12 persen).

Proporsi anak-anak yang masuk ke dalam 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah juga menunjukkan pola yang sama. Meskipun persentase anak-anak yang masuk ke dalam 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah di daerah kumuh perkotaan (52 persen) lebih tinggi dari daerah tidak kumuh di perkotaan (35 persen), proporsinya masih lebih tinggi untuk mereka yang tinggal di daerah kumuh perdesaan (78 persen). Tingkat anak-anak yang masuk ke dalam 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah juga meningkat seiring dengan semakin kecil ukuran kota. Namun, perbedaan angka tersebut tidak sebesar persentase anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Patungraya Agung tampak memiliki tingkat tertinggi di antara daerah mega-urban, tetapi persentase tertinggi kedua dari anak-anak yang masuk ke dalam 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah ditemukan di Bandung Raya. Di antara semua klasifikasi kota dan kota besar, indikator kemiskinan dan kerentanan anak lebih tinggi di daerah perdesaan (lihat Tabel 25).

TABEL 25. PROPORSI ANAK-ANAK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL DAN YANG MASUK KE DALAM 40 PERSEN PENDUDUK DENGAN PENDAPATAN TERENDAH, MENURUT KLASIFIKASI PERKOTAAN/PERDESAAN, KOTA DAN MEGA-URBAN, 2019.

JENIS TEMPAT	BAGIAN DARI ANAK-ANAK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN (%)	PROPORSI ANAK-ANAK YANG MASUK KE DALAM 40 PERSEN PENDUDUK DENGAN PENDAPATAN TERENDAH (%)
Perkotaan	8,7	37,3
Perdesaan	15,5	55,6
Rumah tangga kumuh perkotaan	17,6	51,9
Rumah tangga tidak kumuh perkotaan	7,3	35,1
Rumah tangga kumuh perdesaan	35,8	78,1
Ukuran kota		
Kecil	25,7	52,6
Sedang	13,9	48,2
Besar	12,8	48,5
Metropolitan	9,3	42,6
Wilayah mega-urban		
Jabodetabek	4,7	22,2
Bandung Raya	7,1	46,5
Gerbangkertosusilo	5,0	30
Kedungsepur	8,6	45,9
Mebidangro	7,3	33,4
Patungraya Agung	13,3	46,6
Banjarbakula	5,2	32,1
Sarbagita	0,4	18,7
Maminasata	6,7	45,7
Bimindo	7,8	39,6
Palapa	5,5	25,9
Mataram Raya	12,3	44,8

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.



© UNICEF/UN0409851/Bea

Anak-anak di Nusa Tenggara Barat lebih dirugikan dalam hal kemiskinan anak dibandingkan provinsi lain. Persentase anak yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerah perkotaan di Nusa Tenggara Barat tampaknya paling tinggi (lihat Tabel 26). Kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan di sini menunjukkan angka positif, yang menunjukkan bahwa proporsi anak yang hidup di bawah garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan. Rasio ini juga diamati di Jambi.

TABEL 26. PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH DENGAN ANAK-ANAK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN DI WILAYAH PERKOTAAN DAN KESENJANGAN ANTARA PROPORSI DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN, 2019

10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	PROPORSI ANAK-ANAK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN DI DAERAH PERKOTAAN (%)	10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	KESENJANGAN ANTARA PROPORSI ANAK-ANAK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN DI DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN (% PERKOTAAN – % PERDESAAN)
Nusa Tenggara Barat	19,6	Jambi	4,2
Bengkulu	16,8	Nusa Tenggara Barat	3,9
Sumatera Selatan	15,8	Riau	-0,1
DI Yogyakarta	13,0	Kalimantan Tengah	-0,4
Aceh	13,0	Sumatera Selatan	-0,5
Jambi	12,6	Sumatera Utara	-0,6
Sulawesi Tengah	12,6	DI Yogyakarta	-1,2
Nusa Tenggara Timur	12,4	Bali	-1,6
Sulawesi Barat	12,4	Bengkulu	-1,7
Sumatera Utara	12,1	Sulawesi Barat	-2,1

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

Untuk anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan, Sulawesi Barat tampaknya memiliki kinerja yang paling buruk dalam hal persentase anak-anak yang masuk ke dalam 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah. Namun, kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan adalah negatif, yang mencerminkan tingkat yang lebih tinggi di perdesaan daripada daerah perkotaan (lihat Tabel 27).

Oleh karena itu, tingginya persentase anak-anak yang masuk ke dalam 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah di Sulawesi Barat tidak serta merta mencerminkan masalah ini hanya terjadi di daerah perkotaan provinsi, melainkan merupakan masalah kerentanan pendapatan di seluruh provinsi tersebut.

TABEL 27. PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH DALAM HAL ANAK-ANAK YANG MASUK KE DALAM 40 PERSEN PENDUDUK DENGAN PENDAPATAN TERENDAH DI DAERAH PERKOTAAN DAN KESENJANGAN ANTARA PROPORSI DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN, 2019

10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	PROPORSI ANAK-ANAK YANG MASUK KE DALAM 40 PERSEN PENDUDUK DENGAN PENDAPATAN TERENDAH DI DAERAH PERKOTAAN (%)	10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	KESENJANGAN ANTARA PROPORSI ANAK-ANAK YANG MASUK KE DALAM 40 PERSEN PENDUDUK DENGAN PENDAPATAN TERENDAH DI DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN (% PERKOTAAN – % PERDESAAN)
Sulawesi Barat	58.3	Kalimantan Tengah	0.1
Nusa Tenggara Barat	52.8	Nusa Tenggara Barat	-0.9
Jawa Tengah	51.4	Bangka Belitung	-5.3
Gorontalo	47.3	Jawa Tengah	-6.7
Sulawesi Tenggara	46.5	Kalimantan Timur	-7.9
Nusa Tenggara Timur	45.1	Riau	-8.5
Sumatera Selatan	45.0	Sumatera Utara	-10.7
Sulawesi Selatan	43.6	Sulawesi Utara	-10.8
Jawa Barat	42.4	Sulawesi Barat	-11.0
Sulawesi Utara	42.3	Jawa Barat	-11.1

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

5.5.2. KE(TIDAK)AMANAN PEKERJAAN DAN KE(TIDAK)STABILAN PENDAPATAN

Meskipun kota pada umumnya memiliki proporsi anak yang hidup dalam kemiskinan yang lebih rendah daripada daerah perdesaan, kemiskinan perkotaan itu sendiri merupakan masalah yang terus-menerus terjadi di kota-kota di seluruh Indonesia. Terdapat kantong-kantong komunitas dan lingkungan di perkotaan yang berjuang menghadapi kemiskinan kronis, yang tercermin dari data yang didapat dari peserta penelitian ini. Kemiskinan pendapatan adalah tema yang berulang dan terus-menerus dari mereka, yang sebagian besar disebabkan oleh tujuan dan kriteria pemilihan studi ini (lihat metodologi). Wawasan dari pengalaman informan dan perspektif mereka tentang cara mengatasi kerawanan ekonomi menyajikan gambaran yang jelas tentang kemiskinan perkotaan dan karakteristiknya. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bagaimana kesulitan keuangan mempengaruhi kehidupan para informan ini dan bagaimana hal ini berkontribusi pada bentuk-bentuk kekurangan lain dalam hidup mereka. Dalam banyak kasus, kemiskinan menghambat kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan menghalangi mereka untuk mencapai cita-cita mereka.

Mayoritas orang tua informan bekerja di sektor informal sebagai buruh harian lepas atau buka usaha di industri rumahan. Selain itu, sebagian besar informan berasal dari keluarga di mana lebih dari satu anggota keluarga terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan untuk menghidupi keluarga. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pekerjaan sebagai tukang parkir (Surakarta), buruh bangunan (Makassar), ojek online (Jakarta), pedagang makanan dan buah (Makassar, Jakarta), penjahit (Jakarta), petani (Makassar), tukang kayu (Kupang), nelayan. (Jakarta), dan mekanik (Kupang). Beberapa informan juga memiliki saudara kandung yang melakukan berbagai pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Dina di Makassar menceritakan bahwa mata pencaharian utama orang tuanya adalah bekerja sebagai petani, tetapi ayah dan ibunya juga melakukan kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan, yaitu menjadi buruh bangunan dan berdagang makanan. Dina bekerja paruh waktu dengan tetangganya untuk tambahan uang saku bulanan yang diterima dari orang tuanya.

Dari hasil konsultasi studi ini ditemukan bahwa empat anak muda bekerja penuh waktu, sementara lima informan lainnya (berusia 16–20 tahun) mengenyam sekolah/kuliah sambil mencari penghasilan tambahan. Para informan mengatakan mereka bekerja terutama untuk mendapatkan penghasilan, tetapi beberapa

dari mereka mengatakan bahwa mereka juga ingin memperoleh beberapa keterampilan dari bekerja. Ryan di Kupang, misalnya, bekerja di bengkel pamannya, yang memberinya pengalaman langsung dalam perbaikan otomotif, yang mana sejalan dengan pelatihannya di sekolah kejuruan. Bagi informan yang masih sekolah, penghasilan tambahan tersebut terutama digunakan untuk menutupi biaya sekolah/kuliah dan untuk membantu ekonomi keluarga.

Pekerjaan para informan cenderung mencerminkan pekerjaan orang tua mereka; mayoritas bergerak di sektor informal dan tidak tetap, seperti ojek online, asisten dapur dan pedagang makanan kaki lima. Karakteristik ini mencerminkan kriteria pemilihan konsultasi, yang diarahkan pada populasi miskin perkotaan. Hanya dua informan, Annisa di Jakarta dan Ilham di Makassar (keduanya berusia 20-an), yang memiliki pekerjaan formal, masing-masing sebagai buruh pabrik dan sebagai petugas kebersihan kontrak Pemerintah. Beberapa informan mengatakan mereka ingin mencari pekerjaan yang lebih stabil. Doni di Makassar, misalnya, sedang melamar pekerjaan di pabrik pada saat wawancara, dan menganggap pekerjaan di perusahaan swasta sebagai pekerjaan yang menawarkan stabilitas pendapatan. Namun, bekerja di sektor formal tidak serta merta menawarkan jaminan kerja. Annisa, misalnya, menjelaskan bahwa pabriknya tidak memberikan kesempatan bagi pekerja kontrak seperti dirinya untuk menjadi karyawan tetap.

Konsultasi ini juga menemukan bahwa hanya sedikit informan yang memiliki perjalanan karier yang stabil; sebagian besar informan berpindah dari satu bentuk pekerjaan lepas ke pekerjaan lepas yang lain. Ilham di Makassar, misalnya, sempat bekerja serabutan, seperti menjadi pengamen atau tukang parkir, sebelum mendapat pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Sebelumnya, Ilham ditawarkan posisi sebagai satpam di sebuah pusat perbelanjaan di dekat kediamannya. Namun, ia menolak tawaran tersebut karena terlalu banyak aturan ketat tentang penampilan profesional, seperti larangan menumbuhkan janggut. Dia menyukai pekerjaannya saat ini sebagai petugas kebersihan karena tidak memiliki batasan dalam hal penampilan profesional, seperti larangan menumbuhkan janggut. Demikian pula, Fadhil di Jakarta bekerja sebagai asisten dapur, pengantar barang dan sebagai awak kapal di kapal nelayan. Alasan utama Fadhil berpindah pekerjaan antara lain gaji yang rendah dan beban kerja yang berat. Ia menyatakan suka dengan pekerjaannya saat ini sebagai pengemudi ojek online, namun ia harus menggunakan akun temannya karena ia tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi). Kondisi kerja yang keras juga disebutkan oleh Annisa yang mengatakan bahwa dia bekerja dari jam 11 pagi hingga 10 malam enam hari seminggu.

Memiliki pekerjaan tidak otomatis memberikan stabilitas keuangan. Informan yang bekerja dengan anggota keluarga sering mendapatkan bayaran yang berubah-ubah atau bahkan tidak menerima sama sekali. Ryan di Kupang, misalnya, menjelaskan bahwa dia terkadang diberi uang untuk jerih payahnya, dan Martha yang juga tinggal di Kupang, bersama keluarga bibinya, menghabiskan banyak waktunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Sebelum pandemi COVID-19, banyak informan yang membahas tentang tantangan keuangan yang dihadapi keluarganya. Masalah ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakamanan pekerjaan dan ketidakstabilan pendapatan, karena pekerjaan lepas dan wirausaha mereka.

Pendapatan keluarga terkadang tidak cukup untuk memenuhi tingginya biaya hidup di perkotaan, dan semua informan menggambarkan penurunan pendapatan keluarga sebagai akibat utama dari pandemi. Namun, kecuali Dimas yang ibunya kehilangan pekerjaan, sebagian besar informan dan anggota keluarganya berhasil mempertahankan pekerjaannya.

5.5.3. AKSES KE PERLINDUNGAN SOSIAL

Sebagian besar informan mendapat bantuan dari setidaknya satu jenis program bansos selama masa pandemi, dan ada juga yang sudah menjadi

penerima manfaat perlindungan sosial, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), sebelum pandemi. Sayangnya, program bantuan sosial, meskipun sangat dihargai, tidak selalu meringankan kesulitan keuangan. Beberapa informan yang menerima paket sembako mengatakan, terkadang isinya tidak sesuai dengan kebutuhan keluarga atau tidak bisa digunakan karena keluarga tidak memiliki peralatan memasak yang dibutuhkan. Mereka lebih memilih uang tunai daripada bantuan dalam bentuk barang sehingga mereka dapat membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Masalah ini juga terjadi pada bantuan yang diberikan untuk sekolah daring. Beberapa informan mengeluhkan subsidi kuota internet hanya bisa digunakan untuk platform tertentu, seperti Google Classroom, Zoom dan WhatsApp. Idealnya, paket Internet harus memungkinkan akses ke mesin pencari dan platform komunikasi lainnya untuk mendukung proses pembelajaran, dan untuk memfasilitasi tugas sekolah yang memerlukan diskusi dengan teman sebaya. Beberapa informan melaporkan bahwa paket Internet mereka tidak diberikan rutin dan mereka tidak dapat memprediksi kapan kuota mereka akan diperpanjang. Desti dari Jakarta, misalnya, menyebut dirinya merasa repot menggunakan kuota internet yang disediakan Pemerintah karena harus mengganti kartu SIM untuk menggunakan kuotanya.

5.6. RUANG YANG AMAN DAN BERKELANJUTAN

Berangkat dari percakapan dengan peserta, bagian ini menyajikan gambaran berbagai perjuangan sehari-hari dengan infrastruktur perkotaan dan fasilitas umum yang dihadapi anak-anak dan kaum muda. Mengatasi masalah ini, seperti bencana alam/manusia, hunian yang tidak memadai, proyek pembaruan perkotaan dan ancaman penggusuran, migrasi, dan transportasi umum, merupakan langkah penting untuk menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan yang selaras dengan TPB Tujuan 5.

- » Beberapa anak muda yang berpartisipasi dalam studi menyebutkan bahwa bencana alam dan bencana ulah manusia, seperti banjir, kekeringan dan kebakaran sering mereka alami.
- » Keberadaan permukiman kumuh merupakan gejala minimnya tempat tinggal yang terjangkau dan memadai di perkotaan. Kaum muda yang kami wawancarai sangat menyadari masalah ini dan menyuarakan keprihatinan mereka atas situasi rumah mereka saat ini dan masa depan.
- » Meskipun reklamasi lahan membawa peluang ekonomi baru, reklamasi juga meningkatkan ancaman penggusuran bagi orang-orang yang tinggal di daerah sekitarnya. Penggusuran tidak hanya didorong oleh pembangunan fisik atau infrastruktur besar-besaran, tetapi juga oleh proyek-proyek untuk mengurangi banjir.

5.6.1. BENCANA ALAM DAN BENCANA BUATAN MANUSIA

Bagi informan yang tinggal di sekitar sungai di Jakarta, banjir sudah menjadi masalah menahun. Namun, Fadhil mengatakan bahwa banjir tidak membuatnya ingin meninggalkan lingkungan tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Desti yang saat ini tinggal di rusunawa juga pernah mengalami banjir. Dia memiliki kenangan banjir sebagai masa-masa yang menyenangkan ketika dia bisa bermain-main dengan air. Ia bahkan mengungkapkan kerinduannya akan banjir, meski diakuinya hal itu mengganggu pendidikannya. Namun, informan di Makassar yang beberapa tahun terakhir mengalami banjir mengeluhkan banjir. Ilham dan Doni beralih proyek reklamasi lahan di sekitar lingkungan mereka menjadi penyebab seringnya banjir dan Doni menyayangkan lapangan tempat ia dan kawan-kawan bermain terkena banjir setiap kali hujan.

Selain menghubungkan banjir dengan pembangunan perkotaan, peserta juga memberikan kesan bahwa perubahan iklim berkontribusi pada frekuensi banjir dan bahaya lingkungan lainnya yang mereka alami. Ahmad yang tinggal di dekat Fadhil menyebutkan, banjir di awal tahun 2020 ini jauh lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, ia menambahkan, lingkungan tempat tinggalnya dan Fadhil tidak sering terendam banjir, dan dalam beberapa kesempatan, masyarakatnya harus menggunakan perahu sendiri untuk membantu mengevakuasi warga di wilayah lain Jakarta.

Di Kupang, salah satu informan mengatakan kekeringan tahun ini lebih parah dari sebelumnya. Dia juga menambahkan bahwa pemerintah Kupang menyatakan darurat kekeringan pada tahun 2020, dan mengalokasikan 500 tangki air untuk membantu daerah yang paling terkena dampak, tetapi dia mengklaim bahwa pasokan air di kota terus berkurang.

Selain banjir dan kekeringan, kebakaran adalah bahaya umum lainnya yang menurut Desti dan Andi pernah mereka alami. Karena kedua informan tinggal di permukiman informal yang padat di Jakarta dengan perumahan yang tidak memadai, kebakaran dapat dikaitkan dengan ketidakamanan hunian, terutama karena keduanya mengatakan bahwa penyebab kebakaran adalah kebocoran gas atau korsleting. Dalam kasus Desti, rumah dan harta benda keluarganya terbakar habis; mereka hanya bisa menyelamatkan dokumen penting mereka. Bencana seperti ini juga menguras sumber keuangan rumah tangga. Desti dan keluarganya, misalnya, harus tinggal di tenda selama seminggu. Belakangan mereka harus menyewa rumah sambil pelan-pelan membangun rumah baru, hanya untuk digusur beberapa bulan kemudian. Di sisi lain, Andi menganggap

keluarganya beruntung karena memiliki sedikit tabungan untuk menutupi biaya perbaikan.

5.6.2. HUNIAN YANG TIDAK LAYAK

Keberadaan permukiman kumuh merupakan gejala minimnya tempat tinggal yang terjangkau dan memadai di perkotaan. Kaum muda yang kami wawancarai sangat menyadari masalah ini dan menyuarakan keprihatinan mereka atas situasi rumah mereka saat ini dan masa depan. Kondisi hunian informan bervariasi, dan kondisi tempat tinggal mereka mempengaruhi cita-cita dan preferensi mereka dalam hal hunian. Informan juga tinggal di berbagai pengaturan hunian. Dua orang informan di Jakarta menyewa tempat di sebuah rumah susun sederhana sewa (rusunawa) setelah diusir dari kampung mereka beberapa tahun lalu. Salah satunya, Annisa, bercita-cita memiliki rumah dengan sinar matahari yang lebih banyak. Ilham di Makassar yang tinggal di rumah berbahan triplek bercita-cita memiliki rumah berbahan bata yang suhunya lebih stabil. Dua informan di Jakarta, dan Doni di Makassar ingin tinggal di rumah di pinggiran kota karena lebih tenang – Doni sering mengunjungi perdesaan untuk menikmati lingkungan yang lebih santai.

Peserta memperhitungkan harga rumah saat ini dan kepemilikan tanah di kota-kota ketika membayangkan pengaturan tempat tinggal mereka di masa depan. Sebagian besar dari mereka mengungkapkan keinginan untuk memiliki rumah sendiri di atas tanah yang mereka miliki. Beberapa informan, terutama dewasa muda, mengungkapkan beberapa kecemasan mereka terkait jaminan hunian. Banyak orang, terutama yang dari Jakarta dan Makassar, pernah – pada suatu masa dalam hidup mereka – mengalami pengalaman tidak terjaminnya hunian mereka, seperti diusir dari daerah kumuh atau tidak mampu membayar sewa. Bagi mereka, kepemilikan tanah adalah perlindungan penting dari penggusuran. Ilham dari Makassar, misalnya, tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kecil yang dibangun sendiri di atas tanah Pemerintah, dan dia khawatir mereka bisa digusur sewaktu-waktu. Dia berencana untuk kembali ke desanya dan tinggal di rumah keluarganya karena membeli rumah di kota hampir tidak mungkin, dan menyewa rumah membuat mereka dalam posisi yang rentan karena pekerjaannya yang tidak tetap. Meskipun begitu, Ilham mengakui bahwa dia harus pergi ke kota karena peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar di kota. Begitu pula Putri, seorang informan di Kupang, berharap bisa membeli rumah di sana untuk ditinggali ayah dan saudara-saudaranya. Jika memiliki rumah di kota di luar kemampuannya, dia berencana untuk kembali ke desanya dan tinggal di rumah keluarganya.

5.6.3. REKLAMASI DAN PENGUSURAN LAHAN

Di Makassar, salah satu lokasi yang masuk dalam konsultasi, perubahan lanskap perkotaan, terutama dalam bentuk reklamasi lahan, telah membentuk kehidupan anak-anak dan kaum muda, terutama bagi mereka yang tinggal di dekat proyek-proyek tersebut. Doni, misalnya, menyayangkan hilangnya aktivitas rekreasi yang biasa dilakukan di bibir pantai, seperti mencari kerang atau menikmati matahari terbenam. Dia berpendapat bahwa penduduk sekitar kehilangan akses ke pantai dan laut, yang berarti bahwa anak-anak sekarang memiliki lebih sedikit pilihan untuk bermain. Dia juga mengamati bahwa anak-anak di lingkungannya sekarang cenderung bermain di gang-gang kecil dan menghabiskan lebih banyak waktu mengakses perangkat digital mereka. Ilham mengatakan, sekalipun jika dia atau anak-anak tetangga bisa bermain di pantai yang baru direklamasi, mereka tidak lagi merasa menjadi bagian dari tempat itu.

Informan di Makassar juga mengaitkan proyek reklamasi lahan dengan perubahan sosial ekonomi yang berdampak pada komunitas mereka yang dulunya merupakan komunitas nelayan yang berkembang pesat. Para informan ini mengamati bahwa proyek reklamasi lahan yang sedang berlangsung telah membuat nelayan lokal kehilangan akses langsung ke laut. Akibatnya, menurut para informan, banyak tetangga mereka yang pernah bekerja sebagai nelayan lambat laun kehilangan mata pencaharian.

Selain itu, masyarakat di komunitasnya tidak dapat lagi menambah pasokan makanan dan pendapatan mereka dengan mengumpulkan kerang dan makanan laut lainnya. Namun, proyek pembangunan perkotaan yang sedang berlangsung di daerah tersebut juga menghadirkan peluang pekerjaan dan pendapatan baru. Banyak nelayan yang menjadi buruh kasar akibat proyek reklamasi lahan dan banyak proyek konstruksi yang bermunculan setelahnya. Selain itu, kawasan tepi pantai Losari yang baru direnovasi di Makassar juga telah menarik lebih banyak pengunjung, yang mendorong anak-anak dan dewasa muda untuk menghasilkan uang dengan mengamen dan bekerja sebagai pengatur lalu lintas informal/tidak resmi.

Meskipun membawa peluang ekonomi baru, reklamasi lahan juga meningkatkan risiko penggusuran bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar. Ledakan konstruksi dapat meningkatkan permintaan, begitu pula imbasnya pada melejitnya nilai tanah di dekat area reklamasi. Dina, misalnya, mengingat penggusuran paksa yang terjadi di masyarakat sekitar beberapa tahun lalu, sedangkan

Ilham takut digusur karena rumahnya dibangun tanpa sertifikat tanah di atas tanah terlantar. Tidak memiliki sertifikat tanah berarti mereka dapat digusur kapan saja ketika pembangunan dan pengembangan di sekitar lingkungannya semakin meluas.

Penggusuran tidak hanya didorong oleh pembangunan fisik atau infrastruktur yang masif.

Di Jakarta, keempat informan mengalami penggusuran seumur hidup karena proyek mitigasi banjir. Dua dari mereka harus pindah ke rusunawa, sementara dua lainnya berhasil bertahan di lingkungan mereka. Desti, yang pindah ke rusunawa, menyebutkan bahwa keluarganya harus membayar sewa bulanan, yang berarti biaya tambahan untuk keluarganya. Pada saat wawancara, keluarganya sudah beberapa bulan belum membayar biaya sewa mereka, yang mana merupakan masalah yang juga diamati di rusunawa lain (Savirani dan Wilson, 2017). Namun, peserta lain yang berasal dari rumah tangga yang memiliki berbagai sumber pemasukan, Annisa, mengatakan harga sewa (Rp250.000/bulan) cukup terjangkau. Desti pun mengingat kembali sejumlah tantangan yang mereka hadapi setelah digusur dan pindah ke tempat baru. Meskipun dia pindah bersama dengan beberapa tetangga sebelumnya, dia tidak terlalu akrab dengan lingkungan baru. Dia juga menyebutkan bahwa dia harus pindah ke sekolah baru yang lebih dekat dengan rusunawanya, dan ayahnya harus menghabiskan lebih banyak waktu bepergian, sehingga mengeluarkan biaya bahan bakar lebih banyak, karena tempat kerjanya jauh dari rusunawa. Terlepas dari tantangan ini, Desti berpendapat bahwa rusunawanya jauh lebih baik daripada rumah sebelumnya di kampung kota karena keluarganya sekarang tinggal di rumah yang terbuat dari batu bata, dengan sekat dan kamar terpisah serta toilet pribadi.

5.6.4. MIGRASI DESA-KOTA

Dua informan dalam konsultasi penelitian ini tinggal jauh dari keluarga untuk menempuh pendidikan di kota yang jauh. Dina, misalnya, memutuskan untuk tinggal di Makassar ketika keluarganya pindah kembali ke kampung halaman ayahnya tiga tahun lalu dan dia masih duduk di kelas dua sekolah menengah pertama. Setelah 13 tahun tinggal di Makassar, keluarga Dina pindah lagi karena tidak bisa mengimbangi kenaikan biaya hidup di kota (terutama biaya sewa). Mereka cukup beruntung masih memiliki rumah di desa dan tanah yang bisa mereka garap. Dina memutuskan untuk tinggal di Makassar karena khawatir dengan kualitas pendidikan di desanya dan jarak dari rumahnya ke sekolah. Adik perempuannya berencana untuk ikut tinggal dengannya di Makassar tahun depan ketika dia akan mulai bersekolah di sekolah menengah pertama.

Informan lain, Putri, pindah ke Kupang dari wilayah NTT setelah diterima di sebuah universitas.

Keluarga juga dapat memutuskan untuk tinggal secaraterpisah agar dapat mengakses sekolah, sekalipun ketika mereka sudah tinggal di kota.

Dua informan di Kupang tinggal bersama kerabatnya, meskipun keluarga inti mereka tinggal di kota yang sama. Menurut seorang fasilitator lokal di Kupang, mengirim anak-anak untuk tinggal bersama keluarga besar merupakan hal yang lumrah agar mereka bisa mendapatkan sekolah yang lebih baik dan akses yang lebih mudah. Alasan lainnya adalah untuk memperluas atau mempertahankan ikatan keluarga, dan mendistribusikan sebagian beban keuangan keluarga. Di Jakarta, Fadhil berpisah dengan keluarganya karena sifat pekerjaan orang tuanya. Ibunya pergi ke luar negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) ketika dia masih di sekolah dasar.

Beberapa keluarga juga mencoba untuk menginjakkan kaki baik di perdesaan maupun di perkotaan, dan terkadang bolak-balik antara kota dan desa.

Ilham (di Makassar) pindah kembali bersama keluarganya ke rumah mereka di desa ketika dia berusia 15 tahun. Baginya, hidup di desa penuh tantangan. Dia merasa pekerjaan bertani itu membosankan dan menggambarkannya sebagai pekerjaan yang menantang dan mengurus tenaga. Untuk alasan ini, dia pindah kembali ke kota tanpa persetujuan orang tuanya dan mulai hidup mandiri. Namun, Ilham juga tahu bahwa hidup di kota semakin sulit karena peluang pekerjaan yang stabil dan bergaji tinggi semakin berkurang. Tanpa stabilitas pendapatan, ia memiliki sedikit kesempatan untuk mendapatkan akses ke hunian yang aman dan memadai. Oleh karena itu, seperti orang tuanya, Ilham mempertimbangkan kembali untuk pulang ke desanya, apalagi jika kota tidak lagi menawarkan peluang ekonomi yang layak.

5.6.5. FASILITAS UMUM DAN TRANSPORTASI

Beberapa informan juga mengungkapkan ide-ide mereka tentang bagaimana mengubah fasilitas umum menjadi pengelolaan kota dan lingkungan.

Desti di Jakarta ingin melihat ruang publik yang diperuntukkan untuk anak muda seusianya, seperti taman, perpustakaan umum, atau sekolah musik. Galih di Surakarta menekankan bahwa kota perlu membangun ruang publik yang lebih mudah diakses bagi orang dengan disabilitas. Di Makassar, Doni menyarankan untuk membangun lapangan sepak bola untuk anak-anak di lingkungannya agar mereka bisa tertarik untuk tidak bergantung pada perangkat digital mereka.



Para informan juga memberikan komentar tentang transportasi umum di kota mereka karena semuanya mementingkan mobilitas. Kurangnya sistem transportasi umum yang andal membatasi hal ini di kota-kota, dan memaksa mereka mengeluarkan uang untuk membeli atau menyewa kendaraan pribadi, terutama sepeda motor.

Meski ada pilihan transportasi massal seperti bus atau angkot, para informan mengeluhkan kualitas layanan mereka dan kemacetan di jalan. Informan di Surakarta dan Kupang menyatakan bahwa mereka tidak merasa aman saat menggunakan angkutan umum karena pengemudi yang ugal-ugalan dan kondisi jalan yang buruk. Firly berkomentar bahwa jadwal layanan transportasi massal yang tidak menentu tidak memenuhi kebutuhan aktivitas anak-anak yang terikat waktu, seperti bersekolah. Bentuk transportasi komersial, seperti ojek, lebih memberikan kepastian dan ketepatan waktu dalam perjalanan sehari-harinya ke sekolah. Bagi beberapa informan, seperti Ilham dan Fadhil, kepemilikan sepeda motor sangat menarik karena juga memungkinkan mereka untuk bekerja sebagai pengemudi ojek online.

5.7. PARTISIPASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Berdasarkan percakapan dengan peserta selama konsultasi, bagian ini menyajikan sketsa berbagai isu yang terkait dengan partisipasi dan keterlibatan masyarakat di antara anak-anak dan kaum muda. Topik ini juga mencakup partisipasi dalam kegiatan komunitas dan berbagai wadah formal.

- » Kaum muda yang berpartisipasi dalam konsultasi menganggap kegiatan masyarakat sebagai bagian dari interaksi sosial perkotaan dan wadah bersama untuk melibatkan anak muda.
- » Para peserta juga mengeksplorasi berbagai jalur formal untuk melibatkan partisipasi publik kaum muda, seperti Forum Anak atau organisasi siswa intra-sekolah OSIS. Mereka juga mengungkapkan keinginan akan wadah yang lebih inklusif dan inovatif yang dapat menjangkau lebih banyak anak muda dari berbagai latar belakang termasuk mereka yang paling rentan dan sulit dijangkau.

Peserta konsultasi juga menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana anak-anak dan kaum muda berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik, dan beberapa masalah terkait.

Secara umum, para peserta mewakili spektrum partisipasi publik/masyarakat yang luas, mulai dari keterlibatan minimal hingga keterlibatan formal melalui organisasi khusus yang diperuntukkan untuk partisipasi anak dan remaja. Beberapa wadah partisipasi yang disebutkan oleh informan di antaranya Forum Anak, organisasi berbasis sekolah dan kampus (OSIS/BEM dan kegiatan ekstrakurikuler), klub olahraga, komunitas berbasis keagamaan (pemuda atau umum), dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat atau lingkungan. Namun demikian, semua 16 informan memiliki beberapa pengalaman dengan beragam jenis keterlibatan masyarakat, meskipun dalam tingkat keterlibatan yang berbeda, yang tampaknya dipengaruhi oleh motivasi, kapasitas (waktu, sumber daya), dan ketersediaan wadah mereka sendiri untuk berpartisipasi. Para informan mencatat beberapa masalah yang mereka kaitkan dengan partisipasi pemuda secara umum, dan beberapa masalah khusus yang berkaitan dengan berbagai wadah yang tersedia.

5.7.1. PARTISIPASI DALAM KEGIATAN KOMUNITAS

Para peserta menganggap kegiatan masyarakat sebagai bagian dari interaksi sosial perkotaan dan wadah umum untuk keterlibatan pemuda.

Beberapa informan terlibat dalam berbagai kegiatan masyarakat, misalnya:

- » membersihkan lingkungan sekitar
- » pendidikan masyarakat (baik pendidikan agama maupun di luar agama)
- » penggalangan dana untuk fasilitas lokal
- » olahraga

Di Makassar, Ilham menjelaskan seringnya banjir dan sistem sanitasi yang tersumbat mendorong masyarakat untuk melakukan pembersihan rutin karena Pemerintah tampaknya hanya menawarkan solusi yang tidak tepat. Fadhil dari Jakarta ingat menghadiri pertemuan komunitas yang melibatkan anak-anak dan kaum muda, dan menganggap pertemuan ini sebagai cara untuk mendidik mereka tentang isu-isu terkini di lingkungan mereka dan tentang peran mereka sebagai warga negara.

5.7.2. PARTISIPASI MELALUI WADAH FORMAL UNTUK KETERLIBATAN PEMUDA

Anak-anak dan kaum muda juga menjelajahi berbagai jalur formal untuk keterlibatan publik yang diperuntukkan untuk mereka. Bagi banyak informan, organisasi seperti Forum Anak atau OSIS memberikan kesempatan untuk memperoleh kompetensi yang beragam, seperti keterampilan kepemimpinan dan komunikasi publik, yang tidak mereka peroleh melalui pendidikan formal atau di sekolah. Mereka juga ingin membangun dan memperluas jaringan mereka sembari berkontribusi kepada masyarakat melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan komunitas. Galih dari Surakarta, misalnya, adalah anggota aktif Forum Anak yang mengadvokasi kebutuhan anak-anak terpinggirkan, terutama mereka yang hidup dengan HIV dan AIDS. Motivasinya didasarkan pada pengalamannya sebagai penyintas perundungan, dan dia percaya pada gagasan untuk memberdayakan anak-anak yang terpinggirkan sehingga mereka dapat memanfaatkan potensi mereka.

5.7.3. DEMONSTRASI PUBLIK SEBAGAI JALAN UNTUK PARTISIPASI

Demonstrasi publik menawarkan saluran lain bagi anak-anak dan kaum muda agar suara mereka didengar. Selama masa konsultasi, empat orang



© UNICEF/UN0380466/Bea

informan berpartisipasi dalam protes atau demonstrasi publik yang terjadi setelah disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Fadhil dari Jakarta, mengaku ikut dalam protes karena merasa undang-undang ini akan berdampak negatif bagi pekerja berketerampilan rendah seperti saudara perempuannya. Putri dari Kupang bergabung dalam aksi unjuk rasa karena dia yakin undang-undang ini akan mempermudah perampasan tanah dan penggusuran masyarakat adat – pandangan yang didukung oleh pengalamannya dalam membantu komunitas pengungsi di Kupang. Pada saat yang sama, para informan juga mengakui bahwa berpartisipasi dalam demonstrasi bisa mendebarkan dan mengasyikkan. Beberapa mencatat bahwa mereka mengalami konfrontasi dengan aparat penegak hukum yang menggunakan gas air mata, tetapi informan lain menyatakan bahwa mereka merasa aman selama demonstrasi.

5.7.4. MASALAH-MASALAH TERKAIT PARTISIPASI ANAK-ANAK DAN KAUM MUDA

Beberapa informan mengamati bahwa anak-anak dan kaum muda tidak selalu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat. Seorang informan, Ilham, mengaitkan hal ini dengan berbagai faktor, seperti kurangnya informasi tentang bagaimana anak-anak dan kaum muda dapat berpartisipasi, kecenderungan orang dewasa untuk mengabaikan dan meremehkan pendapat anak-anak dan kaum muda, dan rendahnya kepercayaan diri mereka atas kapasitas diri untuk ikut berpartisipasi.



© UNICEF/UN0473707/Ijazah

Menggunakan demonstrasi publik sebagai contoh, para informan menekankan pentingnya menciptakan ruang yang aman dan ramah bagi mereka untuk mengekspresikan pendapat mereka. Doni, di Makassar, ingin bergabung dengan protes publik, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya karena dia takut tidak akan ada yang melindunginya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dia mengatakan bahwa para pemuda pengunjuk rasa yang merupakan pelajar mendapatkan perlindungan karena afiliasi mereka dengan sekolah. Doni juga mencatat keinginannya akan ruang yang aman di mana kaum muda dapat berbagi umpan balik yang konstruktif dengan para pengambil keputusan tentang kebijakan sosial atau rencana pembangunan, termasuk pada wadah yang dikelola oleh Pemerintah.

Demikian pula, anak-anak dan kaum muda juga mengungkapkan keinginan akan wadah yang lebih inklusif dan inovatif yang dapat menjangkau lebih banyak kaum muda dari berbagai latar belakang. Terlepas dari ketersediaan organisasi atau komunitas yang dapat diikuti oleh kaum muda, wadah semacam itu tidak dapat diakses oleh mereka semua, terutama jika mereka memiliki latar belakang yang terpinggirkan. Di Kupang, Siti menyebutkan kurangnya ruang bagi kaum muda untuk menyampaikan pendapat mereka kepada Pemerintah dan menyarankan untuk membangun platform digital yang akan memungkinkan lebih banyak kaum muda untuk didengarkan oleh para pembuat kebijakan.



6

PEMBAHASAN

Meskipun beberapa kerentanan sama-sama dialami oleh anak-anak dan kaum muda di perkotaan dan perdesaan, wujudnya bisa jadi berbeda-beda. Temuan dari studi ini juga menunjukkan bahwa tantangan yang sebagian anak atau kaum muda hadapi di perkotaan bisa jadi menciptakan peluang bagi yang lain: peluang dan tantangan bisa saling beririsan. Dengan melihat kerangka kerentanan terhadap tiga kelompok – ketimpangan akses dan kesempatan, sistem yang tidak responsif, serta marginalisasi – laporan ini membantu menunjukkan bagaimana tantangan dan peluang beririsan dan mempengaruhi kehidupan anak-anak.

- » Analisis data sekunder menunjukkan bahwa rata-rata kondisi anak-anak di daerah perkotaan lebih baik daripada anak-anak di daerah perdesaan, meskipun situasi di daerah perdesaan perlahan-lahan membaik. Namun demikian, beberapa indikator menunjukkan bahwa kesejahteraan beberapa kelompok anak di perkotaan terancam.
- » Meskipun anak-anak di daerah perkotaan tidak menghadapi banyak hambatan ketika mengakses layanan dasar, mereka masih menghadapi tantangan dalam menggunakan atau memperoleh manfaat dari layanan tersebut secara optimal.
- » Terlepas dari di mana mereka tinggal, anak-anak dan kaum muda dapat menghadapi bencana alam dan risiko lingkungan serta isu-isu sosial, kekerasan dan diskriminasi
- » Kesempatan, pengalaman, dan kemampuan anak-anak dan kaum muda di daerah perkotaan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari di rumah atau di ruang publik, dapat berkontribusi pada daya diri (*agency*) mereka.
- » Pandemi COVID-19 memperparah kerentanan yang telah ada yang dialami oleh anak-anak dan kaum muda perkotaan.
- » Temuan dari literatur dan konsultasi dengan anak-anak dan kaum muda menawarkan wawasan tentang bagaimana kurangnya akses ke layanan publik, kemiskinan, isolasi, pengucilan, marginalisasi dan sistem dan layanan yang tidak responsif, dapat berdampak pada kesejahteraan mereka.

Akses yang tidak setara terhadap layanan dan peluang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, hambatan geografis, dan mobilitas yang terbatas.

Studi ini menemukan peningkatan secara keseluruhan dalam persentase anak-anak yang termasuk dalam 40 persen penduduk berpendapatan terendah antara 2015 dan 2019. Namun, pada 2019, proporsi mereka yang termasuk dalam 40 persen penduduk berpendapatan terendah lebih tinggi di daerah perkotaan (56 persen) dibandingkan dengan daerah perdesaan (37 persen). Selanjutnya, tingkat peningkatan indikator ini lebih tinggi di daerah perkotaan (2 poin persentase antara tahun 2015 dan 2019, dibandingkan dengan 1 poin persentase di daerah perdesaan).

Kemiskinan kota berkaitan dengan kemampuan rumah tangga untuk menghadapi guncangan jangka pendek seperti tiba-tiba mengganggu dan kesulitan ekonomi untuk jangka panjang seperti kenaikan biaya hidup (World Vision International, 2016). Anak-anak dan keluarga miskin lebih berpeluang berasal dari rumah tangga yang mengandalkan pekerjaan dengan kondisi kerja yang

buruk di sektor ekonomi informal, dan cenderung tinggal di hunian yang tidak layak dan kondisi kehidupan yang buruk. Kemiskinan dan kesulitan keuangan juga mendorong anak-anak dan kaum muda untuk terlibat (sebelum waktunya) dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Studi ini menemukan bahwa 5 dari 16 peserta konsultasi mengenyam sekolah atau perguruan tinggi dengan bekerja di saat yang sama. Seorang informan di Makassar, yang putus sekolah dua kali (di SMP dan SMA), menyebutkan ketidakmampuan untuk membiayai uang sekolah (terutama selama pelatihan sekolah menengah kejuruan) sebagai alasan ia bekerja.

Bahkan dalam kasus di mana individu dapat mengakses layanan, sistem yang ada seringkali tidak cukup mampu memenuhi kebutuhan anak-anak dan kaum muda.

Tingkat kelulusan sekolah dasar di daerah perkotaan dan perdesaan berada di atas 90 persen pada tahun 2019, dengan tingkat yang secara konsisten lebih tinggi di daerah perkotaan (97 persen) daripada daerah perdesaan (94 persen). Namun, akses internet yang buruk masih membuat anak-anak di perkotaan dan perdesaan tidak

mendapatkan dukungan belajar yang optimal, terutama selama pandemi COVID-19 (BAPPENAS et al., 2020). Analisis data sekunder memperkirakan bahwa hanya setengah dari anak-anak berusia 5-17 tahun di daerah perkotaan yang memiliki akses Internet, dan situasi ini lebih buruk di daerah perdesaan di mana hanya sepertiga dari anak-anak berusia 5-17 tahun yang memiliki akses Internet. Data dari konsultasi juga menyoroti berbagai tantangan struktural terkait sekolah daring, seperti akses Internet yang tidak dapat diandalkan, fasilitas atau teknologi yang tidak memadai/tidak mendukung, dan biaya yang mahal. Hal ini juga menegaaskan kecemasan para informan tentang hasil belajar yang menurun akibat dukungan pembelajaran online yang kurang optimal. Namun demikian, Internet dan budaya digital juga menawarkan jalan potensial bagi anak-anak untuk mendidik, menghibur, dan mengekspresikan diri mereka.

Anak-anak yang rentan seringkali dikucilkan, baik dari sisi birokratis maupun di lapangan, dari penggunaan sistem dan layanan. Anak-anak dan keluarga yang tinggal di permukiman ilegal dan perumahan yang tidak layak sering mengalami penggusuran paksa karena program pembangunan dan pembangunan kota ditambah tidak adanya dokumen hukum (Koesoemawiria, 2017; LBH Jakarta, 2016a; Winayanti dan Lang, 2004). LBH Jakarta mendokumentasikan 495 penggusuran permukiman informal atau kampung, menggusur 15.319 KK di Jakarta antara 2015–2018 (LBH Jakarta 2016a, 2017).

Masyarakat yang tinggal di permukiman seperti ini juga sering tidak mendapatkan layanan dan fasilitas Pemerintah. Mereka mungkin juga tidak memiliki dokumen hukum pribadi, terutama karena Pemerintah tidak mengakui tempat tinggal mereka secara administratif. Tanpa pengakuan hukum, penghuni kawasan kumuh yang miskin menjadi terabaikan dari sisi hukum dan harus menanggung “kerentanan sosial”, yang berarti bahwa suara dan partisipasi mereka kurang dihargai dan kurang dicari (World Vision International 2016). Temuan ini juga dibenarkan oleh seorang peserta yang tinggal di permukiman informal di Jakarta. Dia mencatat bahwa komunitasnya sebagian besar tidak terlihat oleh Pemerintah dan sering tidak dapat menerima bantuan dari Pemerintah.

Kesenjangan antara hasil di perkotaan dengan di perdesaan mungkin sebagian dapat dijelaskan melalui adanya definisi resmi dan klasifikasi daerah perkotaan dan perdesaan yang berbeda-beda.

Tidak ada konsensus tentang definisi perkotaan dan perdesaan di Indonesia. Setidaknya ada tiga definisi resmi utama tentang perkotaan di Indonesia:

- » satu definisi statistik yang digunakan oleh BPS
- » dua definisi perencanaan atau administrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Definisi BPS, yang diadopsi pada studi ini untuk keperluan analisis data sekunder, menggunakan sistem peringkat komposit yang mencakup kepadatan penduduk, persentase rumah tangga yang bekerja di pertanian, dan keberadaan fasilitas perkotaan serta akses ke telepon rumah dan listrik (lihat Lampiran 2).

Ketersediaan fasilitas umum yang merupakan bagian dari definisi ini, di mana sekolah dan rumah sakit menjadi perhatian khusus untuk tujuan penelitian ini, sebagian besar dapat menjelaskan perbedaan antara beberapa indikator terkait pendidikan dan kesehatan di daerah perdesaan dan perkotaan. Perbedaan ini dapat menjadi lebih luas dengan adanya reklasifikasi daerah perdesaan ke daerah perkotaan mengikuti definisi BPS, yang secara bertahap meningkatkan proporsi daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan. Menurut studi Bank Dunia, reklasifikasi daerah perdesaan-perkotaan menjadi faktor utama yang menopang peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan (Roberts et al., 2019). Perluasan sektor manufaktur yang membangun pabriknya di daerah perdesaan (karena ketersediaan lahan) semakin mempercepat transformasi daerah perdesaan menjadi daerah dengan fitur perkotaan yang semakin meningkat dan menghilangkan tenaga kerja dari sektor perternakan dan pertanian (Jones dan Mulyana, 2015).

Lebih lanjut, karena definisi BPS tentang “kumuh” ditentukan pada tingkat rumah tangga, kategori ini ditemukan baik di perdesaan maupun di perkotaan. Tinjauan literatur sistematis menemukan bahwa ada variasi yang luas di berbagai negara dalam hal bagaimana dan pada skala seperti apa daerah kumuh didefinisikan. Namun, menurut BPS, permukiman kumuh secara resmi didefinisikan sebagai sekelompok individu yang tinggal di bawah bangunan yang sama tanpa akses ke sumber air dan fasilitas sanitasi yang layak, dan dengan ruang hidup yang tidak memadai yang ditentukan oleh ukuran luas lantai dan bahan bangunan.

Beberapa indikator kesejahteraan utama masih mendukung pernyataan bahwa situasi di perdesaan membutuhkan perhatian lebih. Situasi ini perlahan-lahan membaik, dan kondisi ini mungkin mengindikasikan beberapa hasil positif dalam hal investasi dan akses yang sama ke layanan dasar antara daerah perdesaan dan perkotaan. Namun, beberapa tantangan baru di daerah perkotaan bermunculan.

Studi ini menunjukkan bahwa, meskipun anak-anak perkotaan tampak lebih baik daripada anak-anak di daerah perdesaan dalam banyak indikator (seperti sanitasi layak, tingkat kelulusan sekolah, dan kemiskinan), kemajuan pada indikator lain seperti perkawinan anak dan kepemilikan akta kelahiran di daerah perkotaan tetap lambat. Indikator seperti akses ke sanitasi layak dan pengurangan kemiskinan tetap jauh lebih besar di daerah perkotaan daripada daerah perdesaan. Sementara kemajuan dalam sanitasi positif untuk kedua wilayah selama bertahun-tahun, indikator kemiskinan menunjukkan bahwa anak-anak di daerah perdesaan secara konsisten lebih buruk daripada anak-anak di daerah perkotaan pada 2015–2019. Prevalensi perkawinan anak, masih jauh lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan, dan praktiknya tidak menurun di perkotaan. Demikian pula, meskipun kepemilikan akta kelahiran di antara anak-anak lebih tinggi di daerah perkotaan, kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan telah menyempit dari tahun 2015–2019, yang menunjukkan perkembangan yang jauh lebih lambat di daerah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan.

Kurangnya akses terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan, dan peluang ekonomi di daerah perdesaan serta janji kehidupan yang lebih baik di kota dapat mendorong keluarga, anak-anak dan kaum muda untuk pindah ke daerah perkotaan. Namun, para migran tidak mendapatkan jaminan kemudahan akses dan peluang di kota. Meskipun telah didokumentasikan bahwa reklasifikasi daerah perdesaan sebagai daerah perkotaan adalah pendorong utama urbanisasi (Roberts et al., 2019), migrasi desa-kota masih menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan penduduk perkotaan di kota-kota di Indonesia (Roberts et al., 2019). Saat ini, 57 persen penduduk perkotaan terkonsentrasi di kawasan mega-urban seperti Jabodetabek. Selain itu, perempuan usia subur dan kaum muda merupakan mayoritas migran yang pindah ke pusat kota (Jones dan

Mulyana, 2015). Pada saat yang sama, diproyeksikan pada tahun 2045, 220 juta penduduk Indonesia (atau lebih dari 70 persen dari total penduduk saat itu) akan tinggal di daerah yang tergolong perkotaan (Roberts et al., 2019, hlm. 2-3).

Telah didokumentasikan bahwa anak-anak dan kaum muda pindah ke kota karena sejumlah alasan, seperti pendidikan yang lebih baik (Reality Check Approach+ et al., 2018). Anak-anak dan kaum muda sendiri pindah ke kota untuk mendaftar di sekolah yang lebih baik dan untuk mengejar pendidikan yang lebih baik (McDonald et al., 2013; Reality Check Approach+ et al., 2018), yang pada gilirannya dapat membuat mereka terpisah dari keluarga. Hal ini juga ditegaskan oleh konsultasi yang dilakukan untuk penelitian ini, yang menunjukkan bahwa dua informan (di Makassar dan Kupang) tinggal di kota yang jauh dari keluarga untuk melanjutkan pendidikan.

Pekerjaan menyajikan alasan lain bagi individu, termasuk kaum muda, untuk pindah ke kota. Dengan merosotnya sektor pertanian di perdesaan, kaum muda terdorong untuk mencari lapangan kerja baru di perkotaan. Lebih jauh lagi, baik orang tua maupun anak-anak di daerah perdesaan sering kali mencari pekerjaan formal di luar pertanian; perkembangan ini dapat menyebabkan orang tua mengirim anak-anak mereka ke kota untuk mengenyam pendidikan tinggi dan pada akhirnya menemukan pekerjaan yang lebih baik (Clendenning, 2018; Siagian et al., 2019). Pekerjaan formal di luar pertanian dianggap lebih stabil dan menawarkan pendapatan yang lebih baik dan lebih bergengsi (Siagian et al., 2019), tetapi peluang ini langka di daerah perdesaan (Ilhami, 2018).

Perguruan tinggi adalah kendaraan untuk mobilitas sosial ekonomi dan meningkatkan peluang untuk memperoleh pekerjaan formal yang mendapatkan bayaran yang lebih baik. Anak-anak dan kaum muda di perkotaan melihat pendidikan sebagai mekanisme untuk bertahan dan berkembang di masa depan. Namun, cita-cita mereka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi seringkali terkendala oleh kondisi keuangan mereka. Seorang informan di Jakarta juga menyebutkan prestasi akademik yang buruk sebagai hambatan yang ia rasakan untuk bisa masuk universitas.

Janji pendidikan yang lebih baik di kota-kota yang nantinya menjanjikan pekerjaan sayangnya tidak selalu terwujud. Keluarga miskin di perdesaan seringkali kekurangan informasi yang diperlukan dan jaringan yang lebih luas untuk membuat keputusan strategis dalam hal pendidikan (Clendenning, 2018). Akibatnya, mereka jarang mempertanyakan biaya

dan kualitas universitas tempat anak-anak mereka mendaftar. Orang-orang muda yang bermigrasi ke daerah perkotaan (seringkali ke kota-kota besar di pulau-pulau besar) cenderung mendaftar di perguruan tinggi swasta yang sama, dan biasanya mengikuti gelar dan program yang sama dengan teman-teman mereka di perdesaan (Clendenning, 2018). Kebiasaan semacam ini mempersulit mereka untuk memperluas koneksi mereka di perkotaan (Clendenning, 2018).

Selain itu, tidak ada kepastian bahwa universitas swasta di kota akan menawarkan jalur praktis untuk pekerjaan yang lebih baik dan kesuksesan profesional lebih lanjut. Pendidikan di kota (dengan biaya kuliah yang mahal dan biaya hidup yang lebih tinggi) telah menguras keuangan keluarga, sementara menawarkan sedikit jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. Akibat kurangnya modal sosial dan ekonomi, banyak dari keluarga ini menyadari diri mereka bergantung pada jaringan etnis mereka dan berakhir pada pekerjaan yang eksploitatif (Ilhami, 2018). Dalam penelitiannya di Makassar tentang migran muda dari Flores, Clendenning menemukan bahwa banyak dari para migran ini gagal mencapai kota dan harus kembali ke kampung halaman mereka, yang mana menambah jumlah pengangguran muda berpendidikan di daerah perdesaan (Clendenning, 2018)). Beberapa dari individu-individu ini kembali ke pekerjaan pertanian dengan sedikit pengalaman di bidang pertanian. Konsultasi studi ini mencatat situasi serupa di mana salah satu keluarga informan (berdomisili di Makassar) pulang ke desa mereka karena meningkatnya biaya hidup di kota.

Meskipun adanya peningkatan di daerah perkotaan secara keseluruhan dalam hal indikator kesejahteraan utama, anak-anak dari kelompok yang lebih miskin berjuang untuk bertahan hidup dan berkembang di daerah perkotaan. Kerentanan mereka dapat memiliki wujud yang berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggal anak-anak dan kaum muda dan kesulitan yang mereka alami dalam konteks perkotaan.

Meskipun kemiskinan anak di perkotaan lebih rendah, namun masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara anak di perkotaan yang tinggal di rumah tangga kumuh dan mereka yang tidak tinggal di rumah tangga kumuh. Studi ini menunjukkan bahwa beberapa kelompok yang tinggal di rumah tangga kumuh perkotaan atau berasal dari kuintil pendapatan rendah masih lebih buruk pada beberapa indikator. Seperti yang ditunjukkan pada

analisis sekunder, semakin tinggi distribusi pendapatan di daerah perkotaan, semakin rendah prevalensi diare. Namun, pola ini tidak ditemukan di daerah perdesaan. Selanjutnya, rata-rata proporsi remaja yang melaporkan merokok sedikit lebih tinggi di daerah kumuh perkotaan dibandingkan dengan daerah kumuh perdesaan. Melihat lebih dekat pada kondisi perkotaan, juga terdapat kesenjangan yang cukup besar antara anak-anak dari rumah tangga kumuh dan rumah tangga tidak kumuh pada beberapa indikator, seperti prevalensi perkawinan anak dan putus sekolah. Kesenjangan angka putus sekolah antara anak-anak di perkotaan yang tinggal di rumah tangga kumuh dan mereka yang tidak tinggal di rumah tangga kumuh meningkat seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan. Meskipun kemiskinan anak di perkotaan lebih rendah, namun masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara anak-anak di perkotaan yang tinggal di rumah tangga kumuh dan mereka yang tidak tinggal di rumah tangga kumuh.

Di Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya seperti India, Bangladesh dan Brazil, beberapa penelitian secara khusus meneliti beberapa indikator kesejahteraan di antara anak-anak dan kaum muda yang tinggal di daerah kumuh perkotaan yang semakin menegaskan disparitas internal perkotaan. Tinggal di daerah kumuh dikaitkan dengan tingginya kejadian diare (Strina et al., 2012), gizi buruk (Ahsan et al., 2017; Islam, 2018; Raju et al., 2019), imunisasi dasar yang tidak lengkap (Ghei et al., 2010), dan melahirkan tanpa bantuan (Choudhury et al., 2012).

Keberadaan permukiman kumuh merupakan gejala minimnya perumahan yang terjangkau dan memadai di perkotaan. Pemerintah Indonesia telah lama mengakui masalah seperti kekurangan dan tidak memadainya pembangunan hunian di kota-kota. Menurut RPJMN saat ini (2020–2024), Pemerintah berupaya untuk menyediakan hunian layak bagi 70 persen rumah tangga (*baseline* 54,1 persen). Namun, beberapa pihak telah mengkritik program perumahan umum Pemerintah karena memungkinkan pengembang swasta untuk mendapatkan kepemilikan tanah bernilai tinggi di pusat kota. Kepemilikan tersebut seringkali diperoleh dengan menggusur penduduk berpenghasilan rendah (yang kadang-kadang tinggal di tanah kosong Pemerintah) yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program perumahan ini (Kusno, 2015; Silver, 2008). Selain itu, persyaratan untuk mendapatkan hipotek tidak mungkin dipenuhi bagi penduduk yang bekerja di sektor informal karena kurangnya pendapatan bulanan yang stabil. Akibatnya, warga sering memilih rumah yang dibangun sendiri yang memiliki tingkat kualitas bangunan yang beragam di atas tanah terlantar, yang menyebabkan munculnya perkampungan (Kusno, 2015).

Penyediaan hunian yang terjangkau dan layak bagi penduduk perkotaan, mengingat pertumbuhan penduduk perkotaan, akan tetap menjadi masalah mendesak bagi Pemerintah.

Kaum muda yang kami wawancarai sangat menyadari masalah ini dan menyuarakan keprihatinan mereka atas situasi rumah mereka saat ini dan masa depan. Kondisi kehidupan mereka saat ini mempengaruhi aspirasi dan preferensi mereka. Peserta memperhitungkan harga rumah saat ini dan kepemilikan tanah di kota-kota ketika membayangkan pengaturan tempat tinggal mereka di masa depan. Informan yang dari Jakarta dan Makassar, pernah – pada suatu masa dalam hidup mereka – mengalami pengalaman tidak terjaminnya hunian mereka, seperti diusir dari daerah kumuh atau tidak mampu membayar sewa. Bagi mereka, kepemilikan tanah adalah perlindungan penting dari pengusuran. Kekhawatiran informan tentang hunian memperkuat temuan dari studi tentang kekurangan (*deprivation*) multidimensi di dua kabupaten di Sulawesi Selatan. Dalam studi tersebut, Bexley dan Bessell menemukan bahwa kurangnya jaminan hunian secara signifikan berkontribusi pada kecemasan kaum muda (Bexley dan Bessell, 2020).

Kemiskinan sering berhubungan erat dengan mata pencaharian, dan telah dikemukakan bahwa sebagian besar individu miskin dalam konteks perkotaan bekerja di sektor informal (Octavia, 2020). Konsultasi ini mengkonfirmasi pengamatan ini. Mayoritas orang tua informan bekerja di sektor

informal sebagai buruh harian lepas atau buka usaha rumahan. Sebagian besar informan juga memiliki lebih dari satu anggota keluarga yang terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

Kemiskinan sering mendorong anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan untuk menambah pendapatan keluarga mereka. Temuan dari konsultasi mencontohkan fenomena ini; empat informan bekerja penuh waktu sementara lima lainnya mengenyam sekolah/perguruan tinggi sembari melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Informan mengakui bahwa mereka bekerja terutama untuk mendapatkan penghasilan, tetapi beberapa dari mereka mencatat bahwa mereka juga ingin memperoleh beberapa keterampilan dari bekerja. Bagi informan yang masih sekolah, penghasilan tambahan tersebut digunakan terutama untuk menutupi biaya sekolah/kuliah dan untuk membantu ekonomi keluarga. Dalam laporan bersama oleh Organisasi Perburuhan Internasional, UNICEF dan Bank Dunia dari 2012, hampir 87 persen anak yang bekerja juga bersekolah. Temuan ini menunjukkan fenomena serupa, yaitu pendapatan dari pekerjaan sebagian besar digunakan untuk membayar biaya pendidikan (ILO et al., 2012).

Penting untuk dicatat bahwa beberapa informan yang bekerja dengan anggota keluarga atau dalam usaha keluarga sering kali dibayar tidak



menentu atau tidak mendapat bayaran sama sekali (ILO et al., 2012; Webbink, Smits dan de Jong, 2012). Juga merupakan hal yang lumrah di banyak tempat di Indonesia bahwa seorang anak yang tinggal dengan kerabat akan membantu keluarga angkat mereka dengan pekerjaan rumah tangga, yang sebagian besar, tetapi tidak selalu, melibatkan pekerjaan merawat rumah. Salah satu informan konsultasi misalnya, mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan imbalan tempat tinggal dan biaya hidup lainnya (Nugroho, Hermono dan Ronaboyd, 2020).

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh ILO, diperkirakan bahwa pengangguran kaum muda lebih banyak terjadi di daerah perkotaan daripada di daerah perdesaan (ILO, 2020).

Konsultasi studi ini menemukan bahwa dua informan, masing-masing berusia 15 dan 19 tahun, tidak terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan (NEET) dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Dalam sebuah penelitian terhadap dewasa muda di Jabodetabek, Ariane Utomo et al. menemukan bahwa sekitar 55 persen dari 799 informan, berusia 20–34 tahun dan yang putus sekolah saat berusia 12 tahun ke atas, tidak secara otomatis pindah dan mencari pekerjaan. Tiga puluh persen orang dewasa muda yang meninggalkan sekolah tidak bekerja atau tidak mengenyam pendidikan sampai mereka mencapai usia 18 tahun (Utomo et al., 2014). Diperkirakan dua pertiga dari kaum muda yang menganggur, berusia 20-24 tahun, menghabiskan waktu 12 bulan atau lebih untuk mencari pekerjaan (ILO et al., 2012).

Anak-anak di daerah perkotaan mungkin tidak menghadapi banyak hambatan ketika mengakses layanan dasar, karena infrastruktur di perkotaan relatif mapan. Namun, anak-anak di perkotaan dapat menghadapi tantangan dalam menggunakan atau memperoleh manfaat dari layanan tersebut secara optimal.

Berdasarkan data dari analisis sekunder, tingkat kelulusan sekolah secara konsisten lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan. Lebih lanjut, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kesenjangan angka penyelesaian sekolah antara perkotaan dan perdesaan. Kesenjangan perkotaan/perdesaan diperkirakan 3 poin persentase antara usia 13-15 tahun dibandingkan dengan 22 poin persentase di antara usia 19-21 tahun. Meskipun daerah perkotaan memiliki kinerja lebih baik pada indikator umum pendidikan dibandingkan dengan daerah perdesaan,

beberapa kelompok anak di kota masih kesulitan untuk mendapatkan akses ke layanan publik dan tetap berada dalam sistem. Konsultasi dengan kaum muda menyoroti banyak hambatan untuk bersekolah, akses ke perawatan kesehatan, dan terbatasnya ketersediaan media komunikasi di antara kaum muda perkotaan.

Dari konsultasi studi ini, jelas bahwa kesulitan keuangan adalah salah satu alasan utama putus sekolah.

Informan kami berpendapat bahwa putus sekolah mengakibatkan rendahnya pencapaian pendidikan yang, pada gilirannya, mengurangi prospek pekerjaan mereka. Temuan dari penelitian lain menunjukkan hubungan yang kuat antara putus sekolah dan tingkat putus sekolah di jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Suryadarma et al., 2006). Selain itu, penelitian lain pada orang dewasa muda di Jabodetabek menyoroti bahwa putus sekolah paling sering terjadi pada usia 14 tahun ke bawah (Utomo et al., 2014). Mengingat hubungan antara putus sekolah dan partisipasi sekolah lebih lanjut, ada kemungkinan bahwa beberapa anak yang tinggal di perkotaan Jakarta tidak akan melanjutkan sekolah sejak usia 14 tahun.

Selanjutnya, temuan dari konsultasi, serta penelitian lain, menunjukkan bahwa putus sekolah juga terkait dengan perilaku berisiko, seperti kekerasan terhadap teman sebaya atau kehamilan remaja.

Dua studi di Indonesia menemukan bahwa insiden-insiden seperti perkelahian di sekolah dan masalah perilaku adalah salah satu kemungkinan penyebab putus sekolah dini (Utomo et al., 2014; Zuilkowski et al., 2019). Kedua studi ini lebih lanjut menunjukkan bahwa kaum muda yang terpinggirkan secara sosial ekonomi memiliki risiko lebih tinggi untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan mereka dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang lebih mampu.

Dalam hal akses pelayanan kesehatan, sebagian besar informan terdaftar dan menerima (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN).

Namun, seorang informan mengaku mengalami kesulitan dalam mematuhi mekanisme rujukan JKN. JKN Indonesia memerlukan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum pasien dapat mengakses layanan kesehatan sekunder dan tersier. Namun, seorang informan harus menempuh perjalanan selama satu jam untuk mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama. Temuan ini menunjukkan dua kemungkinan kekurangan dalam hal akses anak-anak terhadap perawatan kesehatan di perkotaan. Pertama, penyelenggaraan JKN tidak fleksibel bagi masyarakat yang sering berpindah-pindah, karena didasarkan pada satu puskesmas per alamat penerima. Pembatasan layanan perawatan kesehatan tingkat pertama dapat mencegah individu mengakses layanan terdekat di

wilayah mereka. Kedua, ada kemungkinan pelayanan kesehatan tingkat pertama tidak merata di perkotaan.

Berkenaan dengan praktik digital, jelas bahwa Internet merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari anak muda Indonesia, tetapi langkah-langkah perlindungan tetap menjadi masalah bagi beberapa kelompok anak-anak dan kaum muda. Banyak anak muda Indonesia percaya bahwa Internet dapat melengkapi sekolah dan aktivitas sehari-hari mereka. Sebuah survei U-Report yang dilakukan oleh UNICEF menemukan bahwa 47 persen responden suka menggunakan Internet karena memberi mereka kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang tidak dapat mereka pelajari melalui pendidikan formal (UNICEF, 2017). Informan konsultasi juga menceritakan pemanfaatan internet untuk berbagai alasan, seperti jejaring sosial, pembelajaran dan game online. Namun, kaum muda juga mengungkapkan kebutuhan akan perlindungan saat menjelajahi dunia maya. Survei U-Report lainnya menemukan bahwa 25 persen anak muda mengkhawatirkan risiko perundungan serta masalah privasi data (23 persen) (U-Report Indonesia, 2020a). Survei ini juga menemukan bahwa 44 persen anak muda menganggap literasi digital sangat penting dan bahkan menjadi salah satu prioritas paling mendesak terkait perlindungan anak muda di era digital.

Terlepas dari status tempat tinggal mereka di perkotaan atau perdesaan, anak-anak dan kaum muda mengalami ancaman eksternal terhadap kesejahteraan mereka. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk bencana alam dan risiko lingkungan, atau dalam bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Dari data yang dikumpulkan selama konsultasi, jelas bahwa para informan sangat menganggap penting rasa aman di rumah atau lingkungan mereka, dan mereka menganggap ini sebagai aspek penting dari kesejahteraan mereka.

Kekerasan horizontal, seperti tawuran yang sering dipicu oleh perselisihan kecil antar kelompok, merupakan hal yang lumrah bagi informan yang tinggal di Kupang, Makassar, dan Jakarta. Kehadiran kekerasan masyarakat di perkotaan Indonesia serupa dengan pengalaman anak-anak yang tinggal di perkotaan di Brazil dan Bangladesh (Moura et al., 2015; Rashid, 2011). Di Brasil, telah didokumentasikan bahwa anak-anak di daerah miskin terpapar kekerasan baik di rumah maupun di lingkungan mereka (Mello et al.,

2014). Pengalaman langsung para peserta konsultasi ini menunjukkan paparan serupa terhadap kekerasan baik di rumah maupun di lingkungan sekitar, dan ini membentuk mobilitas informan dan keluarga mereka. Beberapa peserta menanggapi risiko kekerasan dengan tinggal di kamar, rumah, atau lingkungan mereka. Kekerasan lingkungan juga mendorong salah satu keluarga informan untuk kembali ke daerah perdesaan asal mereka.

Ancaman lain yang ditemukan oleh studi ini berdasarkan data dari konsultasi dan tinjauan literatur adalah bencana alam dan bencana buatan manusia. Kebakaran, misalnya, selalu menjadi ancaman bagi anak-anak dan remaja yang tinggal di perumahan yang tidak layak dan permukiman yang padat, dan ini terlihat dari beberapa penuturan informan. Selain itu, perubahan iklim yang cepat dan signifikan juga berkontribusi pada meningkatnya ancaman bencana alam, misalnya dengan menyebabkan banjir yang lebih sering dan intens (Roberts et al., 2019) serta kekeringan yang lebih lama; informan di Jakarta menyaksikan banjir yang luar biasa parah pada awal tahun 2020. Informan di Makassar juga mengamati bahwa banjir pesisir lebih sering terjadi, yang memperparah dampak buruk reklamasi terhadap kehidupan mereka. Kekeringan yang berkepanjangan juga diduga sebagai akibat dari perubahan iklim, seperti yang diungkapkan oleh informan di Kupang.

Kesempatan, pengalaman, dan kemampuan anak-anak dan kaum muda di daerah perkotaan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari di rumah atau di ruang publik, dapat berkontribusi pada daya diri (*agency*) mereka. Studi ini menemukan banyak cara bagi anak-anak dan kaum muda untuk membentuk dan menyampaikan pandangan mereka dalam mempengaruhi rencana dan keputusan yang berkaitan dengan hidup mereka. Hal ini termasuk keterlibatan mereka dalam kegiatan sekolah dan masyarakat.

Meskipun sebagian besar penelitian hingga saat ini berfokus pada peluang partisipasi anak-anak dan remaja yang difasilitasi melalui struktur dan saluran formal, hanya sedikit perhatian yang diberikan untuk memahami interaksi yang lebih informal antara anak-

anak dan kaum muda dalam kehidupan sehari-hari (Horgan et al., 2017).

Temuan konsultasi menunjukkan bahwa ada berbagai cara bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam masyarakat, seperti terlibat dengan organisasi formal, mengikuti unjuk rasa demokrasi, berinteraksi dengan teman sebaya dan tetangga mereka, serta mengadvokasi diri mereka sendiri di rumah. Motif kaum muda didasarkan pada upaya untuk memperbaiki komunitas mereka, meningkatkan solidaritas di antara tetangga, dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Namun, partisipasi mereka sering dibatasi oleh orang dewasa yang sering mempertimbangkan usia, kompetensi, dan status perkawinan, sebagai prasyarat partisipasi publik. Hambatan struktural, seperti kurangnya ruang atau wadah yang inklusif dan aman bagi kaum muda untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan, juga merupakan bagian dari tantangan dalam memfasilitasi partisipasi yang lebih bermakna.

Partisipasi anak-anak dan kaum muda adalah kunci untuk mencapai masa depan perkotaan yang berkelanjutan, dan terutama yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Agenda baru Pemerintah Indonesia untuk demografi perkotaan, kohesi sosial dan kesetaraan, mengakui pentingnya menciptakan peluang bagi kaum muda untuk menjadi agen perubahan positif dan juga diberdayakan untuk membuat keputusan yang tepat atas kehidupan mereka sendiri (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Indonesia, 2016). Namun, dokumen kebijakan ini tidak merinci kebijakan dan program konkrit yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Terlepas dari komitmen kebijakan tersebut untuk meningkatkan partisipasi dan kewarganegaraan kaum muda, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan di bidang ini. Pandemi seperti COVID-19 dapat membatasi kesempatan anak-anak dan kaum muda untuk menyampaikan pendapat. Hasil jajak pendapat U-Report menunjukkan bahwa 62 persen responden melaporkan memiliki lebih sedikit pilihan untuk mengungkapkan pendapat mereka dibandingkan sebelum pandemi (U-Report Indonesia, 2020b). Temuan dari jajak pendapat U-Report lainnya mengidentifikasi dua kesenjangan besar terkait dengan partisipasi kaum muda; responden mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan tentang cara berkomunikasi publik serta kebutuhan akan informasi lebih lanjut tentang peluang partisipasi (U-Report Indonesia, 2020c). Dari hasil konsultasi, terlihat beberapa informan kurang berminat untuk mengikuti kegiatan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh informan yang memfasilitasi Forum Anak, anak-anak dan kaum muda seringkali memiliki



© UNICEF/UNI374575/Ijazah

motivasi yang rendah untuk berpartisipasi karena banyaknya tugas sekolah. Informan ini juga mencatat bahwa anak-anak dan kaum muda sering kali tidak mengetahui nama tetangga mereka tetapi ingin mengenal lingkungan mereka lebih baik. Ini memberikan wawasan untuk program-program yang menangani isu partisipasi untuk juga memasukkan pendekatan-pendekatan untuk memperkuat kohesi masyarakat.

Pandemi COVID-19 memperparah kerentanan yang telah ada yang dialami oleh anak-anak dan kaum muda perkotaan. Studi ini mengamati bagaimana kerentanan yang telah ada semakin diperparah dan akibatnya bagaimana hal ini menempatkan populasi tersebut pada risiko yang lebih besar selama pandemi COVID-19.

Seperti yang telah dibahas di bagian sebelumnya, dampak COVID-19 lebih berat di daerah perkotaan daripada di perdesaan, seperti yang dapat diamati dari tingkat infeksi di kota-kota di Indonesia (lihat Bagian 3.5). Lebih lanjut, data dari Indonesia



© UNICEF/UN0409817/Bea



© UNICEF/UN0409863/Bea

menunjukkan bahwa sebagian besar peningkatan kemiskinan diperkirakan terjadi di pusat-pusat perkotaan (Roberts et al., 2019). Gangguan pandemi mungkin lebih parah bagi anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, karena kondisi mereka yang serba kekurangan telah membuat anak-anak ini lebih rentan terhadap guncangan jangka pendek dan kesulitan jangka panjang (World Vision International, 2016). Konsultasi yang dilakukan untuk penelitian ini menyoroti bagaimana anak-anak dan kaum muda yang hidup dalam kemiskinan terdampak oleh pandemi COVID-19.

Ketakutan dan kecemasan akan pekerjaan tidak tetap di antara kaum muda selama pandemi menggemakan temuan dari beberapa penelitian di berbagai negara dan kelompok usia. Studi-studi ini menyimpulkan bahwa tekanan psikologis dapat muncul akibat ketidakpastian pendapatan (Every-Palmer et al., 2020; Fountoulakis et al., 2020; Wathélet et al., 2020).

Seperti diberitakan berbagai laporan, pandemi ini akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia dengan derajat yang berbeda-beda tergantung dari upaya mitigasi Pemerintah, seperti pemberian jaring pengaman dan jaminan sosial (Suryahadi et al., 2020; Bank Dunia, 2020). Pandemi juga secara tidak proporsional berdampak pada industri non-pertanian yang berbasis di perkotaan, seperti grosir dan eceran, perhotelan, jasa makanan, dan industri perhotelan (Bank Dunia, 2020).

Kemampuan untuk memperoleh pendapatan terkait dengan kualitas dan keamanan hunian. Mereka yang kurang beruntung secara ekonomi ternyata lebih cenderung tinggal di hunian yang buruk, sehingga meningkatkan risiko terinfeksi COVID-19 (Patel dan Shah, 2020). Salah satu informan mengatakan bahwa terbatasnya kesempatan kerja tentunya akan menyebabkan semakin sedikitnya pilihan tempat tinggal. Akibatnya, kaum muda dan keluarga mereka mungkin memutuskan untuk pulang ke desa ketika kota tidak lagi menawarkan peluang hunian yang layak.

Anak-anak dan kaum muda yang berpartisipasi dalam konsultasi khawatir tentang risiko infeksi keluarga mereka, tetapi mereka tidak dapat terus-menerus menjaga protokol kesehatan karena kewajiban ekonomi dan sosial. Penelitian tentang mobilitas fisik selama pandemi mengkonfirmasi temuan ini; negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi memiliki mobilitas terkait pekerjaan yang jauh lebih tinggi selama periode karantina Maret 2020, bahkan ketika mengendalikan tingkat infeksi suatu negara (Bargain dan Aminjonov, 2020).

Peran positif teman dan keluarga yang berfungsi sebagai sistem pendukung (*support system*) menjadi faktor yang membantu anak-anak dan remaja dalam menghadapi konsekuensi pandemi.

Temuan dari Vietnam menegaskan kembali korelasi antara hubungan keluarga yang positif dan kesehatan mental yang baik di kalangan anak muda (Phuong et al., 2013). Demikian pula, jajak pendapat U-Report menemukan bahwa sekitar 71 persen responden telah menerima banyak perhatian dari teman-teman mereka sejak Februari 2020. Di sisi lain, 53 persen responden melaporkan bahwa orang tua atau pengasuh kurang memperhatikan kesehatan mereka. dibandingkan dengan Februari 2020 (U-Report Indonesia, 2020b).

Struktur yang disediakan dengan mempertahankan rutinitas sehari-hari diidentifikasi sebagai faktor pelindung demi menjaga kesejahteraan, tetapi pembatasan pergerakan merupakan hal yang tidak dapat dihindari bagi banyak orang.

Sebuah studi menemukan bahwa dengan terus melakukan aktivitas sehari-hari dapat menjadi faktor pelindung dari kecemasan, depresi, dan kecenderungan bunuh diri selama pandemi COVID-19 (Fountoulakis et al., 2020). Meski demikian, COVID-19 mau tidak mau mengubah banyak aspek kehidupan seseorang, terlihat dari perjuangan para informan dalam menjaga hubungan dengan teman melalui video call atau bermain game kelompok melalui perangkat digital. Namun, media digital dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk berinteraksi dengan teman. Langkah-langkah kesehatan masyarakat yang membatasi kontak sosial dapat menyebabkan tekanan psikologis di antara individu, dan terlebih lagi bagi kaum muda (Benke et al., 2020).

Pandemi mengganggu pendidikan anak-anak dan kaum muda, dan sebuah studi Bank Dunia menemukan bahwa penutupan sekolah karena pandemi COVID-19 dapat menyebabkan hilangnya hasil belajar selama setengah tahun (Yarrow et al. 2020). Selain itu, penelitian ini memproyeksikan bahwa kerugian yang dialami 28 juta siswa di Indonesia akan mencapai 20 persen dari PDB negara pada tahun 2019.

Selanjutnya, langkah-langkah untuk menahan dampak COVID-19 pada proses pendidikan hampir tidak memenuhi kebutuhan siswa. Temuan dari survei online oleh U-Report menunjukkan bahwa 64 persen peserta merasa bahwa subsidi kuota data bermanfaat untuk studi mereka (U-Report Indonesia 2020a). Namun, paket bantuan belajar daring ini belum dimanfaatkan secara maksimal di seluruh tanah air karena terkendala akses internet. Analisis sekunder

menemukan bahwa daerah perkotaan memiliki lebih sedikit anak yang tidak memiliki akses ke Internet dibandingkan dengan daerah perdesaan. Namun, di dalam kawasan perkotaan, angka ini lebih kecil di kawasan kumuh daripada di kawasan tidak kumuh.

Kurangnya akses ke air minum layak menghambat penerapan langkah-langkah perlindungan. Cuci tangan sebagai salah satu upaya kesehatan masyarakat untuk mencegah paparan virus corona, hampir tidak dapat dilakukan di rumah tangga yang akses airnya terbatas. Pembahasan di bagian sebelumnya menggarisbawahi hubungan antara kesulitan ekonomi dan akses ke air minum layak. Instalasi air, langganan air, dan keandalannya sangat bergantung pada kemampuan keluarga untuk membayar tagihan air. Analisis sekunder menunjukkan bahwa, antara 2015 dan 2019, proporsi anak-anak yang tinggal di rumah tangga perkotaan dengan air minum layak menurun dari 37,4 persen menjadi 30,5 persen. Namun, penurunan ini dapat dijelaskan oleh peningkatan penggunaan air kemasan bermerek dan air isi ulang di antara populasi ini, yang merupakan dua sumber yang tidak termasuk dalam definisi air minum layak. Konsultasi ini juga menemukan bahwa air kemasan bermerek dan air isi ulang merupakan sumber air utama bagi informan. Hanya informan yang berdomisili di Kupang yang menggunakan air ledeng rebus sebagai sumber air minum.

Studi ini juga mencatat perbedaan pendapat tentang COVID-19, dan pendekatan yang kurang disiplin untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan. Beberapa peserta mengatakan bahwa mereka memakai masker untuk menghindari razia, bukan karena mereka memahami pentingnya memakai masker. Sikap lengah terhadap langkah-langkah kesehatan berasal dari pandangan yang salah tentang pandemi di antara beberapa peserta konsultasi dan komunitas tempat mereka tinggal. Sebuah studi baru-baru ini di AS menawarkan penjelasan tentang hubungan antara potensi kesalahan informasi di antara anak-anak dan penerapan langkah-langkah perlindungan mereka, seperti masker wajah (Hornik et al., 2020). Temuan tersebut sangat menyarankan bahwa studi lebih lanjut diperlukan untuk menentukan dan memahami berbagai tanggapan terhadap langkah-langkah kesehatan masyarakat.

Cakupan studi ini tidak termasuk mengukur dampak kerentanan pada anak-anak dan kaum muda perkotaan. Namun, literatur sekunder dan

konsultasi dengan anak-anak dan kaum muda menawarkan wawasan tentang bagaimana kurangnya akses ke layanan publik, kemiskinan, isolasi, pengucilan, marginalisasi dan sistem dan layanan yang tidak responsif, dapat berdampak pada kesejahteraan mereka.

Populasi perkotaan yang rentan mengalami kesulitan keuangan, yang sebagian disebabkan oleh tidak terjaminnya pekerjaan mereka dan ketidakstabilan pendapatan karena populasi tersebut sebagian besar memiliki pekerjaan lepas dan wiraswasta. Dalam upaya mereka untuk mengatasi kesulitan keuangan, keluarga sering kali harus mengambil tindakan drastis yang, dalam beberapa kasus, dapat menyebabkan mereka terpisah dari keluarga. Fenomena seperti yang disebutkan di atas dialami oleh beberapa peserta. Sebuah studi tentang migrasi desa-kota di Indonesia menegaskan bahwa terdapat tren migrasi terbalik, terutama di kalangan migran yang masih memiliki keluarga dan harta benda di kampung halamannya (Reality Check Approach+ et al., 2018). Clendenning, dalam studinya tentang anak muda yang bermigrasi kembali ke Flores dari kota-kota besar seperti Makassar, juga mengamati bahwa anak muda sering kali memutuskan untuk kembali ke desa mereka setelah mereka tidak lagi mampu bertahan hidup di kota (Clendenning, 2018).

Pembangunan kota besar-besaran tidak hanya mengubah lanskap lingkungan, tetapi juga mempengaruhi situasi sosial ekonomi anak-anak dan kaum muda. Upaya ekspansi kota terutama melalui proyek konstruksi, seperti pusat perbelanjaan, kompleks perumahan, jalan, gedung perkantoran dan pelabuhan, secara tidak sengaja dapat membuat sebagian masyarakat terpinggirkan. Hal ini dibuktikan dengan pengalaman para informan di Makassar.

Pembangunan perkotaan juga erat kaitannya dengan penggusuran, terutama bagi mereka yang tinggal di permukiman informal. Penggusuran seringkali dibenarkan karena berbagai alasan, seperti pembukaan lahan untuk pembangunan dan pengembangan gerbang tol, jalan raya, dan kawasan bisnis. Penggusuran seringkali juga dibenarkan sebagai tindakan untuk melawan permukiman dan perkampungan ilegal (LBH Jakarta, 2016).

Penggusuran telah memiskinkan banyak keluarga akibat hilangnya rumah dan aset (Ichwatus Sholihah dan Shaojun 2018). Keluarga yang pernah hidup tanpa perlu membayar biaya sewa terpaksa menjadi penyewa baik di unit rumah sewa milik Pemerintah maupun milik swasta (Savirani dan Wilson, 2017; Tilley et al., 2019), yang semakin menambah beban keuangan mereka.



LIMITASI STUDI

- » Karena studi yang dipilih untuk tinjauan literatur diharuskan memiliki istilah seperti “perkotaan” atau “kota” dalam judulnya, studi yang menggunakan istilah alternatif untuk merujuk pengaturan perkotaan (seperti, “Jakarta,” misalnya), mungkin tidak termasuk dalam tinjauan.
- » Mengingat pemanfaatan hanya dua data set survei: SDKI (dari 2012 dan 2017) dan SUSENAS (setiap tahun, dari tahun 2015 hingga 2019), analisis dibatasi pada indikator dan variabel spesifik yang disertakan dalam data selama tahun-tahun tersebut.
- » Selain itu, mengingat SUSENAS bersifat *cross-sectional*, studi ini tidak dapat menarik kesimpulan tentang kausalitas.
- » Mengingat terdapat beberapa definisi “daerah perkotaan” menurut hukum Indonesia, menganalisis dan membandingkan situasi anak-anak di berbagai jenis daerah perkotaan dengan menggunakan data yang tersedia menjadi tantangan tersendiri.
- » Kesimpulan yang diambil dari data kualitatif hanya didasarkan pada konsultasi yang dilakukan dengan mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Tanpa adanya kemampuan untuk membandingkan konsultasi perkotaan ini dengan yang dilakukan di daerah perdesaan, penting untuk disadari bahwa temuan yang disajikan di sini mungkin juga mencerminkan keadaan bagi kaum muda di daerah perdesaan.
- » Temuan dari konsultasi bersifat kualitatif, dan oleh karena itu, tidak dapat digeneralisasikan mewakili situasi dan karakteristik populasi anak-anak/kaum muda di kota tertentu. Konsultasi (dengan kaum muda) bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kehidupan beberapa anak dan pemuda di perkotaan, yang membantu menggambarkan analisis data sekunder. Peserta dipilih secara purposive untuk memberikan narasi berbeda yang tidak dapat ditangkap dari statistik.

Studi ini menggunakan metode campuran, termasuk kombinasi antara analisis data sekunder, tinjauan literatur dan konsultasi dengan anak-anak dan kaum muda di empat kota. Kombinasi metode ini digunakan untuk menyajikan gambaran yang lebih mendalam dan komprehensif tentang tantangan dan peluang bagi anak-anak yang tinggal di perkotaan. Namun demikian, rancangan penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan utama dan temuan-temuannya harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan keterbatasan ini. Pertama, mengingat bahwa studi yang memenuhi syarat untuk tinjauan literatur diharuskan memiliki istilah seperti “daerah perkotaan” atau “kota” dalam judulnya, studi yang menggunakan istilah alternatif untuk merujuk pengaturan perkotaan (seperti, “Jakarta,” misalnya), mungkin tidak masuk dalam daftar tinjauan. Selanjutnya, meskipun tim berfokus pada berbagai sumber untuk literatur kelabu – termasuk laporan yang relevan dari lembaga seperti UNICEF, UNFPA, Bank Dunia, World Vision, WRI, dan UN-Habitat serta publikasi dari lembaga Pemerintah yang berfokus pada anak-anak yang tinggal di kota-kota di Indonesia – materi relevan yang diterbitkan oleh organisasi lain mungkin terlewatkan.

Kedua, analisis data sekunder untuk penelitian ini hanya menggunakan dua data set survei: SDKI (dari 2012 dan 2017) dan SUSENAS (setiap tahun, dari 2015 hingga 2019). Oleh karena itu, analisis terbatas pada indikator dan variabel khusus yang termasuk dalam data set SDKI dan SUSENAS selama tahun-tahun ini. Sebagai contoh, analisis ini tercatat mampu melihat proporsi anak yang masuk ke dalam kategori NEET karena informasi tentang NEET tidak termasuk dalam SUSENAS atau SDKI. Mengingat SUSENAS sebagian besar berfokus pada pengukuran akses ke layanan, hanya sedikit indikator kualitas atau keandalan layanan yang dapat dinilai. Selanjutnya, perbandingan ketat dari waktu ke waktu dibatasi oleh fakta bahwa beberapa pertanyaan dalam survei SUSENAS tidak selalu ditanyakan setiap tahun.

Selain itu, mengingat SUSENAS bersifat *cross-sectional*, studi ini tidak dapat menarik kesimpulan tentang kausalitas. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi oleh ketidakmampuannya untuk memberikan wawasan tentang indikator stunting dan wasting, yang merupakan faktor penting bagi anak-anak. Meskipun SDKI mencatat data kesehatan, gizi dan imunisasi anak, SDKI tidak mencatat tinggi dan berat badan anak



saat ini, yang merupakan input yang diperlukan untuk menghitung *stunting* dan *wasting*.

Karena ada beberapa definisi “daerah perkotaan” menurut hukum Indonesia, menganalisis dan membandingkan situasi anak-anak di berbagai jenis daerah perkotaan dengan menggunakan data yang tersedia menjadi tantangan tersendiri. Penyederhanaan definisi yang berbeda-beda ini akan bermanfaat bagi Indonesia untuk memantau kemajuannya menuju TPB antara wilayah perkotaan dan di luar perkotaan serta di dalam wilayah perkotaan.

Pandemi COVID-19 menghadirkan banyak tantangan dalam proses konsultasi. Salah satu tantangan tersebut terkait dengan ketidakmampuan tim untuk merekrut kaum muda yang tinggal di daerah perdesaan, meskipun beberapa informan melaporkan pernah tinggal di daerah perdesaan dalam hidup mereka. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil dari data kualitatif hanya didasarkan pada konsultasi yang dilakukan dengan mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Tanpa kemampuan untuk membandingkan konsultasi perkotaan ini dengan yang dilakukan di daerah perdesaan, penting untuk menyadari bahwa temuan yang disajikan di sini mungkin juga mencerminkan keadaan kaum muda yang tinggal di daerah perdesaan. Selain itu, temuan dari konsultasi tidak dapat digeneralisasikan secara statistik untuk mewakili situasi anak-anak di kota tertentu. Namun demikian, konsultasi memberikan studi ini temuan-temuan bernuansa yang didasarkan pada pengalaman dan perspektif hidup informan, dan hal ini melengkapi temuan yang diperoleh melalui metode-metode lain.

Data yang tersedia tidak memungkinkan studi ini untuk melakukan analisis mendalam mengenai gender, dan oleh karena itu, tidak ada temuan konklusif mengenai perbedaan gender dalam pembahasan berbagai tema. Pengamatan atau pengalaman dari peserta anak/kaum muda perempuan serta laki-laki tidak dapat secara serta-merta dan eksklusif diatribusikan kepada perbedaan gender, mempertimbangkan variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang mungkin berperan.



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- » Studi ini menyarankan daerah perkotaan harus melanjutkan upaya untuk meningkatkan sistem pencatatan sipil dan statistik hayati, menjajaki kerja sama penelitian dengan kota-kota lain di daerah mega-urban untuk lebih memahami situasi populasi rentan di daerah tersebut, menerapkan model perlindungan dan kesejahteraan anak yang komprehensif untuk daerah perkotaan, dan mendukung partisipasi inklusif dan keterlibatan masyarakat, dimulai dengan kaum muda di ibu kota, dan termasuk kaum muda yang paling rentan.
- » Studi ini juga menyarankan rekomendasi umum yang dapat diprioritaskan, seperti peningkatan kualitas layanan, penyediaan infrastruktur perkotaan dan melakukan dialog terkait temuan studi dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk terus mengeksplorasi solusi-solusi lain yang dapat diterapkan.

8.1 REKOMENDASI KHUSUS

MELANJUTKAN UPAYA PERBAIKAN SISTEM PENCATATAN SIPIL DAN STATISTIK VITAL.

Meskipun pencatatan kelahiran dan cakupan NIK lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan, studi ini menemukan bahwa anak-anak dan keluarga yang paling rentan di kawasan kumuh perkotaan tetap tidak terlihat secara administratif. Kurangnya dokumentasi ini dapat menyebabkan hambatan lebih lanjut dalam mengakses layanan dasar, seperti layanan kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial serta mempengaruhi akses individu ke layanan keuangan, teknologi digital, hunian dan status kepemilikan tanah. Selanjutnya, tanpa data yang akurat dari pencatatan sipil, Pemerintah kurang siap dalam merencanakan pemberian layanan.

MITRA PEMBANGUNAN AGAR MEMPERKUAT HUBUNGAN KERJA DENGAN IBU KOTA DI WILAYAH INTERVENSINYA.

Secara tradisional, program-program pembangunan, termasuk yang dilakukan oleh UNICEF, berfokus pada daerah-daerah di Indonesia yang berjuang melawan kemiskinan. Mengingat bahwa definisi standar dan parameter kemiskinan biasanya terbatas pada daerah perdesaan, program-program ini mungkin kurang melibatkan ibu kota. Studi ini, dan penelitian sebelumnya oleh UNICEF tentang kesulitan di daerah perkotaan, telah menunjukkan perlunya peningkatan alokasi sumber daya untuk membantu anak-anak dan keluarga miskin dan rentan di ibu kota. Karena kota-kota ini sudah memiliki sumber daya yang besar, program dapat memainkan peran penting dalam

memberikan saran, memberikan masukan teknis, dan meningkatkan pembangunan sistem di tiga bidang utama:

1. penelitian dan manajemen pengetahuan
2. interoperabilitas data
3. pendekatan terprogram untuk mengatasi jeratan kemiskinan, kekerasan dan diskriminasi, dan bencana (krisis kesehatan sosial, lingkungan dan iklim)

MENJAJAKI KERJA SAMA PENELITIAN DENGAN IBU KOTA DAN KOTA-KOTA DI KAWASAN MEGA-URBAN UNTUK LEBIH MEMAHAMI SITUASI POPULASI RENTAN, TERMASUK POPULASI DI LUAR RUMAH TANGGA.

Metodologi baru dan studi yang terfokus diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang dari kesulitan ini, mempelajari munculnya daya lenting (resilience), dan untuk mengidentifikasi dan menyelidiki situasi anak-anak (yang seringkali tunawisma) yang tinggal di panti asuhan serta penjara dan tahanan yang tersebar di ibu kota, dan anak-anak rentan yang berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di kawasan mega-urban. Terdapat dua jalan potensial untuk melakukan pekerjaan ini:

- » badan perencanaan kota yang memiliki hubungan langsung dengan struktur pemerintahan kota
- » Tim Staf Khusus Walikota atau Gubernur yang bertugas untuk mempercepat agenda prioritas kota



© UNICEF/UN0506799/Ijazah

MENERAPKAN MODEL PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK YANG KOMPREHENSIF UNTUK WILAYAH PERKOTAAN.

Model ini harus menanggapi masalah inteseksional kemiskinan, ketimpangan, bahaya dan diskriminasi. Sistem perlindungan dan kesejahteraan anak ini terdiri dari mekanisme “tiga cabang”:

Dukungan perlindungan sosial: Di bawah mekanisme ini, kota-kota diberikan dukungan yang diperlukan untuk menggandakan pekerja garis depan dan berbasis masyarakat yang tersedia dan mampu membantu anak-anak mengakses kesehatan, pendidikan, perlindungan dan identitas hukum serta membantu pengasuh mereka mengakses layanan keuangan dan mendapatkan mata pencaharian.

Dukungan keluarga: Di bawah mekanisme ini, kota diberikan dukungan yang diperlukan untuk memobilisasi pekerja sosial yang dapat membantu pengasuh merawat anak-anak mereka.

Dukungan perlindungan anak khusus: Di bawah mekanisme ini, kota-kota diberikan dukungan yang diperlukan untuk lebih membantu anak-anak dalam mengakses layanan khusus (layanan hukum, rumah aman, perawatan sementara, layanan psikososial, layanan medis) yang meminimalkan risiko bahaya dan dapat menanggapi insiden bahaya. Pemerintah DKI Jakarta, misalnya, sedang menyiapkan Tim Koordinasi Terpadu Keluarga Bahagia (Center of Excellence in Family Happiness). Lembaga semacam itu dapat berfungsi sebagai titik masuk dalam membuat konsep, merancang, dan menguji coba model serupa. Bila memungkinkan, model perlindungan dan kesejahteraan anak harus menggabungkan penelitian yang ketat untuk memungkinkan pengukuran dampak model.

MENDUKUNG PARTISIPASI INKLUSIF DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT OLEH ANAK DAN KAUM MUDA ,TERMASUK MEREKA YANG PALING RENTAN DAN SULIT DIJANGKAU.

Tim studi menyadari bahwa mengubah sistem dan layanan sama politisnya dengan teknisnya. Khususnya di ibu kota, di mana aktivisme cenderung terkonsentrasi, pemerintah kota dan mitranya dapat memainkan peran strategis dalam mendukung partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang berarti. Upaya ini harus terdiri dari:

1. mendukung organisasi pemuda melalui penguatan akuntabilitas, analisis risiko dan rencana mitigasi, terutama untuk regenerasi aktivisme pemuda
2. mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan pendampingan untuk membekali kaum muda dan orang dewasa dengan kapasitas teknis tentang isu-isu sosial yang mempengaruhi kehidupan mereka atau teman-teman mereka, kapasitas emosional untuk mengelola stres dan kecemasan, dan kapasitas organisasi yang mencakup manajemen, kepemimpinan, dan kolaborasi
3. menumbuhkan pemikiran kritis di kalangan kaum muda perkotaan melalui platform akses terbuka, seperti Program Latih Logika, yang dikembangkan bersama dengan UNICEF, Program Pendidikan Kecakapan Hidup UNICEF (UNICEF’s Life Skills Education Programme), dan Program Kecakapan Digital dan Abad 21 (the 21st Century and Digital Programme) tetapi perlu diperluas untuk mencakup modul pelatihan, sesi yang dimoderasi, dan materi untuk mengembangkan analisis berbasis bukti, pemikiran strategis, dan kemampuan pemecahan masalah pada diri kaum muda
4. mengembangkan dan memfasilitasi ruang yang aman dan dapat diakses di mana kaum muda dapat mendiskusikan pengalaman mereka dan bagaimana mengatasi masalah sosial (guncangan dan perubahan) di sekitar mereka

8.2 REKOMENDASI UMUM UNTUK PEMBUAT KEBIJAKAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

Data kualitatif dari penelitian ini menyoroti bagaimana kesulitan hidup dapat memiliki wujud yang berbeda-beda untuk anak-anak dan kaum muda rentan di daerah perkotaan dan perdesaan. Kesulitan seperti itu menghadirkan tantangan dan peluang unik yang mungkin bersinggungan dengan pengalaman sehari-hari kelompok-kelompok ini. Sayangnya, tanpa konsultasi yang sebanding dengan mereka yang di daerah perdesaan, penelitian ini tidak dapat menarik perbandingan antara pengalaman-pengalaman ini.

Meskipun bersifat anekdot, kisah para peserta menawarkan beberapa wawasan bahwa kota menghadapi masalah multidimensi dari peningkatan kesenjangan di dalam perkotaan. Selain itu, analisis data sekunder menunjukkan bahwa anak-anak dari daerah-daerah termiskin di wilayah perkotaan, beserta anak-anak yang tinggal di daerah kumuh dan anak-anak dari kelompok terpinggirkan, memiliki kinerja lebih buruk daripada rekan-rekan mereka di perkotaan yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Pertama, anak-anak ini kekurangan kesempatan dan kesulitan untuk mengakses layanan. Kedua, sistem dan layanan tidak responsif terhadap kebutuhan spesifik mereka dan karena itu tidak dapat memperbaiki situasi mereka. Ketiga, kelompok-kelompok ini secara struktural terpinggirkan, yang pada akhirnya membatasi peluang mereka.

Namun demikian, kota akan selalu tetap menarik bagi para pencari peluang. Membatasi migrasi ke kota mungkin membatasi potensi keuntungan baik bagi kota maupun migran. Alih-alih membatasi migrasi, Pemerintah perlu memastikan bahwa kota-kota siap akan kedatangan migran. Misalnya, kota harus berupaya untuk menjamin bahwa infrastruktur dasar, seperti air bersih dan layak, listrik, dan sanitasi, dapat diakses oleh keluarga dan masyarakat yang rentan. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan tingginya biaya praktik kebersihan yang tidak memadai, dan menunjukkan bagaimana hal ini dapat menyebabkan risiko infeksi yang lebih tinggi. Penyediaan infrastruktur dasar tidak hanya penting bagi keberhasilan penerapan protokol kesehatan selama pandemi; meningkatkan akses terhadap listrik, air bersih dan sanitasi yang layak juga penting untuk mencegah munculnya dan menyebarnya ancaman kesehatan masyarakat lainnya.

Lebih jauh dari asumsi tersebut, studi ini berpendapat bahwa kota perlu menghadapi dua tantangan yang saling terkait untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan kaum muda. Tantangan pertama adalah mengurangi disparitas internal perkotaan dengan

mengatasi kerentanan yang dihadapi oleh anak-anak dan kaum muda di perkotaan. Oleh karena itu, kebijakan perlu memprioritaskan untuk membuat layanan-layanan penting dapat diakses, responsif, dan inklusif untuk menjaga anak-anak dan remaja tetap aman, sehat, dan berkembang. Tantangan kedua adalah mempersiapkan kota untuk menyambut dan menampung populasi yang terus bertumbuh – sebagian besarnya adalah anak muda. Menyediakan infrastruktur perkotaan, meningkatkan kualitas layanan, dan memungkinkan partisipasi pemuda dan keterlibatan masyarakat yang bermakna adalah beberapa prioritas utama tata kelola kota untuk di masa sekarang dan di masa depan.

PROGRAM DAN KEBIJAKAN DI KOTA PERLU MEMASTIKAN AKSES KE LAYANAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, GIZI, PENCATATAN SIPIL, DUKUNGAN SOSIAL DAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS TINGGI BAGI MEREKA YANG PALING RENTAN, TANPA MEMANDANG STATUS SOSIAL EKONOMI, JENIS KELAMIN, AGAMA, ETNIS, ATAU IDENTITAS SOSIAL LAINNYA.

Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa bahkan di kota-kota besar dengan cakupan kesehatan dan akses layanan yang baik sekalipun, masih ada kantong-kantong komunitas, keluarga dan anak-anak yang tidak memiliki akses ke layanan dasar, termasuk layanan kesehatan, pendidikan/sekolah, dan bantuan sosial. Meskipun jarak antara orang dan layanan umumnya bukan masalah besar, kedekatan fisik dengan fasilitas tidak selalu sesuai dengan aksesibilitas. Selain itu, beberapa komunitas perkotaan, seperti penghuni kawasan kumuh dan permukiman informal, seringkali terputus dari infrastruktur perkotaan yang penting, seperti jaringan air ledeng, sistem pengelolaan sampah, sanitasi layak, hunian terjangkau dan memadai, serta transportasi umum. Anak-anak hanya dapat merasakan rasa aman dan terlindungi seperti yang keluarga dan komunitas tempat mereka tinggal rasakan, yang berarti bahwa peningkatan akses ke layanan dasar dan infrastruktur perkotaan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan perkotaan adalah kunci untuk mengatasi kesejahteraan anak-anak di kota. Selain itu, mengingat kondisi hunian dan lingkungan merupakan faktor penting untuk berbagai aspek kesejahteraan, penting bagi Pemerintah untuk meningkatkan upayanya untuk meningkatkan kondisi hunian dan keamanan penghuni kawasan kumuh dan kaum miskin kota pada umumnya. Lokasi khusus tempat tinggal anak di kota seharusnya tidak menentukan kesejahteraan mereka.

Pemerintah kota juga harus berupaya untuk memfasilitasi akses administratif ke puskesmas, sekolah dan layanan dukungan sosial garda depan, serta memberikan bantuan pencatatan sipil untuk memungkinkan akses ke layanan lain. Mengingat tata kelola kota menjadi semakin kompleks, layanan mungkin mulai memerlukan beberapa bentuk identifikasi sebelum anak-anak dan kaum muda dapat mengaksesnya. Namun, pada saat yang sama, subpopulasi perkotaan seperti penghuni kumuh, penduduk permukiman informal, migran perdesaan sirkular, tunawisma dan anak jalanan, masih sering tidak terlihat oleh pemerintah kota. Ketika orang tidak memiliki dokumen hukum, layanan dasar ini tidak boleh menolak mereka. Sebaliknya, kota harus meningkatkan akses ke layanan pencatatan sipil sehingga mereka dapat memperoleh dokumen yang memadai. Mekanisme ini juga harus menangani kebutuhan dokumen para pengasuh, misalnya ketika mereka pertama kali kontak dengan program yang menawarkan layanan pekerjaan, makanan dan tempat tinggal.

Dalam beberapa hal, tinggal di kota tidak menjamin bahwa seorang anak akan mendapatkan manfaat dari layanan di kota. Misalnya, tingkat kelulusan sekolah menengah di daerah perkotaan tetap rendah dan data dari konsultasi menunjukkan bahwa hal ini mungkin sebagian karena ketidakmampuan anak-anak untuk menutupi biaya tambahan sekolah. Peserta lain mencatat bahwa mereka perlu mendapatkan pekerjaan untuk membayar uang sekolah dan tetap bersekolah. Oleh karena itu, membantu keluarga mengatasi kesulitan keuangan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan tetap penting dalam konteks perkotaan. Program pengentasan kemiskinan ini mungkin perlu lebih disesuaikan, terutama mengingat sifat kemiskinan perkotaan yang bersifat sementara dan dinamis. Program dan kegiatan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik khusus kaum miskin perkotaan di kota-kota tertentu, dan nilai bantuan keuangan mungkin perlu disesuaikan dengan biaya hidup masing-masing kota. Studi ini, misalnya, menemukan bahwa populasi migran, anak-anak yang tinggal di lingkungan informal atau permukiman kumuh, dan populasi yang tergusur atau terlantar, termasuk di antara kelompok yang paling kekurangan di kota-kota tempat kami melakukan konsultasi. Dengan demikian, mengidentifikasi populasi ini dan mengukur kerentanan mereka merupakan langkah penting menuju program pengentasan kemiskinan yang efektif di kota.

Meskipun akses ke pendidikan dasar meningkat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, akses ke perguruan tinggi masih membutuhkan banyak perbaikan. Mengingat kota-kota di Indonesia, terutama kota-kota besar seperti Jabodetabek,

semakin terintegrasi ke dalam ekonomi global, pendidikan tinggi dan kompetensi serta keterampilan yang disediakan oleh perguruan tinggi akan menjadi semakin penting bagi anak-anak untuk mengakses peluang kerja yang lebih baik. Apalagi, anak-anak dan kaum muda seringkali memiliki cita-cita untuk mengenyam pendidikan tinggi, dan melihatnya sebagai kendaraan utama untuk mobilitas sosial mereka. Namun, banyak anak menghadapi kendala keuangan dalam mengakses pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi juga menjadi salah satu faktor penarik utama generasi muda berpindah dari perdesaan ke perkotaan. Meningkatkan akses ke pendidikan tinggi, terutama bagi anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, akan berpotensi membantu memecahkan kemiskinan perkotaan antargenerasi dan mengurangi disparitas di dalam perkotaan.

Meskipun kota menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan, bagi banyak anak muda, termasuk mereka yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan, penghidupan yang menguntungkan dan jaminan kerja masih belum dapat diperoleh. Upaya untuk menyediakan pekerjaan yang lebih baik dan lebih aman memerlukan intervensi makrostruktur. Konsultasi ini menunjukkan bidang-bidang di mana program mata pencaharian bagi kaum muda dapat dilaksanakan. Pertama, perlu ada program untuk membantu transisi kaum muda dari sekolah ke dunia kerja. Program semacam itu dapat membantu mereka menghadapi pasar kerja dengan memberi mereka informasi tentang peluang kerja dan proses rekrutmen, dan dengan membantu mereka mengajukan lamaran kerja. Kedua, anak-anak yang putus sekolah membutuhkan akses dan bantuan untuk pendidikan kesempatan kedua dan/atau pelatihan pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan dan ijazah tidak hanya diperlukan bagi lulusan sekolah, tetapi juga bagi kaum muda pada umumnya untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar kerja yang selalu berubah sebagai struktur industri dan ekonomi. Terakhir, Pemerintah juga dapat memberikan dukungan untuk kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan yang tidak termasuk dalam pekerjaan formal.

PROGRAM DAN KEBIJAKAN DI PERKOTAAN HARUS BERUPAYA UNTUK MENGURANGI DAN MENCEGAH DAMPAK NEGATIF KEMISKINAN DAN BERBAGAI KEKURANGAN YANG DIALAMI OLEH ANAK-ANAK DAN KAUM MUDA.

Meskipun program-program untuk meningkatkan pendapatan keluarga secara umum diperlukan, program pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan kota harus memasukkan struktur dukungan kesejahteraan yang komprehensif untuk anak-anak,

keluarga, dan masyarakat yang rentan. Layanan dan sistem dasar yang relevan dengan anak-anak, seperti perawatan kesehatan, pendidikan dan perlindungan anak, harus mampu mengidentifikasi anak-anak yang berisiko tertinggal dan memberikan intervensi yang disesuaikan. Misalnya, layanan sosial dan sekolah harus dapat mengidentifikasi anak-anak yang sedang mengalami kesulitan, baik secara finansial maupun akademis, dan memberikan dukungan yang memadai untuk membantu mereka bertahan dan berkembang di sekolah.

Sistem tersebut terdiri dari perlindungan sosial, dukungan keluarga dan komponen perlindungan khusus. Di bawah elemen perlindungan sosial, Pemerintah harus menyediakan tenaga kerja sosial dan mampu membantu anak-anak dan kaum muda dari keluarga rentan untuk mengakses layanan kesehatan dan kesehatan mental, pendidikan, gizi, tempat tinggal dan pencatatan sipil. Para tenaga kerja ini juga harus membantu pengasuh dalam mengakses infrastruktur dasar, layanan keuangan dan mata pencaharian. Di bawah elemen dukungan keluarga, Pemerintah harus mengerahkan pekerja sosial terlatih untuk membantu pengasuh anak-anak di keluarga rentan. Para pekerja ini dapat:

- » memfasilitasi sesi komunitas tentang pengasuhan positif dan manajemen konflik
- » melakukan kunjungan rumah rutin
- » melakukan deteksi dini tanda bahaya
- » menawarkan intervensi pertolongan pertama
- » membuat rujukan lebih lanjut

Di bawah elemen perlindungan anak khusus, Pemerintah harus memberikan akses kepada keluarga rentan terhadap layanan khusus untuk mengelola setiap risiko kekerasan dan untuk menanggapi kejadian-kejadian yang merugikan. Dukungan tersebut dapat difasilitasi oleh pekerja berbasis masyarakat dan memberikan bantuan medis, hukum, psikososial, perlindungan, rumah aman dan perawatan alternatif bila diperlukan. Selain membantu anak-anak dan keluarga yang rentan di masyarakat, Pemerintah harus membentuk mekanisme penjangkauan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar dapat diakses dan perlindungan tersedia bagi anak-anak tunawisma dan kaum muda yang sedang mengalami transisi pindah. Pemerintah juga harus berusaha menemukan solusi yang paling inklusif, adil dan manusiawi untuk masalah hunian dan kepemilikan tanah bagi keluarga rentan di kota.

Upaya untuk memperkuat sistem kesejahteraan dan perlindungan anak nasional sebagian besar telah mengambil pendekatan top-down di mana

layanan formal yang dikelola Pemerintah diberikan untuk masyarakat. Namun, layanan tersebut belum menjangkau semua orang yang membutuhkan dan kurang memiliki kapasitas untuk memanfaatkan mekanisme informal perlindungan dan pengasuhan anak. Dengan demikian, sistem komprehensif top-down ini perlu terlibat dan mendukung inisiatif berbasis masyarakat. Pendekatan bottom-up dalam bentuk kegiatan berbasis masyarakat tidak hanya akan melengkapi pendekatan formal, tetapi juga akan membantu membuka kapasitas kreatif dan praktis serta meningkatkan solidaritas masyarakat dan daya tanggap masyarakat setempat dalam menangani kebutuhan anak.

KOTA HARUS MULAI MENANGANI MASALAH SELAIN AKSES, TERMASUK KUALITAS DAN KEANDALAN LAYANAN DAN INFRASTRUKTUR PUBLIK. TUJUANNYA TIDAK HANYA UNTUK MEMASTIKAN AKSES UNIVERSAL, TETAPI JUGA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN DAN FASILITAS TERSEBUT.

Lebih dari sekadar memastikan adanya akses ke layanan publik, lebih banyak intervensi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada anak-anak. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian ini, anak-anak dan kaum muda ingin menikmati pendidikan yang lebih berkualitas, kondisi kerja yang lebih baik, serta hunian yang lebih berkualitas dan terjangkau. Namun, ini hanyalah beberapa tantangan yang dihadapi anak-anak dan kaum muda di daerah perkotaan. Dalam hal pendidikan, misalnya, beberapa kota telah mengakui adanya disparitas akses ke sekolah negeri yang baik antar status sosial ekonomi. Kebijakan zonasi nasional baru-baru ini, yang mewajibkan sekolah negeri untuk mengalokasikan minimal 90 persen kursi mereka untuk siswa yang rumahnya berdekatan, merupakan intervensi ke arah yang benar (RISE SMERU, 2019). Di Jakarta, misalnya, baru-baru ini ada beberapa upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan yang baik dan terjangkau di sekolah negeri (RISE SMERU, 2019).

Hunian adalah masalah lain yang terus-menerus dibahas baik selama konsultasi maupun oleh para peneliti dan pembuat kebijakan. Penyediaan hunian yang terjangkau oleh masyarakat, seperti rusunawa, seringkali tidak memadai menurut standar Pemerintah karena ukuran keseluruhan tempat tinggal ini jauh lebih kecil dari yang dibutuhkan seluas 7,2 meter persegi. Program Pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau, terutama di perkotaan, harus fokus pada kualitas infrastruktur hunian dan lingkungan, seperti ruang per kapita yang memadai, akses air bersih yang andal, sanitasi dan

pengelolaan sampah yang baik, sekolah, dan ruang terbuka hijau yang dapat diakses. Selain itu, banyak proyek perumahan rakyat terletak di pinggiran kota yang jauh dari pusat kota dan fasilitas lainnya, seperti sekolah, sementara pada saat yang sama tidak memiliki transportasi umum yang dapat diandalkan. Anak-anak kurang mampu dan komunitas mereka semakin terdorong menjauh dari pusat kota akibat penggusuran dan biaya sewa yang tinggi.

Karena mobilitas fisik di dalam kota merupakan hal yang penting bagi anak-anak dan kaum muda, peningkatan cakupan, kualitas, dan keandalan transportasi umum akan memfasilitasi interkoneksi antara anak-anak (terutama dari komunitas perkotaan yang terpinggirkan) dan fasilitas serta peluang yang ditawarkan kota. Angkutan umum perkotaan juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan konektivitas dan integrasi kawasan perkotaan. Daerah perkotaan menawarkan lebih banyak kesempatan bagi semua warga di mana pun mereka tinggal, dan oleh karena itu mobilitas fisik mungkin sangat diperlukan. Kemacetan lalu lintas perlu ditanggulangi untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan mobilitas perkotaan. Studi ini menegaskan, terutama melalui kesaksian para peserta konsultasi, bahwa kurangnya sistem transportasi umum yang andal telah memaksa kaum muda untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli kendaraan pribadi. Ketika daerah mega-urban menjadi lebih padat, penting untuk memastikan bahwa transportasi umum dapat diakses, terjangkau dan inklusif untuk anak-anak serta kaum muda dan mereka yang terpinggirkan. Kebijakan transportasi perkotaan perlu berpedoman pada Pemerintah Pusat. Dengan perbaikan angkutan umum perkotaan, biaya dan waktu perjalanan dapat dikurangi dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan.

Ruang kota perlu dibuat inklusif dan aman, terutama bagi anak-anak, kaum muda, lansia, dan orang dengan disabilitas. Para peserta dalam konsultasi studi ini mengkonfirmasi bahwa anak-anak dan kaum muda menginginkan peningkatan fasilitas perkotaan, seperti taman, perpustakaan umum, dan fasilitas olahraga. Setelah aksesibilitas ke ruang kota dan fasilitas umum telah tercapai, anak-anak dan remaja dari semua kelompok dan latar belakang akan memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati ruang yang aman ini dan dapat berpartisipasi penuh dan berkembang.

PROGRAM DAN KEBIJAKAN DI PERKOTAAN HARUS MENINGKATKAN INKLUSIVITAS DENGAN MEMFASILITASI PARTISIPASI PUBLIK YANG BERMAKNA DARI ANAK-ANAK DAN KAUM

MUDA SEHINGGA KAWASAN PERKOTAAN MENJADI LEBIH BERKELANJUTAN DAN RAMAH ANAK.

Studi ini menunjukkan bahwa anak-anak dan kaum muda termasuk kelompok yang paling terpinggirkan di banyak tempat di perkotaan. Mereka sering dikecualikan dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan di komunitas mereka karena:

- » kurangnya wadah partisipasi masyarakat yang inklusif dan aman
- » norma-norma gender dan sosial yang melemahkan peran anak-anak dan kaum muda dalam komunitas mereka
- » kapasitas terbatas untuk membentuk dan mengungkapkan pendapat
- » sumber daya yang terbatas untuk keterlibatan yang bermakna dan aman bagi anak-anak dan kaum muda

Anak-anak dan kaum muda yang terpinggirkan, seperti yang ditunjukkan melalui wawancara yang dilakukan selama penelitian ini, bergulat dengan masalah struktural, seperti kemiskinan dan akses ke layanan dasar berkualitas, dan kerentanan mereka semakin diperparah oleh pandemi COVID-19. Terlepas dari kendala tersebut, anak-anak dan kaum muda memiliki aspirasi untuk komunitas mereka, dan mereka terlibat dalam inisiatif komunitas untuk memecahkan banyak masalah perkotaan. Motivasi mereka untuk berpartisipasi beragam, didasarkan pada motif pribadi untuk pengembangan diri (pengembangan kapasitas), dan didorong oleh keinginan mereka untuk mendapatkan fasilitas perkotaan yang lebih baik dan akses yang lebih baik ke berbagai layanan. Dengan demikian, berinvestasi dalam memperkuat lingkungan yang mendukung adalah cara strategis untuk membangun tempat perkotaan yang berkelanjutan untuk semua orang.

Dalam konteks implementasi inisiatif Kota Ramah Anak, penelitian ini menegaskan ketimpangan yang terus-menerus dialami oleh anak-anak dan kaum muda yang tinggal di kota. Untuk melibatkan anak-anak dan kaum muda secara bermakna, kebijakan dan program perkotaan perlu memenuhi situasi dan kebutuhan anak-anak dan kaum muda, terutama mereka yang paling rentan karena mereka sering kali tidak terlihat sehingga dikecualikan dari proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, pembuat kebijakan harus mengakui bahwa anak-anak dan kaum muda yang rentan memiliki aspirasi penting dan bahwa mereka dapat berkontribusi pada inisiatif perkotaan. Anak-anak dan kaum muda bukan hanya warga masa depan, tetapi mereka juga memiliki kebutuhan yang khusus, beragam, dan berbeda-beda di masa kini.



Ini berarti bahwa wadah partisipasi yang dibentuk untuk menginformasikan proses pembuatan kebijakan perlu melibatkan anak-anak dan kaum muda dari semua latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari berbagai kelompok usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi dan disabilitas dan dengan karakteristik sosial dan budaya lainnya. Untuk melakukannya, titik awal yang strategis adalah dengan memberikan kesempatan pengembangan keterampilan bagi beragam kelompok anak-anak dan kaum muda serta pemangku kepentingan dewasa untuk memahami partisipasi yang berarti dan melatih mereka dengan keterampilan yang relevan seperti (namun tidak terbatas pada) bekerja sama dalam lingkungan yang mendukung dan inklusif.

Inisiatif partisipasi anak dan kaum muda yang diawasi pemerintah, seperti Forum Anak dan Musrenbang, perlu memastikan masuknya lebih banyak anak muda yang kurang terwakili, terutama mereka yang paling rentan. Ini termasuk memberi mereka keterampilan yang diperlukan, informasi dan sumber daya ramah anak dan kaum muda untuk terlibat dalam forum pembangunan. Meskipun partisipasi anak dan pemuda dalam Musrenbang dan Forum Anak merupakan perkembangan yang menjanjikan, banyak anak muda yang tidak mengetahui forum semacam itu dan tidak tahu bagaimana berpartisipasi di dalamnya. Survei U-Report pada tahun 2020 yang melibatkan 1.687 responden menemukan bahwa 60 persen anak muda tidak tahu tentang Musrenbang atau Forum Anak, dan 62 persen tidak tahu cara ikut berpartisipasi (U-Report Indonesia, 2020c). Selain itu, anak-anak dan kaum muda dalam survei ini menyatakan perlunya lebih banyak pelatihan tentang cara mengungkapkan pendapat mereka di forum publik (34 persen) serta kebutuhan akan informasi lebih lanjut tentang cara berpartisipasi (22 persen).

Studi ini menunjukkan bahwa partisipasi dapat berwujud dalam berbagai cara, dan tidak terbatas hanya pada bentuk partisipasi masyarakat yang mengadvokasi perubahan kebijakan atau penyampaian program. Sebaliknya, anak-anak dan kaum muda sering

terlibat dalam inisiatif yang bertujuan untuk mendorong solidaritas masyarakat dan inklusi kaum muda dalam kegiatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ada banyak cara yang beragam untuk melibatkan anak-anak dan kaum muda secara bermakna melalui berbagai jenis pendekatan (termasuk melalui penggunaan teknologi digital) atau pada berbagai tahap proses pengambilan keputusan.

Penting agar partisipasi anak-anak dan kaum muda:

- » dilakukan secara sukarela
- » termasuk dalam berbagai tahap proses
- » disajikan kepada anak muda sebagai sesuatu yang ramah dan menarik
- » dilakukan di ruang yang aman dan tidak menghakimi
- » didukung oleh modalitas yang memadai, seperti pengembangan kapasitas untuk anak-anak dan kaum muda (termasuk, namun tidak terbatas pada pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan kepemimpinan)
- » didukung oleh peningkatan kapasitas dan dukungan orang dewasa untuk pembagian kekuasaan yang tulus

Komitmen dan peran orang dewasa penting untuk memastikan ketersediaan wadah dan sumber daya, dan untuk memfasilitasi berbagi pengetahuan sehingga kelompok dari generasi yang berbeda dapat berkumpul. Membangun kemitraan kaum muda-dewasa yang kuat dalam hal ini sangat penting untuk membangun tempat-tempat perkotaan yang difungsikan untuk beragam generasi dan untuk mengurangi ketegangan antargenerasi.

Dalam mengembangkan kebijakan dan program untuk partisipasi anak dan kaum muda, para pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa kerangka kebijakan atau program secara jelas mendefinisikan konsep 'partisipasi', siapa kelompok sasarannya, dan apa pendekatan dan prinsip yang harus dipatuhi oleh pemangku kepentingan. Pedoman terbaru UNICEF '*Engaged and Heard! Guidelines for Adolescent Participation and Civic Engagement*' (UNICEF, 2020) menampilkan sejumlah persyaratan dasar dan mencantumkan empat komponen partisipasi yang bermakna:

- » ruang (kesempatan yang aman dan inklusif untuk membentuk dan menyuarakan pandangan)
- » suara (ekspresi pandangan harus difasilitasi secara bebas dalam media yang dipilih)
- » pengaruh (pandangan harus ditindaklanjuti sebagaimana mestinya)
- » audiens (pandangan harus didengarkan)

Publikasi UNICEF lainnya juga menyarankan kerangka konseptual untuk partisipasi yang bermakna dan merekomendasikan agar pembuat kebijakan dan praktisi mengembangkan indikator yang relevan untuk mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan (UNICEF, 2018b).

Terakhir, partisipasi masyarakat yang bermakna mensyaratkan bahwa ruang publik dapat diakses dan aman, dan ruang tersebut adalah tempat di mana anak-anak dan kaum muda dapat berkumpul dan berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Ketidakamanan di ruang publik, seperti kekerasan dan pelecehan publik, dapat membuat kaum muda, terutama anak perempuan dan wanita muda, enggan berpartisipasi dalam komunitas mereka dan dalam kehidupan sipil perkotaan pada umumnya. Dengan demikian, penanganan kekerasan publik melalui penerapan mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat dapat berkontribusi pada ruang partisipasi masyarakat yang aman dan bermakna. Selain itu, partisipasi yang bermakna oleh anak-anak dan kaum muda dalam interaksi yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas di antara tetangga dapat menjadi cara untuk mencegah kekerasan publik.

INVESTASI YANG LEBIH BESAR DALAM SISTEM MANAJEMEN DATA LINTAS SEKTOR DIPERLUKAN UNTUK MENGINFORMASIKAN TATA KELOLA PERKOTAAN SECARA LEBIH EFEKTIF.

Perencanaan dan penyampaian program dan layanan hanya dapat efektif dan inklusif jika didasarkan pada data kependudukan inklusif yang menghitung dan mencatat setiap orang, mengikuti peristiwa kehidupan mereka sejak lahir, dan dapat dioperasikan dengan data

sektoral dari kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, program perumahan dan infrastruktur. Pemerintah kota juga membutuhkan data morbiditas dan mortalitas yang lebih baik untuk memfasilitasi deteksi dini masalah dan untuk memahami implikasi dari masalah sosial, kesehatan masyarakat, iklim dan lingkungan. Interoperabilitas antara data set pencatatan sipil yang komprehensif dan layanan dasar akan memberikan informasi yang lebih rinci tentang kerentanan individu dalam populasi. Melalui deteksi dini, Pemerintah dapat merespons masalah secara tepat dan merencanakan program mitigasi dan pencegahan yang lebih efektif. Selain itu, pemerintah kota harus berinvestasi dalam mengumpulkan data tentang populasi yang kurang terlihat, terutama anak-anak dan kaum muda yang terpinggirkan. Studi ini menemukan bahwa beberapa kategori populasi paling rentan di kota-kota seringkali tidak masuk dalam daftar populasi. Kelompok yang dikesualikan tersebut meliputi anak-anak perkotaan dan keluarga yang tinggal di daerah kumuh, permukiman informal, masyarakat yang mengalami penggusuran dan masyarakat yang bermigrasi dari daerah perdesaan. Penting untuk dicatat bahwa kota yang berbeda mungkin memiliki kategori yang berbeda dan unik dari populasi rentan dan terpinggirkan.

Penting juga untuk dicatat bahwa sistem manajemen data yang lebih canggih semacam ini harus dikembangkan dengan tujuan menghasilkan bukti untuk perencanaan dan evaluasi. Ada hal yang perlu diwaspadai, yaitu bahwa pemerintah kota modern dapat menyalahgunakan data set tersebut dan menggunakannya sebagai sistem pengawasan yang dapat memfasilitasi profiling dan digunakan untuk tujuan pengendalian kejahatan. Jika tidak dirancang dengan tepat, sistem tersebut justru dapat mendiskriminasi dan menyebabkan kerugian bagi mereka yang paling rentan, daripada membantu mereka.



PROGRAM DAN KEBIJAKAN DI PERKOTAAN HARUS MEMITIGASI KONSEKUENSI NEGATIF DARI PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN MEMPERTIMBANGKAN KETERPAPARAN, SENSITIVITAS, DAN KETIDAKMAMPUAN YANG TIDAK PROPORSIONAL YANG DIHADAPI OLEH ANAK-ANAK DAN KAUM MUDA YANG RENTAN DI DAERAH PERKOTAAN.

Studi ini menemukan bahwa upaya untuk meningkatkan aspek-aspek tertentu dari sisi kesejahteraan, terutama pertumbuhan ekonomi, dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan terhadap aspek lain dari kehidupan kota. Namun, kota juga dihadapkan pada sejumlah ancaman, seperti naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim. Pandemi telah menunjukkan bahwa konsekuensi negatif dari pembangunan perkotaan dan risiko eksternal sering kali secara tidak proporsional menimpa komunitas perkotaan yang rentan, sehingga semakin merampas dan meminggirkan anak-anak dan kaum muda mereka. Berdasarkan data dari konsultasi, jelas bahwa proyek konstruksi, seperti reklamasi lahan di Makassar, telah secara radikal mengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan perkotaan yang tinggal di tepi teluk dengan memutuskan hubungan mereka dari laut dan menjadikan mencari ikan bukan lagi pilihan mata pencaharian yang layak tanpa adanya akses ke pekerjaan alternatif yang menguntungkan dan aman. Selain itu, proyek reklamasi lahan ini telah membatasi akses ke ruang hijau dan ruang publik untuk anak-anak di lingkungan sekitar, sehingga semakin membatasi ruang aman mereka.

Konsumsi energi yang meningkat, mobilitas yang lebih tinggi, dan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi menimbulkan masalah kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang berdampak negatif bagi kesehatan anak. Kurangnya transportasi umum yang aman dan andal mendorong pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi, yang selanjutnya mengarah pada peningkatan risiko kecelakaan pada anak-anak. Untuk melindungi mereka dari risiko tersebut, anak-anak dikurung di ruang tertentu dan diangkut dari satu tempat ke tempat lain, yang meningkatkan ketidakaktifan mereka. Hal ini terkait dengan sejumlah masalah kesehatan fisik dan mental. Penyediaan air ledeng yang tidak memadai mendorong rumah tangga untuk bergantung pada air tanah, yang mengarah pada percepatan penurunan tanah dan selanjutnya meningkatkan risiko dan kejadian banjir di kota-kota. Pada saat yang sama, untuk mengurangi banjir, orang-orang yang tinggal di tepi sungai dan teluk digusur dari permukiman mereka dan dipindahkan ke pinggiran kota, yang mana memutus mata pencaharian utama mereka.

Ini semua adalah masalah kompleks yang dihadapi kota. Ke depannya, kota perlu mengambil langkah

yang hati-hati dan terinformasi dengan berupaya menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan perkotaan. Oleh karena itu, harus ada tindakan untuk memastikan bahwa eksternalitas dan risiko dinilai, dimitigasi, dan dikurangi dengan tepat. Bagian penting dari upaya ini adalah memahami tingkat keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif yang berbeda dari komunitas perkotaan yang beragam sehubungan dengan guncangan, ancaman, dan eksternalitas. Identifikasi keterpaparan dan sensitivitas populasi rentan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan dan pembangunan kota untuk mengurangi konsekuensi sosial, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Anak-anak dan kaum muda, sebagai subpopulasi, harus diberi prioritas dalam perlindungan terhadap guncangan dan risiko tersebut.

Bahkan dengan adanya penilaian risiko dan rencana mitigasi terbaik sekalipun, guncangan, ancaman, dan eksternalitas akan tetap terjadi. Karena dampaknya tidak dapat dihindari, Pemerintah harus siap membantu penduduk yang paling rentan untuk menghadapi guncangan semacam itu dan membekali masyarakat dengan kapasitas adaptif. Bantuan berkelanjutan, layanan publik yang memadai dan dapat diakses, dan kesiapsiagaan tanggap bahaya adalah beberapa di antara banyak tindakan yang dapat diambil kota untuk memastikan bahwa anggota masyarakat dapat mengatasi keadaan mereka saat ini. Lebih lanjut, anak-anak dan kaum muda dari populasi perkotaan yang rentan, serta komunitas mereka pada umumnya, harus dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan mengenai perkembangan perkotaan yang berpotensi mempengaruhi kehidupan mereka.

Selain usulan di atas, studi ini merekomendasikan langkah-langkah berikut untuk melakukan dialog terkait temuan:

- » Diskusikan hasil temuan dengan anak-anak dan kaum muda yang mewakili suara dari latar belakang yang lebih beragam dan daerah selain perkotaan
- » Diskusikan hasil temuan dengan BPS, terutama untuk mengeksplorasi operasionalisasi definisi perkotaan, penerapannya dalam survei yang ada, dan di mana dan bagaimana data dapat ditingkatkan untuk menjadi basis informasi dalam pembuatan kebijakan
- » Diskusikan hasil temuan dengan pemerintah kota dan jelajahi kemungkinan perubahan kebijakan yang relevan
- » Dokumentasikan hasil dari tiga langkah sebelumnya, dan rencanakan serta lakukan analisis lebih lanjut sesuai kebutuhan

9



REFERENSI

- Agarwal, Siddharth, Eleri Jones dan Shabnam Verma, 'Migrant Adolescent Girls in Urban Slums India: Aspirations, Opportunities and Challenges', *Indian Journal of Youth and Adolescent Health*, vol.3, no. 4, Mei 2017, hlm. 8–21.
- Agustina, Rina, et al., 'Association of Food-Hygiene Practices and Diarrhea Prevalence among Indonesian Young Children from Low Socioeconomic Urban Areas', *BMC Public Health*, vol. 13, no 1, Oktober 2013, hlm. 977.
- Ahsan, Karar Zunaid et al., 'Effects of Individual, Household and Community Characteristics on Child Nutritional Status in the Slums of Urban Bangladesh', *Archives of Public Health*, vol. 75, no. 1, Februari 2017, hlm. 9.
- Andrade Neto, Flávio, et al., 'Active and Sedentary Behaviours in Children Aged 7 to 10 Years Old: The Urban and Rural Contexts, Brazil', *BMC Public Health*, vol. 14, no. 1, November 2014, hlm. 1174–1174.
- Arora, Monika, et al., 'Impact of Tobacco Advertisements on Tobacco Use among Urban Adolescents in India: Results from a Longitudinal Study', *Tobacco Control*, vol. 21 no. 3: Mei, 2012, hlm.318–24.
- de Assis Araujo, Monica Seefelder et al., 'Maternal-Child Exposure to Metals during Pregnancy in Rio de Janeiro City, Brazil: The Rio Birth Cohort Study of Environmental Exposure and Childhood Development (PIPA Project)', *Environmental Research*, vol. 183, no. 2, April 2020.
- Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional et al., *Racing Against Time, A Policy Paper on the Prevention and Handling of COVID-19 Impacts on Children and Vulnerable Individuals*, BAPPENAS, Jakarta, 2020.
- Bargain, Olivier, dan Ulugbek Aminjonov, 'Trust and Compliance to Public Health Policies in Times of COVID-19', Discussion paper, Institute of Labor Economics, Bonn, Mei 2020.
- Benke, Christoph, et al., 'Lockdown, Quarantine Measures, and Social Distancing: Associations with Depression, Anxiety and Distress at the Beginning of the COVID-19 Pandemic among Adults from Germany', *Psychiatry Research* vol. 293, November 2020.
- Bertoldi, Andréa Dâmaso, et al., 2019. 'Trends and Inequalities in Maternal and Child Health in a Brazilian City: Methodology and Sociodemographic Description of Four Population-Based Birth Cohort Studies, 1982–2015', *International Journal of Epidemiology* Vol. 48, Supp.1, Maret 2019, pp: i4–15.
- Bexley, Angie dan Sharon Bessell, 'Post-COVID 19: Deepening deprivation for young people', *New Mandala*, 21 Mei 2020, <www.newmandala.org/post-covid-19-deepening-deprivation-for-young-people>.
- Boggiano, Victoria L., et al., 2017. 'Protecting, Balancing, And Confronting: Health-Seeking Among Homeless Youth In Ho Chi Minh City, Vietnam', *International Journal of Child Youth and Family Studies*, vol. 8, No.3/4, Desember 2017, hlm.1.
- Bordin, Isabel A., Ivens H. Pires, dan Cristiane S. Paula. 2013. 'Lifetime Paid Work and Mental Health Problems among Poor Urban 9-to-13-Year-Old Children in Brazil'. *Scientific World Journal*, 4 November 2013, hlm. 1–7.
- Borges, Tássia Silvana, et al., 2017. 'Oral Hygiene, Dietary Habits and Prevalence of Dental Caries in Adolescents from Rural and Urban Areas in Rio Grande Do Sul, Brazil', *RGO - Revista Gaúcha de Odontologia*, vol. 65, no. 2, April-Juni 2017, hlm. 139–47.
- Carvalho, Max L., et al., 2010. 'A Geographical Population Analysis of Dental Trauma in School-Children Aged 12 and 15 in the City of Curitiba-Brazil'. *BMC Health Services Research*, vol.10, no. 203, 13 Juli 2010.
- Chen, Yvonne Jie, Namrata Chindarkar, dan Yun Xiao, 'Effect of Reliable Electricity on Health Facilities, Health Information, and Child and Maternal Health Services Utilization: Evidence from Rural Gujarat, India'. *Journal of Health, Population and Nutrition*, vol.38, no. 1, Februari 2019.
- Choudhury, Nuzhat, et al., 2012. 'Beliefs and Practices During Pregnancy and Childbirth in Urban Slums of Dhaka, Bangladesh', *BMC Public Health*, vol.12, no.1, September 2012.
- Clendenning, Jessica. 2018. 'Is Education the Golden Plough?' *Inside Indonesia*, Vol. 134. Oktober–Desember 2018, <www.insideindonesia.org/is-education-the-golden-plough>, diakses pada 23 Desember 2020.
- Dandona, Rakhi, et al., 'Road Use Pattern and Risk Factors for Non-Fatal Road Traffic Injuries among Children in Urban India', *Injury*, vol.42, no. 1, Januari 2011, hlm. 97–103.
- Daral, Shailaja, Anita Khokhar, dan Shishir Pradhan, 'Prevalence and Determinants of Child Maltreatment among School-Going Adolescent Girls in a Semi-Urban Area of Delhi, India', *Journal of Tropical Pediatrics*, vol.62, no. 3, 14 Januari 2016, hlm. 227–240.

- Dharmawan, Goldy, F., 'The Impact of School Zoning System in State Schools for Teachers and Students', *RISE Programme in Indonesia*, 24 Juni 2019.
- Duff, Putu, Santi Kusumaningrum, dan Lindsay Stark, 'Barriers to Birth Registration in Indonesia', *The Lancet Global Health* vol.4 no. 4, April 2016, hlm. e234–35.
- Every-Palmer, Susanna, et al., 2020. 'Psychological Distress, Anxiety, Family Violence, Suicidality, and Wellbeing in New Zealand during the COVID-19 Lockdown: A Cross-Sectional Study', *PLoS ONE*, vol.15, no. 11, 20 Oktober 2020.
- da Fonseca, Cátia R. B., et al., 'Anemia and Nutritional Status of Preschool Children: Comparison between Two Childhood Education Centres in Botucatu City, Brazil'. *Epidemiology (Sunnyvale)* vol. 6 no. 6, Desember 2016, hlm. 2161–1165.
- Fountoulakis, Konstantinos N. et al., 'Self-Reported Changes in Anxiety, Depression and Suicidality during the COVID-19 Lockdown in Greece', *Journal of Affective Disorders*, vol. 279, November 2020, hlm.624–29.
- Ghei, Kirti, Siddharth Agarwal, Malavika A. Subramanyam, dan S. V. Subramanian. 2010. 'Association Between Child Immunization and Availability of Health Infrastructure in Slums in India'. *Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine*, vol.164 no. 3, Maret 2010, hlm.243–249.
- Giao, Huynh, et al., 2019. 'Stunting and Overweight among 12-24-Month-Old Children Receiving Vaccination in Ho Chi Minh City, Vietnam', *BioMed Research International*, Februari 2019.
- Goldman, Philip S. et al., 'The Implications of COVID-19 for the Care of Children Living in Residential Institutions', *The Lancet Child and Adolescent Health*, vol. 4, no. 6, Juni 2020.
- Goli, Srinivas, Riddhi Doshi, and Arokiasamy Perianayagam. 2013. 'Pathways of Economic Inequalities in Maternal and Child Health in Urban India: A Decomposition Analysis', *PloS One*, vol. 8, no. 3, Maret 2013.
- Gonçalves, Michele Martins, Cláudio Rodrigues Leles, dan Maria do Carmo Matias Freire. 2013. 'Associations between Caries among Children and Household Sugar Procurement, Exposure to Fluoridated Water and Socioeconomic Indicators in the Brazilian Capital Cities', *International Journal of Dentistry*, November 2013.
- Goodburn, Charlotte. 2014. 'Rural–Urban Migration and Gender Disparities in Child Healthcare in China and India', *Development and Change*, vol.45, no. 4, 28 Mei 2014, hlm. 631–55.
- Goyal, Neha, 'A Comparison of Nutritional Status of Rural and Urban Adolescent Girls from Schools in North India: A Cross-Sectional Study'. *International Journal of Community Medicine and Public Health*, vol. 5, no. 5, April 2018.
- Powell, Mary Ann et al., *Ethical Research Involving Children*, United Nations Children's Fund Innocenti Research Centre, 2013.
- Guimarães, Rafael Alves, et al., 'Use of Illicit Drugs by Adolescents and Young Adults of an Urban Settlement in Brazil', *Revista Da Associação Médica Brasileira*, vol.64, no. 2, Februari 2018, hlm.114–118.
- Hackenbroch, Kirsten, Mohammad Shafayat Hossain, dan Md Asif Rahman, 'Coping with Forced Evictions: Adaptation Processes of Evicted Slum Dwellers in Dhaka', *Trialog* vol.98, no. 3, 2008, hlm. 17–23.
- Handayani, Wiwandari, dan Novia Riska Kumalasari. 2015. 'Migration as Future Adaptive Capacity: The Case of Java — Indonesia', in *Environmental Change, Adaptation and Migration*, edited by Felicitas Hillmann et al. (eds.), 2015, Palgrave Macmillan, London.
- Horgan, Deirdre, et al., 'Children's Participation: Moving from the Performative to the Social', *Children's Geographies*, vol.15, no. 3, 2017, hlm. 274–88.
- Hornik, Robert et al., 'Association of COVID-19 Misinformation with Face Mask Wearing and Social Distancing in a Nationally Representative US Sample', *PsyArXiv*, 18 Agustus 2020, Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania, Philadelphia.
- Ichwatus, Sholihah Puput, dan Chen Shaojun, 'Impoverishment of Induced Displacement and Resettlement (DIDR) Slum Eviction Development in Jakarta Indonesia'. *International Journal of Urban Sustainable Development*, vol. 10, no. 3, 2018, hlm. 263–78.
- Ilhami, Fadhli, 'Struggling for a Job', *Inside Indonesia*, 2018, www.insideindonesia.org/struggling-for-a-job, diakses pada 23 Desember 2020.
- Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Indonesia National Report for Habitat III*, Januari 2016.

- International Labour Office, *Global Employment Trends for Youth 2020: Technology and the Future of Jobs*, ILO, Jenewa, 9 Maret 2020.
- International Labour Organization, United Nations Children's Fund, World Bank Group, *Understanding Children's Work and Youth Employment Outcomes in Indonesia*, national seminar presentation, Jakarta, Juni 2012.
- Insani, Putria Novia Choiri, Rimbawan Rimbawan, dan Eny Palupi, 'Dietary Habits and Nutritional Status among School Children in Rural and Urban Areas: A Comparative Study from Bogor, Indonesia'. *Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society* vol.6, no. 2, 2018, hlm. 55–66.
- Islam, Akimul, 'Assessment of Nutritional Status and Its Determinants Among Pre-School Children Within Dalit Communities of Jessore City in Bangladesh: A Cross-Sectional Study', *International Journal of Nutrition and Food Sciences* vol.7, no. 2, 2018.
- Jackson, Michelle, et al., 'Thriving beyond Survival: Understanding Utilization of Perinatal Health Services as Predictors of Birth Registration: A Cross-Sectional Study'. *BMC International Health and Human Rights* vol.14, no. 1, 2014.
- Jones, Gavin, 'The 2010 – 2035 Indonesian Population Projection. Understanding the Causes, Consequences and Policy Options for Population and Development', Discussion paper, United Nations Population Fund Indonesia, Jakarta, 2014.
- Jones, Gavin, dan Wahyu Mulyana, 'Urbanization in Indonesia', Monograph Series No. 4, United Nations Population Fund Indonesia, Jakarta, 2015.
- Kelly, Gabrielle, and Peter Lloyd-Sherlock. 2020. 'Social Protection Responses to COVID-19: Actions That Can Make a Difference for Older People', webinar, 9 April 2020.
- Kementerian PPN/Bappenas, 'Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024', Republik Indonesia, April 2020, <<https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/4q7Cb7FBxavq3IK>>, diakses pada 7 Mei 2021.
- Khandelwal, Vishal, et al., 'Hookah Addiction among Adolescents of Five Major Cities in Central India', *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, vol.29, no. 6, 2016.
- Koesoemawiria, Edith, 'Indonesia: Evicted Community in Jakarta Moves Forward', *Blick Wechsel*, Maret 2017.
- Kumar, Abhishek, dan Sanjay K. Mohanty, 'State of Child Health among Poor and Non-Poor in Urban India', *Genus*, vol. 67, no. 1, 2011, hlm. 1–19.
- Kusno, Abidin, 'Power and Time Turning: The Capital, the State and the Kampung in Jakarta', *International Journal of Urban Sciences*, vol.19, no. 1, 2015, hlm. 53–63.
- Kusumaningrum, Santi, et al., *Back to What Counts: Birth and Death in Indonesia*. Jakarta, Indonesia: The Center on Child Protection Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), 2016.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 'Atas Nama Pembangunan: Laporan Penggusuran Paksa Di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015', LBH Jakarta, Jakarta, 2016a.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 'Mereka Yang Terasing: Laporan Pemenuhan Hak Atas Perumahan Yang Layak Bagi Korban Penggusuran Paksa Jakarta Yang Menghuni Rumah Susun', LBH Jakarta, Jakarta, 2016b, <www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2016/12/Laporan-Penelitian-Rumah-Susun_LBH-Jakarta_2016.pdf>, diakses pada 23 Juli 2021.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 'Seperti Puing: Laporan Penggusuran Paksa Di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2016', LBH Jakarta, Jakarta, 2017.
- Leite, Fernanda Helena Marrocos, et al., 2018. 'Association of Neighbourhood Food Availability with the Consumption of Processed and Ultra-Processed Food Products by Children in a City of Brazil: A Multilevel Analysis', *Public Health Nutrition*, vol.21, no. 1, 2018, hlm. 189–200.
- Leite, Maria Alvim, et al., 'Perceptions of Neighbourhood Environments and Their Association with Overweight in Children, Adolescents and Caretakers in a Medium-Sized City in Brazil', *Nutrire*, vol.42, no. 1, 2017.
-

- Lwin, May O., et al., 'Media Exposure and Parental Mediation on Fast-Food Consumption among Children in Metropolitan and Suburban Indonesia', *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, vol.26, no. 5, 2017.
- Mahmudiono, Trias, et al., 2018. 'Household Food Insecurity as a Predictor of Stunted Children and Overweight/Obese Mothers (SCOWT) in Urban Indonesia'. *Nutrients* vol.10, no. 5, 535. doi: 10.3390/nu10050535.
- Mai, Thi My Thien, et al., 'The Double Burden of Malnutrition in Vietnamese School-Aged Children and Adolescents: A Rapid Shift over a Decade in Ho Chi Minh City', *European Journal of Clinical Nutrition*, 2020.
- Mathew, Naina, et al., 'Stress and Coping among Adolescents in Selected Schools in the Capital City of India', *Indian Journal of Pediatrics*, vol. 82, no. 9, 2015, hlm. 809–816.
- McDonald, Peter, et al., 'Migration and Transition to Adulthood: Education and Employment Outcomes among Young Migrants in Greater Jakarta', *Asian Population Studies*, vol. 9, no. 1, 2013, hlm. 4–27.
- Mello, Andrea F., et al., 'Exposure to Maltreatment and Urban Violence in Children Working on the Streets in Sao Paulo, Brazil: Factors Associated with Street Work', *Brazilian Journal of Psychiatry*, vol.36, no. 3, 2014, hlm. 191–98.
- Monkkonen, Paavo. 2013. "Urban Land-Use Regulations and Housing Markets in Developing Countries: Evidence from Indonesia on the Importance of Enforcement." *Land Use Policy* 34 (September): 255–64. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.03.015>.
- Moura, Leides Barroso Azevedo, Cesar de Oliveira and Ana Maria Nogales Vasconcelos, 'Violence and Youth in a Territory of the Metropolitan Area of Brasília, Brazil: A Socio-Spatial Approach' *Ciencia Saúde Coletiva*, vol. 20, no. 11, 2015, hlm. 3395–3405.
- Nallari, Anupama, 'All We Want Are Toilets inside Our Homes! The Critical Role of Sanitation in the Lives of Urban Poor Adolescent Girls in Bengaluru, India', *Environment and Urbanization*, vol.27, no. 1, Januari 2015, hlm. 73–88.
- Nasir, Sudirman, Doreen Rosenthal dan Timothy Moore, 'The Social Context of Controlled Drug Use amongst Young People in a Slum Area in Makassar, Indonesia'. *International Journal of Drug Policy*, vol.22, no. 6, 2011, hlm. 463–70.
- Nguyen, Huong Thu, et al., 'Factors Associated with Physical Growth of Children during the First Two Years of Life in Rural and Urban Areas of Vietnam', *BMC Pediatrics*, vol.13, no. 1, September 2013.
- Nguyen, Thi Phuoc Lai dan Sean Chanmony, 'What Shapes Young People's Concerns About Water-Use Resources? The Case of Ho Chi Minh City, Vietnam', *WIT Transactions on Ecology and the Environment*, vol. 215, 2018, hlm. 335–344.
- Nugroho, Arinto, Budi Hermono dan Irfa Ronaboyd, 'The Rights of the Children Who Conduct Ngenger in Javanese Society', *Proceedings of the 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)*, Atlantis Press, Makassar, Indonesia, 2020.
- Nurwanti, Esti, et al., 2019. 'Rural–Urban Differences in Dietary Behavior and Obesity: Results of the Riskesdas Study in 10–18-Year-Old Indonesian Children and Adolescents', *Nutrients*, vol.11, no. 11, 2019.
- Octavia, Joanna, 'Towards a National Database of Workers in the Informal Sector: COVID-19 Pandemic Response and Future Recommendations', *CSIS Indonesia*, 2020.
- de Oliveira Ramos, Dandara, et al., 'The Role of City Income Inequality, Sex Ratio and Youth Mortality Rates in the Effect of Violent Victimization on Health-Risk Behaviors in Brazilian Adolescents', *Social Science & Medicine*, vol. 181, 2017, hlm. 17–23.
- Parajára, Magda Do Carmo, et al., 'Associations of the Perceived Neighborhood Environment and Screen Time in Adolescents Living in a Medium-Sized City in Brazil: A Cross-Sectional Study', *International Journal of Environmental Health Research*, 2019.
- Parikh, Rachana, et al., "'It Is like a Mind Attack": Stress and Coping among Urban School-Going Adolescents in India', *BMC Psychology*, 2019.
- Patel, Amit and Phoram Shah, 'Rethinking Slums, Cities, and Urban Planning: Lessons from the COVID-19 Pandemic', *Cities & Health*, 2020, hlm. 1–3.
-

- Patel, Sejal, Richard Sliuzas dan Navdeep Mathur, 'The Risk of Impoverishment in Urban Development-Induced Displacement and Resettlement in Ahmedabad', *Environment and Urbanization*, vol. 27, no. 1, 2015, hlm.231–56.
- Pham, Nhu Ngoc K., et al., 'Rural-to-Urban Migration in Vietnam: Conceptualized Youth's Vulnerabilities in the City'. *International Journal of Migration, Health and Social Care*, vol.14, no. 1, 2018, hlm.117–30.
- Phuong, Tran Bich, et al., 'Factors Associated with Health Risk Behavior among School Children in Urban Vietnam'. *Global Health Action*, vol.6, no. 1, 2013, hlm. 1–9.
- Pineda, Victor Santiago dan Jason Corburn, 'Disability, Urban Health Equity, and the Coronavirus Pandemic: Promoting Cities for All', *Journal of Urban Health*, vol.97, no. 3, 2020, hlm. 336–341.
- Pörtner, Claus C., et al., 'Differences in Child Health Across Rural, Urban, and Slum Areas: Evidence From India', *Demography*, vol.55, no. 1, 2018, hlm. 223–247.
- Prusty, Ranjan Kumar dan Kunal Keshri, 'Differentials in Child Nutrition and Immunization among Migrants and Non-Migrants in Urban India', *International Journal of Migration, Health and Social Care*, vol.11, no. 3, 2015, hlm. 194–205.
- Rajagopal, Shobhita dan Kanchan Mathur, "'Breaking the Silence around Menstruation": Experiences of Adolescent Girls in an Urban Setting in India', *Gender & Development*, vol. 25, no. 2, 2017, hlm. 303–17.
- Raju, Dhushyanth, et al., 'Cities, Slums and Child Nutrition in Bangladesh', *Review of Development Economics* vol.23, no. 2, 2019.
- Rangaswamy, Nimmi dan Edward Cutrell, 'Anthropology, Development, and ICTs: Slums, Youth and the Mobile Internet in Urban India', *Information Technologies & International Development*, vol.9, no. 2, 2013.
- Rao, Mrinalini A., et al., 'Globalization and the Identity Remix Among Urban Adolescents in India', *Journal of Research on Adolescence*, vol. 23, no. 1, 2013, hlm. 9–24.
- Rashid, Sabina Faiz, 'Human Rights and Reproductive Health: Political Realities and Pragmatic Choices for Married Adolescent Women Living in Urban Slums, Bangladesh', *BMC International Health and Human Rights*, vol.11, no. 3, 2011.
- Reality Check Approach+, Pulse Lab Jakarta and World Bank Indonesia, *People's Perspectives of Urban Poverty and Rural to Urban Migration*, The Palladium Group and World Bank Indonesia, 2018.
- Reerink, Gustaaf, and Jean-Louis van Gelder. 2010. "Land Titling, Perceived Tenure Security, and Housing Consolidation in the Kampongs of Bandung, Indonesia." *Habitat International* 34 (1): 78–85.
- Ribeiro, Adeylson Guimarães, et al., 'Bayesian Modeling of Hematologic Cancer and Vehicular Air Pollution among Young People in the City of São Paulo, Brazil', *International Journal of Environmental Health Research*, vol.30, no. 5, 2019, hlm. 504–514.
- Roberts, Mark, Federico Gil Sander dan Sailesh Tiwari, eds., *Time to Act: Realizing Indonesia's Urban Potential*. World Bank, Washington, D.C., 2019.
- Roshita, Airin, Elizabeth Schubert dan Maxine Whittaker, 'Child-Care and Feeding Practices of Urban Middle Class Working and Non-Working Indonesian Mothers: A Qualitative Study of the Socio-Economic and Cultural Environment', *Maternal and Child Nutrition*, vol.8, no. 3, 2012, hlm. 299–314.
- Santika, Otte, Judhiastuty Februhartanty dan Iwan Ariawan, 'Feeding Practices of Young Children Aged 12–23 Months in Different Socio-Economic Settings: A Study from an Urban Area of Indonesia', *British Journal of Nutrition Suppl* 1(S1):S1–7, Juli 2016.
- Santos, Selton Diniz, et al., 'Leprosy in Children and Adolescents under 15 Years Old in an Urban Centre in Brazil'. *Memorias Do Instituto Oswaldo Cruz*, vol.111, no. 6, 2016, hlm. 359–64.
- Satgas Penanganan COVID-19, 'Peta Sebaran COVID-19 | Satgas Penanganan COVID-19', Covid19.Go.Id, 2020, <<https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>>, diakses pada 23 Desember 2020.
- Savirani, Amalinda dan Ian Wilson, 'Distance Matters: Social Housing for the Poor', *Inside Indonesia*, 2017.

- Siagian, Clara, et al., 'Supporting Children, Blaming Parents: Frontline Providers' Perception of Childhood's Adversity and Parenthood in Indonesia', *Social Sciences*, vol.8, no.2, 2017.
- Siddique, Shabana, et al., 'Air Pollution and Its Impact on Lung Function of Children in Delhi, the Capital City of India', *Water, Air, & Soil Pollution*, vol.212, no. 1, 2010, hlm.89–100.
- Siddique, Shabana, Manas R. Ray, dan Twisha Lahiri, 'Effects of Air Pollution on the Respiratory Health of Children: A Study in the Capital City of India', *Air Quality, Atmosphere, & Health*, vol. 4, no. 2, 2011, hlm. 95–102.
- Silver, Christopher, *Planning the Megacity: Jakarta in the Twentieth Century*, Routledge, London and New York, 2008.
- Simone, AbdouMaliq, '2009 Urban Geography Plenary Lecture—on Intersections, Anticipations, and Provisional Publics: Remaking District Life in Jakarta', *Urban Geography*, vol. 31, no. 3, 2010, hlm. 285–308.
- Simone, AbdouMaliq, "'We Are Here Alone": The Ironic Potentials and Vulnerabilities of Mixed (Up) Districts in Central Jakarta: Debates and Developments', *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 38, no.4, 2014, hlm. 1509–1524.
- de Souza, Orivaldo Florencio, et al., 'Malnutrition among Children under 60 Months of Age in Two Cities of the State of Acre, Brazil: Prevalence and Associated Factors', *Brazilian Journal of Epidemiology*, vol.15, no. 1, 2012.
- Strina, A., et al., 'Factors Associated with Rotavirus Diarrhoea in Children Living in a Socially Diverse Urban Centre in Brazil', *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, vol. 106, no. 7, Mei 2012, hlm.445–451.
- Sumner, Cate, dan Santi Kusumanigrum, *Indonesia's Missing Millions: AIPJ Baseline Study on Legal Identity, Australian Aid*, 2014.
- Suryadarma, Daniel, Asep Suryahadi dan Sudarno Sumarto, *Causes of Low Secondary School Enrollment in Indonesia*, Labour Economics Working Papers 22546, East Asian Bureau of Economic Research, Canberra, 2006.
- Suryahadi, Asep, Ridho Al Izzati dan Daniel Suryadarma, 'Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia', *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol.56, no. 2, 2020, hlm. 175–92.
- Tilley, Lisa, Juanita Elias dan Lena Rethel, 'Urban Evictions, Public Housing and the Gendered Rationalisation of Kampung Life in Jakarta', *Asia Pacific Viewpoint*, vol. 60, no. 1, 2019, hlm. 80–93.
- Trang, Nguyen H. H. D., Tang K. Hong, dan Michael J. Dibley, 'Active Commuting to School Among Adolescents in Ho Chi Minh City, Vietnam: Change and predictors in a longitudinal study 2004 to 2009', *American Journal of Preventive Medicine*, vol. 42, no. 2, 2012, hlm. 120–128.
- United Nations Children's Fund, *Children in an Urban World*, UNICEF, New York, 2012.
- United Nations Children's Fund, *Children in a Digital World*, UNICEF, New York, 2017.
- United Nations Children's Fund, *Advantage or Paradox? The Challenge for Children and Young People of Growing Up Urban*, UNICEF, New York, 2018a.
- United Nations Children's Fund, *Conceptual Framework for Measuring Outcomes of Adolescent Participation*, UNICEF, New York, 2018b.
- United Nations Children's Fund, *Engaged and Heard! Guidelines on Adolescent Participation and Civic Engagement*, UNICEF, New York, 2020.
- United Nations, Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Children, United Nations, New York, 2020.
- U-Report Indonesia, 'U-Report Indonesia: Jajak Pendapat Tentang Digital Untuk Safer Internet Day', 2020a, <<https://indonesia.ureport.in/opinion/3970>>, diakses pada 7 Mei 2021.
- U-Report Indonesia, 'U-Report Indonesia: Pengalaman Sehari-Hari Selama Pandemi', 2020b, <<https://indonesia.ureport.in/opinion/4707>>, diakses pada 23 Desember 2020.
- U-Report Indonesia, 'U-Report Indonesia: Penguatan Partisipasi Remaja Yang Bermakna', 2020c, <<https://indonesia.ureport.in/opinion/4535>>, diakses pada 7 Mei 2021.
- Utomo, Ariane, et al., 'What Happens after You Drop out? Transition to Adulthood among Early School-Leavers in Urban Indonesia', *Demographic Research*, vol. 30, 2014, hlm.1189–1218.

- Wadhwa, Vandana, Jayati Ghosh dan Ezekiel Kalipeni, 'Factors Affecting the Vulnerability of Female Slum Youth to HIV/AIDS in Delhi and Hyderabad, India', *GeoJournal*, vol.77, no. 4, 2012, hlm. 475–88.
- Wathelet, Marielle, et al., 'Factors Associated With Mental Health Disorders Among University Students in France Confined During the COVID-19 Pandemic', *JAMA Network Open*, vol. 3, no. 10, 2020.
- Webbink, Ellen, Jeroen Smits dan Eelke de Jong, 'Hidden Child Labor: Determinants of Housework and Family Business Work of Children in 16 Developing Countries', *World Development*, vol.40, no. 3, 2012, hlm. 631–642.
- Winayanti, Lana dan Heracles C. Lang, 'Provision of Urban Services in an Informal Settlement: A Case Study of Kampung Penas Tanggul, Jakarta', *Habitat International*, vol.28, no. 1, 2004, hlm. 41–65.
- World Bank, *Indonesia Economic Prospects*, Juli 2020 : The Long Road to Recovery, World Bank, Washington, D.C., 2020.
- World Bank, *Poverty and Shared Prosperity 2020 : Reversals of Fortune*, World Bank, Washington, D.C., 2020.
- World Vision International, *Making Sense of the City: Developing Evidence through Action Research and Learning*, WVI, London, 2020.
- Yarrow, Noah, Eema Masood dan Rythia Afkar, *Estimates of COVID-19 Impacts on Learning and Earning in Indonesia: How to Turn the Tide*, World Bank, Washington D.C., 2020.
- Yonekura, Tatiana, et al., 'Youth Map of the City of Santo André, Southeastern Brazil: An Instrument to Read Social Inequalities'. *Revista de Saude Publica*, vol.44, no. 1, 2010.
- Zuilkowski, Stephanie Simmons, Udi Samanhudi dan Ina Indriana, "'There Is No Free Education Nowadays": Youth Explanations for School Dropout in Indonesia'. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, vol. 49, no. 1, 2019, hlm.16–29.
-

10

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PESERTA KONSULTASI (WAWANCARA ASINKRON DAN MENDALAM)

NAMA (NAMA SAMARAN)	USIA	JENIS KELAMIN	KOTA TEMPAT TINGGAL	KARAKTERISTIK LAIN
13–15 tahun (4 informan)				
Andi	15	Laki-laki	Jakarta	Seorang siswa di sekolah menengah pertama yang tinggal di lingkungan yang tidak terdaftar.
Ratih	15	Perempuan	Surakarta	Seorang anak perempuan yang tidak sedang dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan (NEET).
Ferdi	14	Laki-laki	Makassar	Seorang anak laki-laki yang tinggal di daerah kumuh.
Marta	14	Perempuan	Kupang	Seorang siswi di sekolah menengah pertama yang tinggal bersama keluarga besarnya.
16–18 tahun (6 informan)				
Desti	16	Perempuan	Jakarta	Seorang siswi SMP yang tinggal di Rusunawa yang mengalami penggusuran.
Fadhil	18	Laki-laki	Jakarta	Seorang siswa sekolah menengah yang memiliki pekerjaan paruh waktu/informal.
Dimas	19	Laki-laki	Surakarta	Seorang anak SMK yang putus sekolah yang saat ini sedang mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya.
Firly	16	Perempuan	Surakarta	Seorang siswi sekolah menengah.
Dina	16	Perempuan	Makassar	Seorang siswi sekolah menengah dan pekerja lepas yang tinggal bersama kerabatnya.
Ryan	18	Laki-laki	Kupang	Seorang siswa sekolah kejuruan dan pekerja lepas yang tinggal bersama keluarga besarnya.
19–24 tahun (6 informan)				
Annisa	20	Perempuan	Jakarta	Seorang buruh pabrik yang pernah mengalami penggusuran.
Galih	19	Laki-laki	Surakarta	Seorang siswa sekolah menengah yang hidup dengan disabilitas fisik
Ilham	23	Laki-laki	Makassar	Seorang pekerja muda dengan 2 pekerjaan lepas yang tinggal di daerah kumuh.
Doni	23	Laki-laki	Makassar	Seorang pekerja muda yang tinggal di daerah kumuh.
Siti	20	Perempuan	Kupang	Seorang mahasiswi yang tinggal dengan orang tua tunggal (ibu).
Putri	22	Perempuan	Kupang	Seorang mahasiswi yang saat ini bekerja sebagai penjual online lepas.
Lainnya (fasilitator lokal dan tokoh masyarakat)				
Ahmad	n/a	Laki-laki	Jakarta	Seorang pengorganisir masyarakat yang tinggal dan bekerja di kawasan kumuh Jakarta.
James	n/a	Laki-laki	Kupang	Pekerja LSM yang bekerja untuk dan bersama kaum muda dan komunitas marginal di wilayah Kupang.
Wanda	n/a	Perempuan	Kupang	
Dewi	n/a	Perempuan	Makassar	Seorang pekerja LSM yang bekerja dengan dan untuk kaum muda, berbasis di Makassar.
Wina	n/a	Perempuan	Surakarta	Seorang pekerja LSM yang bekerja dengan dan untuk kaum muda, berbasis di Surakarta.

LAMPIRAN 2. SISTEM SKOR UNTUK KLASIFIKASI PERKOTAAN/PERDESAAN

KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)	SKOR	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BEKERJA DI SEKTOR PERTANIAN (%)	SKOR	FASILITAS PERKOTAAN	KRITERIA	SKOR
<500	1	> 70	1	SD	Dalam batas atau <= 2,5 km	1
500-1.249	2	50-69,99	2	SMP	> 2.5 km	0
1.250-2.449	3	30-49,99	3	SMA		
2.500-3.999	4	20-29,99	4	Pasar Toko	Dalam batas atau <= 2 km	1
4.000-5.999	5	15-19,99	5		> 2 km	0
6.000-7.499	6	10-14,99	6	Bioskop Rumah Sakit	Dalam batas atau <= 5 km	1
7.500-8.499	7	5-9,99	7		> 5 km	0
> 8.500	8	<5	8	Hotel/Biliar/Diskotik/ Panti pijat/ salon	Dalam batas	1
					Tidak tersedia	0
					Persentase rumah tangga yang memiliki telepon >= 8	1
					< 8	0
				Persentase rumah tangga yang tersambung listrik >= 90	1	
				< 90	0	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Peraturan Kepala BPS 37/2010.

LAMPIRAN 3. DAFTAR WILAYAH MEGA-URBAN

NO.	WILAYAH MEGA-URBAN	DISTRIK
1	Jabodetabek	Semua kecamatan di Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi
2	Bandung Raya	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang
3	Gerbangkertosusilo	Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto
4	Kedungsepur	Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Ungaran (Kab. Semarang), Kabupaten Demak, Purwodadi (Kabupaten Grobogan)
5	Mebidangro	Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Tanah Karo
6	Patungraya Agung	Kab. Banyuasin, Kota Palembang, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir
7	Banjarbakula	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut
8	Sarbagita	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan.
9	Maminasata	Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Gowa, Kab. Takalar
10	Bimindo	Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara
11	Palapa	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman
12	Mataram Raya	Kota Mataram, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Barat

LAMPIRAN 4. PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH DALAM HAL ANAK-ANAK YANG TINGGAL DI DAERAH PERKOTAAN DENGAN SANITASI YANG LAYAK DAN KESENJANGAN ANTARA PROPORSI DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN, 2019

10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	PROPORSI ANAK-ANAK YANG TINGGAL DI RUMAH TANGGA DENGAN SANITASI YANG LAYAK DI DAERAH PERKOTAAN (%)	10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	KESENJANGAN ANTARA PROPORSI ANAK-ANAK YANG TINGGAL DI RUMAH TANGGA DENGAN SANITASI YANG LAYAK DI DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN (% PERKOTAAN - % PERDESAAN)
Sumatera Barat	70,4	Bali	12,2
Kalimantan Utara	73,7	Jawa Tengah	12,6
Lampung	76,4	Maluku	12,8
Kalimantan Tengah	76,7	Sulawesi Selatan	15,3
Maluku	77,1	Nusa Tenggara Barat	15,5
Kalimantan Barat	77,2	Kalimantan Utara	15,8
Bengkulu	78,1	Jawa Barat	17,1
Gorontalo	79,5	Papua Barat	17,3
Papua	80,2	Sulawesi Utara	17,5

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

LAMPIRAN 5. ANGKA KEMATIAN ANAK, BALITA DAN BAYI DI BAWAH 1 TAHUN MENURUT USIA IBU SAAT INI

KARAKTERISTIK LATAR BELAKANG	PERKOTAAN (%)						PERDESAAN (%)					
	KEMATIAN BAYI		KEMATIAN BALITA		KEMATIAN ANAK		KEMATIAN BAYI		KEMATIAN BALITA		KEMATIAN ANAK	
	2012	2017	2012	2017	2012	2017	2012	2017	2012	2017	2012	2017
Usia ibu saat ini												
15-19	9,6	42,5	49,5	75,7	40,3	34,6	60,1	34,4	98,0	75,7	40,4	0,0
20-24	15,8	22,7	20,0	33,3	4,3	10,9	45,4	17,7	54,5	33,3	9,5	5,5
25-29	27,1	24,6	33,8	26,9	6,9	2,3	43,7	30,9	54,7	26,9	11,5	7,6
30-34	25,3	21,9	28,6	28,0	3,4	6,3	37,8	25,4	47,5	28,0	10,0	11,6
35-39	25,4	22,3	36,6	27,1	11,5	4,9	34,0	27,1	44,7	27,1	11,1	8,2
40-44	30,4	28,9	38,3	35,0	8,1	6,3	41,3	36,4	53,8	35,0	13,0	11,5
45-49	41,2	44,9	50,1	54,5	9,3	10,1	43,2	35,5	59,4	54,5	17,0	9,8

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SDKI 2012 dan 2017.

LAMPIRAN 6. PERSENTASE ANAK DI BAWAH USIA 5 TAHUN YANG MENGALAMI DIARE DUA MINGGU SEBELUM SURVEI, MENURUT KUINTIL KEKAYAAN

KEKAYAAN	PREVALENSI DIARE (%)					
	PERKOTAAN		PERDESAAN		TOTAL	
	2012	2017	2012	2017	2012	2017
Termiskin	14,9	18,6	17,2	15,5	16,9	16,0
Miskin	15,9	15,9	15,3	15,8	15,5	15,8
Menengah	15,6	13,8	14,3	14,2	15,0	14,0
Kaya	12,7	13,0	15,0	16,2	13,4	14,2
Terkaya	10,1	9,3	11,5	13,5	10,4	10,1

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SDKI 2012 dan 2017.

LAMPIRAN 7. PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH DENGAN ANAK USIA 6 TAHUN YANG SAAT INI MENGENYAM SEKOLAH DASAR TANPA MENGENYAM PRASEKOLAH DI PERKOTAAN DAN KESENJANGANNYA ANTARA PROPORSI DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN, 2019

10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	PROPORSI ANAK USIA 6 TAHUN YANG SAAT INI MENGENYAM SEKOLAH DASAR TANPA MENGENYAM PRASEKOLAH (%)	10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	KESENJANGAN ANTARA ANAK USIA 6 TAHUN YANG SAAT INI MENGENYAM SEKOLAH DASAR TANPA MENGENYAM PRASEKOLAH DI DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN (% PERKOTAAN - % PERDESAAN)
Kalimantan Barat	43,3	Kalimantan Timur	6,7
Maluku Utara	39,4	Maluku Utara	3,3
Maluku	36,0	Sumatera Barat	2,0
Sumatera Selatan	29,4	Sulawesi Utara	1,2
Banten	25,8	Riau	0,8
Sulawesi Barat	24,9	DI Yogyakarta	0,5
Papua	24,8	Sulawesi Barat	-0,1
Sumatera Utara	24,5	Jawa Tengah	-1,0
Papua Barat	23,7	Sulawesi Tenggara	-1,0
Jambi	23,1	Maluku	-1,3

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

LAMPIRAN 8. PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH DENGAN ANAK PUTUS SEKOLAH USIA 7-12 TAHUN DI PERKOTAAN DAN KESENJANGAN ANTARA PROPORSI DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN, 2019

10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	PROPORSI ANAK USIA 7-12 TAHUN YANG SAAT INI PUTUS SEKOLAH (%)	10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	KESENJANGAN ANTARA PROPORSI ANAK USIA 7-12 TAHUN YANG SAAT INI PUTUS SEKOLAH DI DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN (% PERKOTAAN - % PERDESAAN)
Papua	3,3	Kalimantan Selatan	0,5
Kalimantan Selatan	1,3	DKI Jakarta	0,4
Papua Barat	1,3	DI Yogyakarta	0,1
Sulawesi Barat	1,3	Kalimantan Timur	0,1
Gorontalo	1,2	Kalimantan Tengah	0,0
Sulawesi Tengah	1,2	Lampung	0,0
Nusa Tenggara Timur	0,8	Bengkulu	0,0
Kalimantan Barat	0,8	Jawa Barat	0,0
Maluku Utara	0,8	Sumatera Utara	-0,1
Sulawesi Tenggara	0,8	Jambi	-0,1

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

LAMPIRAN 9. PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH DENGAN ANAK PUTUS SEKOLAH USIA 13-15 TAHUN DI PERKOTAAN DAN KESENJANGANNYA ANTARA PROPORSI DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN, 2019

10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	PROPORSI ANAK USIA 13-15 TAHUN DI PERKOTAAN YANG SAAT INI PUTUS SEKOLAH (%)	10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	KESENJANGAN ANTARA PROPORSI ANAK USIA 13-15 TAHUN DI PERKOTAAN YANG SAAT INI PUTUS SEKOLAH DI DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN (% PERKOTAAN - % PERDESAAN)
Sulawesi Barat	15,6	Sulawesi Barat	1,9
Jawa Barat	8,6	Sulawesi Utara	-0,8
Kalimantan Tengah	8,4	DI Yogyakarta	-1,2
Bangka Belitung	7,7	Sumatera Utara	-1,4
Kalimantan Selatan	7,5	Kalimantan Tengah	-1,5
Sulawesi Utara	6,6	Bali	-1,6
Kalimantan Barat	6,3	Aceh	-1,6
Banten	6,1	Papua Barat	-2,4
Sulawesi Selatan	5,9	Maluku Utara	-2,7
Kalimantan Utara	5,0	Nusa Tenggara Barat	-2,7

Sumber: : Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

LAMPIRAN 10. PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH DENGAN ANAK PUTUS SEKOLAH USIA 16-18 TAHUN DI PERKOTAAN DAN KESENJANGANNYA ANTARA PROPORSI DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN, 2019

10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	PROPORSI ANAK USIA 16-18 TAHUN DI PERKOTAAN YANG SAAT INI PUTUS SEKOLAH (%)	10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	KESENJANGAN ANTARA PROPORSI ANAK USIA 16-18 TAHUN DI PERKOTAAN YANG SAAT INI PUTUS SEKOLAH DI DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN (% PERKOTAAN - % PERDESAAN)
Sulawesi Selatan	26,4	Sulawesi Selatan	-0,3
Bangka Belitung	24,5	Bali	-2,7
Jawa Barat	24,4	Sulawesi Utara	-4,8
Gorontalo	23,9	Maluku	-5,0
Sulawesi Barat	23,1	Gorontalo	-6,7
Banten	22,3	Papua Barat	-7,1
Jawa Tengah	22,1	Jambi	-7,1
Lampung	22,0	Kepulauan Riau	-7,3
Kalimantan Selatan	21,8	Riau	-7,6
Jambi	19,2	Sulawesi Tengah	-7,8

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

LAMPIRAN 11. PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH DENGAN TINGKAT KELULUSAN SEKOLAH DASAR DI WILAYAH PERKOTAAN DAN KESENJANGAN ANTARA PROPORSI DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN, 2019

10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	TINGKAT KELULUSAN SEKOLAH DASAR (13–15 TAHUN) (%)	10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	KESENJANGAN ANTARA TINGKAT KELULUSAN SEKOLAH DASAR (13–15 TAHUN) DI DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN (% PERKOTAAN - % PERDESAAN)
Gorontalo	91,1	DI Yogyakarta	-5,1
Sulawesi Barat	92,6	Bali	-1,3
Kalimantan Selatan	92,6	Riau	-0,5
Bangka Belitung	93,0	Jawa Tengah	0,0
Sumatera Barat	93,3	Bangka Belitung	0,4
Kalimantan Barat	93,4	Sumatera Selatan	0,7
DI Yogyakarta	93,4	Jawa Barat	0,8
Nusa Tenggara Timur	94,2	Sulawesi Utara	1,2
Papua Barat	94,2	Sumatera Utara	1,3
Riau	94,8	Kalimantan Selatan	1,3

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

LAMPIRAN 12. PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH DENGAN TINGKAT KELULUSAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI WILAYAH PERKOTAAN DAN KESENJANGAN ANTARA PROPORSI DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN, 2019

10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	TINGKAT KELULUSAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (16–18 TAHUN) (%)	10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	KESENJANGAN ANTARA TINGKAT KELULUSAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (16–18 TAHUN) DI DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN (% PERKOTAAN - % PERDESAAN)
Sulawesi Barat	79,6	Sulawesi Utara	0,4
Kalimantan Barat	81,6	Kepulauan Riau	2,4
Papua	82,2	Sulawesi Barat	2,6
Bangka Belitung	83,2	Sulawesi Selatan	3,3
Gorontalo	83,6	Bali	3,4
Sulawesi Selatan	85,5	Jawa Tengah	3,8
Sulawesi Utara	85,9	DI Yogyakarta	4,3
Kalimantan Tengah	85,9	Nusa Tenggara Barat	4,4
Kalimantan Selatan	86,7	Sumatera Utara	4,9
Sulawesi Tengah	86,7	Jambi	5,3

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

LAMPIRAN 13. PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH DENGAN TINGKAT KELULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI WILAYAH PERKOTAAN DAN KESENJANGAN ANTARA PROPORSI DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN, 2019

10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	TINGKAT KELULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (19-21 TAHUN) (%)	10 PROVINSI DENGAN KINERJA TERENDAH	TINGKAT KELULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (19-21 TAHUN) DI DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN (% PERKOTAAN - % PERDESAAN)
Papua	41,1	Papua Barat	3,1
Sulawesi Barat	52,5	Jambi	3,8
Papua Barat	52,6	Sulawesi Barat	5,5
Jawa Tengah	57,2	Maluku Utara	8,3
Gorontalo	58,1	Maluku	8,6
Jambi	59,4	Jawa Timur	8,8
Nusa Tenggara Timur	59,4	Sulawesi Selatan	9,3
Bangka Belitung	60,9	Sulawesi Tenggara	10,4
Jawa Timur	61,6	Nusa Tenggara Barat	10,4
Kalimantan Tengah	61,8	Sumatera Selatan	11,2

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

LAMPIRAN 14. PREVALENSI PERKAWINAN ANAK DAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK, MENURUT KLASIFIKASI PERKOTAAN – PERDESAAN DI TINGKAT DESA DI KOTA DAN MEGA URBAN, 2019

JENIS TEMPAT	PERKAWINAN ANAK: PEREMPUAN BERUSIA 20–24 TAHUN YANG MENIKAH SEBELUM USIA 18 TAHUN		ANAK-ANAK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN (%)	
	PERKOTAAN (%)	PERDESAAN (%)	PERKOTAAN (%)	PERDESAAN (%)
Ukuran kota				
Kecil	7,9	17,9	91,4	70,2
Sedang	7,8	15,7	91,1	80,0
Besar	7,1	15,8	92,6	85,6
Metropolitan	7,0	16,2	88,5	83,8
Wilayah mega-urban				
Jabodetabek	5,7	10,5	88,9	62,8
Bandung Raya	11,4	22,9	84,6	84,9
Gerbangkertosusilo	5,0	8,4	94,9	87,3
Kedungsepur	4,4	11,4	95,8	95,4
Mebidangro	3,4	14,2	78,8	73,3
Patungraya Agung	4,3	21,9	88,1	79,4
Banjarbakula	14,3	29,0	90,3	83,5
Sarbagita	6,4	7,3	93,0	92,2
Maminasata	6,9	15,2	90,4	85,2
Bimindo	6,2	3,1	91,2	78,8
Palapa	2,7	7,3	88,8	82,3
Mataram Raya	10,1	22,7	89,1	70,4

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.

LAMPIRAN 15. PROPORSI ANAK-ANAK YANG TINGGAL DI RUMAH TANGGA DENGAN AIR MINUM YANG LAYAK DAN SANITASI YANG LAYAK, MENURUT KLASIFIKASI PERKOTAAN - PERDESAAN DI TINGKAT DESA DI KOTA DAN MEGA URBAN, 2019

JENIS TEMPAT	ANAK-ANAK (0–17 TAHUN) YANG TINGGAL DI RUMAH TANGGA DENGAN AIR MINUM LAYAK (%)		ANAK-ANAK (0–17 TAHUN) YANG TINGGAL DI RUMAH TANGGA DENGAN SANITASI LAYAK (%)	
	PERKOTAAN (%)	PERDESAAN (%)	PERKOTAAN (%)	PERDESAAN (%)
Ukuran kota				
Kecil	40,0	44,1	70,1	45,0
Sedang	34,1	42,9	82,9	53,8
Besar	40,0	54,4	83,1	61,6
Metropolitan	26,5	41,0	81,2	57,5
Wilayah mega-urban				
Jabodetabek	16,7	29,6	85,8	35,8
Bandung Raya	26,2	41,0	64,0	64,6
Gerbangkertosusilo	14,8	32,4	93,7	62,9
Kedungsepur	34,6	38,3	91,7	79,6
Mebidangro	20,6	39,5	93,7	87,7
Patungraya Agung	60,8	40,6	85,7	58,4
Banjarbakula	52,3	31,8	79,2	36,0
Sarbagita	25,7	63,6	99,3	79,6
Maminasata	38,1	53,0	94,3	89,4
Bimindo	14,5	23,2	88,2	73,7
Palapa	14,9	36,6	73,6	45,6
Mataram Raya	50,5	53,3	87,6	62,3

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan SUSENAS 2019.



ISBN 978-623-6543-14-6 (PDF)



9 786236 543146